Indonesia menempatkan pendidikan agama sebagai sesuatu yang penting dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pendidikan agama di Indonesia merupakan mata pelajaran wajib di tingkat pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, didampingi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antarumat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.

Pengajaran Islam tentu sama, yang membedakan ketika menyangkut aspek tertentu, seperti tingkat lembaga, kualifikasi peserta didik, waktu pembelajaran/perkuliahan, dan kedalaman pemahaman para pendidik sehingga diperlukan metodologi tertentu untuk memperkuat kajian materi Pendidikan Agama Islam. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, diharapkan semakin baik pula pemahaman agamanya. Oleh karena itu, melalui buku ini, penulis ingin menyajikan fenomena terkait pendidikan Islam di sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk menambah wawasan dan memahami kenyataan yang ada.

Penerbit Jejak Pustaka
Jejak_Pustaka
0813207483
Jejakpustaka.com

jejakpustaka

PENDIDIKAN
ISBN 978-623-183-979-0
9 786231 839190

Damanhuri, Kunainah Afroyim, Afiful Ikhwan, dkk.

FENOMENA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI

jejakpustaka

FENOMENA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI

Damanhuri, Kunainah Afroyim,
Afiful Ikhwan, dkk.

FENOMENA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI

Damanhuri, Kunainah Afroyim, Afiful Ikhwan,
Muhib Ali Hasan Ristia, Mohammad Wisnu Khumaidi,
Nur Indah Sari, Seka Andrean, Rafida, Aulia Diana Devi

JEJAK PUSTAKA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA

PASAL 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113

1. Seseorang yang tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 untuk penggunaan komersial dapat dihukum penjara maksimal 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp 100.000.000. (seratus juta rupiah)
2. Seseorang yang tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h untuk penggunaan komersial dapat dihukum penjara maksimal 3 tahun dan/atau denda maksimal Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah)
3. Seseorang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan komersial dapat dihukum penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000. (satu milyar rupiah)
4. Jika pelanggaran dilakukan dalam bentuk pembajakan, pelaku dapat dihukum penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp 4.000.000.000. (empat milyar rupiah)

FENOMENA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI

Damanhuri, Kunainah Afroyim, Afiful Ikhwan,
Muhib Ali Hasan Ristia, Mohammad Wisnu Khumaidi,
Nur Indah Sari, Seka Andrean, Rafida, Aulia Diana Devi

JEJAK PUSTAKA

FENOMENA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI

Penulis:
Damanhuri, Kunainah Afroyim, Afiful Ikhwan, Muhib Ali Hasan Ristia,
Mohammad Wisnu Khumaidi, Nur Indah Sari, Seka Andrean,
Rafida, Aulia Diana Devi

All rights reserved
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Hak Penerbitan pada Jejak Pustaka

ISBN: 978-623-183-919-0

Editor:
Prof. Triyo Supriyatno, Ph.D.
Tata Letak Isi:
Imarafsah Mutianingtyas
Desain Cover:
Bayu Aji Setiawan

XII + 151 hlm: 15,5 x 21 cm
Cetakan Pertama, Agustus 2024

Penerbit
Jejak Pustaka
Anggota IKAPI No. 141/DIY/2021
Sekretariat Jejak Imaji, RT 04 Kepuhkulon, Wirokerten
Banguntapan Bantul Yogyakarta
jejakpustaka@gmail.com
081320748380

Kata Pengantar

Indonesia sebagai negara dan bangsa yang memiliki beragam suku, etnis, aliran, dan agama merupakan bentuk kemajemukan yang ada di nusantara selama ini. Sebagai bangsa yang "berketuhanan Yang Maha Esa" memiliki ciri khas dalam pelaksanaan pendidikan agama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga mengatur secara ketat peraturan pendidikan agama yang berlaku dan ada juga negara yang memberikan kesempatan kepada berbagai lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum pendidikan agama yang diajarkan kepada peserta didik.

Indonesia menempatkan pendidikan agama sebagai sesuatu yang penting dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pendidikan agama di Indonesia merupakan mata pelajaran wajib di tingkat pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan wajib meliputi Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa. Ketiga mata pelajaran wajib ini menunjukkan tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan manusia Indonesia yang religius, bangsa yang warga negaranya, dan identitas nasional dengan bahasa nasionalnya.

Bahkan berbagai istilah yang sering kita dengar seperti "Pendidikan Agama Islam" (PAI) yang terkadang disingkat menjadi "Ilmu Pendidikan Islam", atau memang keduanya berbeda sehingga para ahli Pendidikan Islam merasa perlu untuk memikirkan Pendidikan Agama Islam disebut "Pelajaran

Agama Islam", begitu juga dengan istilah "Pengantar Agama Islam". Apakah istilah-istilah tersebut sama dengan nama-nama mata kuliah yang digunakan di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)? Di antaranya Studi Islam, Studi Islam, Studi Islam (Islamic Studies/Dirasah Islamiyah), atau Studi Islam (Islamic Studies/Dirasah Islamiyah). Atau, nama-nama mata kuliah di Perguruan Tinggi Umum (PTU) yaitu seperti Islamologi yang hanya berbobot 2 SKS, misalnya.

Oleh karena itu, tentu saja dapat dipahami bahwa materi Islam (keislaman) tidak sedangkal itu. Jika substansi yang diajarkan adalah ajaran Islam, maka substansinya adalah ajaran Islam, maka materi yang disampaikan cenderung sama. Namun, kemudian mengalami perbedaan ketika menyangkut aspek-aspek tertentu seperti tingkat lembaga, kualifikasi peserta didik, waktu pembelajaran/perkuliahan, dan kedalaman pemahaman para pendidik sehingga diperlukan metodologi tertentu untuk memperkuat kajian materi Pendidikan Agama Islam.

Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik pula pemahaman agamanya. Namun, sering kali di perguruan tinggi, mahasiswa memiliki pemahaman agama yang sempit. Hal ini disebabkan oleh kurangnya materi pendidikan agama yang memadai di tingkat pendidikan dasar dan menengah serta kurang maksimalnya mata kuliah agama di PTU.

Kemudian riset Yedi Purwanto, Qowaid, dan Ridwan Fauzi (2019), dengan judul "Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum", menjelaskan tentang pola internalisasi nilai-nilai moderasi di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang dilakukan dengan beberapa cara. *Pertama*, melalui keberadaan mata

kuliah PAI yang kontennya berkorelasi langsung dengan pembentukan karakter mahasiswa yang moderat. *Kedua*, melalui keteladanan seluruh *stakeholder* dan kebijakan di UPI, khususnya dosen PAI yang selalu mengedepankan sikap moderat. Materi yang disampaikan juga diinternalisasi nilai-nilai moderasi PAI UPI. Di antaranya terkait dengan masukan dari mahasiswa yang menjadi peserta perkuliahan PAI di UPI, berkaitan dengan para dosen yang mengampu mata kuliah PAI di UPI baik dari segi kemampuan mengajar ataupun kompetensi dosen PAI UPI, serta dosen PAI UPI. *Ketiga*, berkaitan dengan materi dari mata kuliah PAI itu sendiri. *Keempat*, berkaitan dengan dukungan dari lingkungan kampus UPI.

Muhaemin (2017) dalam risetnya "Posisi Strategis Mata Kuliah Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum di Kota Palopo" menjelaskan bahwa pelaksanaan muatan mata kuliah Agama Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dam Ilmu Politik (STISIP) Veteran Palopo terdiri atas tiga aspek pokok ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak dengan berbagai pengembangannya dan pembahasannya. Metode pembelajaran agama Islam yang digunakan oleh dosen mata kuliah agama di STISIP Veteran Palopo adalah metode ceramah, diskusi, dan pengajian. Metode pembelajaran tersebut dikemas dengan pendekatan andragogi, yaitu pembelajaran untuk orang dewasa. Sedangkan teknik evaluasi yang digunakan oleh dosen mata kuliah agama dalam mengevaluasi hasil belajar mata kuliah agama adalah tes tertulis.

Hamka (2009) dalam tulisannya "Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum Pasca Orde Baru" menjelaskan pergeseran paradigma Kurikulum PAI

di PTU pascapemerintahan Orde Baru, khususnya pada Kurikulum PAI tahun 2002. Sebagai sebuah perspektif yang dinamis dan responsif terhadap kekinian, pergeseran paradigma ini berimplikasi pada perubahan materi pembelajaran PAI di PTU yang tidak lagi mengulang-ulang materi di tingkat dasar dan menengah, tetapi lebih akomodatif terhadap isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, demokrasi, pluralisme, dan masyarakat madani. Dengan demikian, materi PAI dalam kurikulum 2002 cukup relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia di era reformasi ini, sekaligus sejalan dengan kebutuhan mahasiswa di tingkat perguruan tinggi yang membutuhkan wawasan keislaman yang lebih luas dan dinamis.

Dari penyederhanaan tersebut, dapat ditekankan bahwa pendidikan Islam sedang mengalami kebuntuan intelektual. Indikasi ini dapat dilihat dari minimnya upaya pembaruan (inovasi strategi pembelajaran dan manajemen sekolah Islam). Sementara itu, perubahan sosial yang semakin cepat sementara pendidikan Islam sangat kurang responsif terhadap isu-isu aktual sehingga kurang memperhatikan afektif dan psikomotorik. Tampaknya bahwa posisi Abdullah lebih penting daripada *khalifatullah*. Kemudian dalam PAI di PTU masih terdapat sejumlah masalah baik dari segi subjek kedudukan, tujuan, materi, metodologi, dosen, bahan ajar, mahasiswa, kampus, kesinambungan kurikulum, dan perspektifnya.

Malang, 17 Juli 2024
Prof. H. Triyo Supriyatno, Ph.D.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....v
Daftar Isi..... ix

Bab 1
Review Historis Pendidikan Agama Islam Abad ke-19..... 1
Kunainah Afroyim 1
A. Pendahuluan 1
B. Gerakan Reformasi Pendidikan Islam 2
C. Kemandekan Pendidikan Islam 3
D. Beberapa Aspek Pendidikan Agama Islam.....5
E. Gerakan Modernisasi Pendidikan Agama Islam.....8
F. Implementasi Modernisasi Pendidikan Agama Islam 9
G. Pola-Pola Modernisasi Pendidikan Agama Islam.....10
H. Daftar Pustaka.....12

Bab 2
Perkembangan Epistemologi dan Institusi Perguruan Tinggi Islam Indonesia.....**14**
Damanhuri 14
A. Pendahuluan 14
B. Sejarah Perguruan Tinggi Islam di Indonesia 15
C. Dinamika Institusi: IAIN, STAIN, dan UIN 18
D. Epistemologi dan Struktur Organisasi, STAIN, IAIN, serta UIN.....24
E. Tantangan dan Kendala dalam Pengembangan STAIN, IAIN, dan UIN 25
F. Kesimpulan 28
G. Daftar Pustaka.....29

Bab 3
Berguru Islam ke Barat (Proses Pelaksanaan serta Pro dan Kontra dalam Sebuah Gagasan) 32
Muhib Ali Hasan Ristia 32
A. Pendahuluan 32
B. Motivasi para Cendikiawan Muslim Indonesia untuk Berguru Islam ke Barat 33
C. Pro-Kontra terhadap Program Pengiriman Dosen Beasiswa ke Barat 42
D. Kesimpulan 46
E. Daftar Pustaka 47

Bab 4
Jaringan Timur Tengah Ulama Nusantara 49
Afiful Ihwan 49
A. Pendahuluan 49
B. Latar Belakang Pendidikan para Ulama Terkemuka Nusantara (Abad ke-20 sampai dengan Abad ke-21) 51
C. Pengaruh Jaringan Timur Tengah Ulama terhadap Paham dan Keberagamaan Umat Islam Indonesia 60
D. Kesimpulan 64
E. Daftar Pustaka 65

Bab 5
Kebangkitan Pendidikan Agama Islam di Sekolah: SDIT, SMPIT, SMAIT 69
Mohammad Wisnu Khumaidi 69
A. Kebangkitan Pendidikan Agama Islam 69
B. Sejarah Berdirinya Sekolah Islam Terpadu 70
C. Kurikulum Sekolah Islam Terpadu: Reintegrasi Keilmuan Pendidikan Islam 74

D. Perbedaan Antara Madrasah dengan Sekolah Islam Terpadu 78
E. Kesimpulan 80
F. Daftar Pustaka 81

Bab 6
Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum 83
Seka Andrean 83
A. Pendahuluan 83
B. Pembahasan 84
C. Kesimpulan 98
D. Daftar Pustaka 98

Bab 7 Etika Akademis Guru dan Dosen: Idealisme di Tengah Pragmatisme 100
Nur Indah Sari 100
A. Pendahuluan 100
B. Etika Akademik dan Implementasinya 101
C. Pelanggaran Etika Akademis 107
D. Analisis Kritis Sebab dan Solusi 111
E. Kesimpulan 115
F. Daftar Pustaka 116

Bab 8 Pengembangan PAI dalam Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah Islam Unggulan 119
Rafida 119
A. Pendahuluan 119
B. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 121
C. Sekolah Unggulan 122
D. Pengembangan Kurikulum PAI di Sekolah Islam Unggulan 123

E. Pendidikan Agama Islam dalam Budaya Religius..... 125
F. Penerapan Budaya Religius di Sekolah Islam Unggulan . 126
G. Kesimpulan 128
H. Daftar Pustaka 129

Bab 9
Penguatan Nilai Islam Moderat dalam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi 131
Aulia Diana Devi 131
A. Pendahuluan..... 131
B. Nilai Islam Moderat dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi 139
C. Kesimpulan 144
D. Daftar Pustaka 145

Tentang Penulis.....148

Bab 1
Review Historis Pendidikan Agama Islam Abad ke-19

Kunainah Afroyim

A. Pendahuluan

Pendidikan selalu menjadi aspek penting dalam peradaban Islam sejak mas awalnya. Pada abad ke-19, dunia Islam menghadapi banyak tantangan dan perubahan yang berdampak besar pada system pendidikannya. Abad ini ditandai oleh kolonialisme, modernisasi, dan gerakan reformasi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan.

Abad ke-19 adalah periode yang penuh dengan perubahan signifikan di dunia Islam. Pengaruh kolonialisme Barat memperkenalkan ide-ide dan system baru yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Di banyak wilayah, sistem pendidikan tradisional mulai beradaptasi dengan tuntutan zaman yang berubah.[1]

Pendidikan Islam di Indonesia tidak lepas dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia dari masa penjajahan hingga masa sekarang (reformasi). Lembaga-lembaga Islam seperti pesantren, madrasah, surau, dan semacamnya mempunyai andil besar terhadap proses pemerdekaan bangsa terhadap proses kemerdekaan bangsa dari belenggu penjajah.

[1] T.W. Arnold, *The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith* (Tanpa Kota: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun).

Lembaga-lembaga tersebut menjadi tempat dan simbol perlawanan terhadap perkembangan penjajah.

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antarumat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.[2] Pendidikan agama Islam juga merupakan pendidikan yang membimbing jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam.[3] Pendidikan Agama Islam, yakni upaya pendidikan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup) seorang.[4]

B. Gerakan Reformasi Pendidikan Islam

Pada abad ke-19, muncul gerakan reformasi yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Jamal al-Din al-Afghani. Mereka mendorong modernisasi dalam pendidikan Islam dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern ke dalam kurikulum dan mengadopsi metode pengajaran yang lebih efisien.[5]

1. Muhammad Abduh

   Muhammad Abduh adalah salah satu tokoh reformasi pendidikan Islam yang berpengaruh pada akhir abad ke-

[2] Abdul Majid dan Dian Andayanai, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 130.

[3] Ahmad Daeng Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Al-Ma'ruf, 1989), hlm. 23.

[4] Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 5–6.

[5] Basri Bustan, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 178–180.

19. Ia mendorong pembaruan dalam sistem pendidikan dengan menekankan pentingnya ilmu pengetahuan modern serta memperbaiki kurikulum madrasah.[6]

2. Jamal al-Din al-Afghani

   Jamal al-Din al-Afghani adalah seorang pemikir yang mengadvokasi kebangkitan dan reformasi dunia Islam melalui pendidikan. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang dapat membangkitkan kesadaran politik dan sosial umat Islam.[7]

Pengaruh kolonialisme memperkenalkan sistem pendidikan Barat di banyak negara muslim. Hal ini membawa perubahan besar dalam struktur dan kurikulum pendidikan Islam. Ada upaya untuk menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan studi agama, meskipun ada resistansi dari kalangan konservatif.[8] Pendidikan yang lebih modern dan inklusif membuka peluang bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan, yang pada gilirannya mengubah peran mereka dalam masyarakat. Selain itu, perubahan dalam sistem pendidikan juga berdampak pada struktur sosial dan mobilitas sosial di dunia Islam.[9]

C. Kemandekan Pendidikan Islam

Kemandekan pendidikan Islam pada abad ke-19 di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa faktor dan

---

[6] Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 98–99.

[7] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942* (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 45–47.

[8] Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Tanpa Kota: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun), hlm. 235–237.

[9] Basri Bustan, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*, hlm. 182–183.

penyebab utama hal-hal yang menyebabkan kemandekan pendidikan Islam pada abad ke-19 itu.

1. Faktor Internal

a. Keterbatasan Kurikulum
   1) Fokus pada ilmu agama tradisional: banyak pesantren dan madrasah yang hanya fokus pada pengajaran ilmu agama tradisional seperti fikih, tafsir, dan hadis, tanpa memasukkan ilmu pengetahuan modern dan sains.
   2) Keterbatasan inovasi: kurikulum yang di ajarkan sering kali tidak mengalami pembaruan dan inovasi, sehingga tidak mampu mengikuti perkembangan zaman.

b. Metode Pengajaran
   1) Metode tradisional: pengajaran di pesantren sering menggunakan metode hafalan dan pengulangan yang kurang mendorong pemikiran kritis dan inovatif.
   2) Kurang sumber daya: keterbatasan guru yang terampil dan terlatih dalam metode pengajaran modern menghambat perkembangan pendidikan.

c. Keterbatasan Akses dan Infrastruktur
   1) Infrastruktur yang terbatas: banyak pesantren yang memiliki infrastruktur yang terbatas dan kurang memadai untuk mendukung pendidikan yang efektif.
   2) Keterbatasan akses: pendidikan Islam sering kali hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu, terutama di daerah pedesaan yang terpencil.

2. Faktor Eksternal

a. Kolonialisme Belanda
   1) Kebijakan kolonial: pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan yang membatasi

perkembangan pendidikan Islam. Mereka lebih memprioritaskan pendidikan sekuler dengan kurikulum Barat.

2) Pengawasan dan kontrol: pesantren dan madrasah berada di bawah pengawasan ketat pemerintah kolonial, yang khawatir akan potensi pesantren sebagai pusat perlawanan dan nasionalisme.

b. Politik dan Sosial

1) Ketidakstabilan politik: ketidakstabilan politik dan konflik lokal mengganggu proses pendidikan dan menyebabkan ketidakpastian bagi lembaga pendidikan Islam.
2) Perubahan sosial: perubahan sosial yang cepat, terutama di daerah perkotaan, menyebabkan pergeseran nilai-nilai dan prioritas dalam masyarakat, yang kadang-kadang mengurangi minat terhadap pendidikan agama tradisional.

c. Ekonomi

1) Keterbatasan sumber daya ekonomi: kemiskinan dan keterbatasan sumber daya ekonomi di banyak wilayah Indonesia menyebabkan kurangnya dana untuk pengembangan pendidikan Islam.
2) Kesenjangan ekonomi: kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan juga memengaruhi akses dan kualitas pendidikan Islam.

D. Beberapa Aspek Pendidikan Agama Islam

Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam disebut juga dengan pendidikan Bumiputera, karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang pribumi Indonesia. Pendidikan Islam pada masa ini ada tiga istilah, yaitu sistem

peralihan Hindu Islam, sistem pendidikan surau, dan sistem pendidikan pesantren.[10]

1. Sistem Peralihan Hindu Islam

   Sistem ini merupakan sistem pendidikan yang masih menggabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan Islam. Pada garis besarnya, pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan dua sistem, yaitu sistem keraton dan sistem petapa.

2. Sistem Pendidikan Surau

   a. Asal Usul Surau

      Surau merupakan istilah yang banyak digunakan di Asia Tenggara, seperti Sumatra Selatan, Semenanjung Malaya, dan Patani (Thailand). Namun yang paling banyak dipergunakan di Minangkabau. Secara bahasa, kata *surau* berarti "tempat" atau "tempat penyembahan". Menurut pengertian asalnya, *surau* adalah bangunan kecil yang dibangun untuk menyembah arwah nenek moyang. Beberapa ahli mengatakan bahwa surau berasal dari India yang merupakan tempat yang digunakan sebagai pusat pengajaran dan pendidikan Hindu-Budha.

   b. Perkembangan Surau

      Menurut sejarawan bahwa memang cikal bakal surau tumbuh dan berkembang dalam tradisi keagamaan dan pendidikan Islam di Minangkabau pertama kali diawali oleh Syekh Burhanudin (1026–1111 H/ 1646–1691 M) di Ulakan Pariaman. Surau Syekh Burhanudin mulai memperkenalkan prinsip-prinsip dasar agama Islam, mengajarkan dua kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Prinsip-prinsip dasar ini (rukun Iman dan rukun Islam) diperkenalkan dan dipraktikkan dalam

[10] Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalammulia, 2011), hlm. 254.

bentuk amalan-amalan di samping menjelaskan hikmat dan fadilat yang dapat dipahami dengan mudah. Sistem pembelajaran seperti ini semakin kuat dan dapat menarik minat masyarakat hingga keinginan untuk mengunjungi surau dan menimba ilmu dari Syekh Burhanudin semakin besar.

c. Pondok Pesantren

Sebelum tahun 1960-an, pusat-pusat pendidikan pesantren di Indonesia lebih dikenal dengan nama pondok. Istilah pondok barangkali dari pengertian asrama-asrama para santri atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu, atau barangkali berasal dari kata Arab *funduq* yang artinya hotel atau asrama.

Perkataan pesantren berasal dari kata santri, yang dengan awalan pe- di depan dan akhiran -an berarti tempat tinggal para santri. Profesor Johns berpendapat bahwa istilah santri berasal dari istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji, sedang C.C. Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari kata *shastri* berasal dari kata *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Dari asal-usul kata santri pula banyak sarjana berpendapat bahwa lembaga pesantren pada sadarnya adalah lembaga pendidikan keagamaan bangsa Indonesia pada masa menganut agama Hindu Budha yang bernama *mandala* yang diislamkan oleh para kiai.[11]

Kehadiran pesantren di tengah masyarakat tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga penyiaran agama dan sosial keagamaan. Pesantren berhasil menjadikan dirinya sebagai pusat

[11] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 2015), hlm. 41.

gerakan pengembangan Islam, seperti diakui oleh Dr. Soebadri dan Prof. Johns, yang dikutip oleh Zamachsyari Dhofier dalam bukunya *Tradisi Pesantren* (1982).

Selama zaman kolonial, pesantren lepas dari perencanaan pendidikan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Belanda berpendapat bahwa sistem pendidikan Islam sangat jelek baik ditinjau dari segi tujuan maupun metode dan bahasa (bahasa Arab) yang dipergunakan untuk mengajar, sehingga sangat sulit untuk dimasukkan dalam perencanaan pendidikan umum pemerintah kolonial. Tujuan pendidikannya dinilai tidak menyentuh kehidupan duniawi, metode yang dipergunakan tidak jelas kedudukannya; seorang guru: apakah ia guru ataukah pemimpin agama, dan dalam hal bahasa yang dipergunakan, tulisan Arab sangat berbeda dengan tulisan latin sehingga menyulitkan untuk dimasukkan ke dalam perencanaan pendidikan mereka.[12]

E. Gerakan Modernisasi Pendidikan Agama Islam

Modernisasi pendidikan agama Islam adalah upaya untuk memperbarui metode, materi, dan kurikulum pendidikan agama agar sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasar ajaran Islam. Modernisasi ini mencakup berbagai aspek, seperti penggunaan teknologi, metode pengajaran yang lebih interaktif, serta penekanan pada pemahaman kontekstual terhadap ajaran Islam.

Menurut Haidar Bagir, modernisasi dalam pendidikan agama Islam harus didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu

[12] Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan, 1994), hlm. 21.

pemurnian ajaran Islam, penyesuaian ajaran Islam dengan konteks zaman, dan pengembangan potensi intelektual umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.[13] Tujuan utama dari modernisasi pendidikan agama Islam ialah:

1. meningkatkan kualitas pendidikan,
2. mempersiapkan generasi yang adaptif,
3. memperkuat pemahaman Islam yang moderat, dan
4. mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan agama.

F. Implementasi Modernisasi Pendidikan Agama Islam

Implementasi modernisasi pendidikan agama Islam dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis, antara lain sebagai berikut.

1. Revisi Kurikulum: Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) harus direvisi secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika sosial.
2. Pelatihan Guru: Guru sebagai ujung tombak pendidikan harus dibekali dengan kemampuan pedagogis dan teknologi yang memadai. Pelatihan dan *workshop* bagi guru sangat penting untuk meningkatkan kompetensi mereka.
3. Penggunaan Teknologi: Pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar, seperti penggunaan multimedia, *e-learning*, dan aplikasi pendidikan berbasis digital.
4. Pengembangan Metode Pembelajaran: Metode pembelajaran harus lebih interaktif dan partisipatif, seperti penggunaan metode diskusi, simulasi, dan studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

[13] Haidar Bagir, *Islam Tuhan Islam Manusia: Agama dan Spiritualitas di Zaman Kacau* (Bandung: Mizan, 2008), hlm. 47.

5. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan Lain: Membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan umum dan institusi lainnya untuk memperkaya materi dan metode pengajaran.

G. Pola-Pola Modernisasi Pendidikan Agama Islam

1. Reformasi Kurikulum

   Modernisasi kurikulum mencakup integrasi ilmu agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara pengetahuan agama dan ilmu umum. Kurikulum harus dirancang agar relevan dengan kebutuhan zaman dan mampu mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan global.

   Sebagai contoh, kurikulum di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia mengintegrasikan mata pelajaran agama dengan sains dan teknologi, sehingga siswa mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan aplikatif.[14]

2. Pengembangan Metode Pengajaran

   Metode pengajaran yang interaktif dan partisipatif sangat penting dalam modernisasi pendidikan agama. Penggunaan metode diskusi, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman mereka terhadap materi.

   Misalnya, pendekatan *problem-based learning* (PBL) telah diterapkan di beberapa sekolah Islam untuk mendorong

[14] Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 102.

siswa berpikir kritis dan memecahkan masalah nyata yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.[15]

3. Pemanfaatan Teknologi
   Teknologi memainkan peran penting dalam modernisasi pendidikan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. *E-learning*, aplikasi pendidikan, dan media digital menjadi alat penting dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, aplikasi Qur'an Kemenag yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Indonesia, memudahkan siswa untuk mengakses dan mempelajari al-Qur'an secara digital.[16]
4. Pelatihan dan Pengembangan Guru
   Guru sebagai agen perubahan harus terus mengembangkan kompetensinya. Pelatihan dan *workshop* yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pedagogis dan teknologi guru. Program pelatihan guru yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) memberikan pelatihan dalam penggunaan TIK dan metodologi pembelajaran modern untuk guru-guru PAI.[17]
5. Pendekatan Multidisiplin
   Pendidikan agama harus dikembangkan dengan pendekatan multidisiplin yang melibatkan ilmu sosial, humaniora, dan sains. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang holistik dan menyeluruh.

---

[15] M. Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 89.

[16] Kementerian Agama RI, *Aplikasi Qur'an Kemenag* (Jakarta: Kemenag, 2020).

[17] Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), *Modul Pelatihan Guru PAI* (Jakarta: P4TK, 2018).

Misalnya, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengembangkan program studi yang menggabungkan ilmu agama dengan ilmu sosial dan humaniora, seperti Studi Islam dan Hubungan Internasional.[18]

H. Daftar Pustaka

Abdullah, Amin. 2006. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdullah, Taufik. 1987. *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Al-Abrasyi, M. Athiyah. 2003. *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Arnold, T.W. Tanpa Tahun. *The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith*. Tanpa Kota: Tanpa Penerbit.

Azra, Azyumardi. 2004. *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Kencana.

Bagir, Haidar. 2008. *Islam Tuhan Islam Manusia: Agama dan Spiritualitas di Zaman Kacau*. Bandung: Mizan.

Bustan, Basri. 2007. *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Prenada Media.

Dhofier, Zamakhsyari. 2015. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES.

Kementerian Agama RI. 2020. *Aplikasi Quran Kemenag*. Jakarta: Kemenag.

Madjid, Nurcholish. 1997. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.

Majid, Abdul dan Dian Andayanai. 2005. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Marimba, Ahmad Daeng. 1989. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'ruf.

[18] Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Program Studi Studi Islam dan Hubungan Internasiona*l, (Yogyakarta: UIN, 2017).

Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT).

Muhaimin. 2006. *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

_____. 2009. *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Noer, Deliar. 1980. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*. Jakarta: LP3ES.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK). 2018. *Modul Pelatihan Guru PAI*. Jakarta: P4TK.

Ramayulis. 2011. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalammulia.

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017. *Program Studi Studi Islam dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: UIN.

Bab 2
Perkembangan Epistemologi dan Institusi Perguruan Tinggi Islam Indonesia

Damanhuri

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Lembaga pendidikan tinggi seperti Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Universitas Islam Negeri (UIN), serta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) memainkan peran yang signifikan dalam perkembangan ini. Awalnya, IAIN didirikan dengan tujuan memberikan pendidikan agama yang terstruktur dan formal kepada masyarakat.[19] Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pendidikan yang lebih holistik, STAIN dan kemudian UIN muncul sebagai respons terhadap tantangan ini.

Transformasi dari IAIN ke UIN mencerminkan perubahan paradigma epistemologi yang signifikan, di mana integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum menjadi fokus utama.[20] Perubahan ini tidak hanya membawa dampak positif dalam hal diversifikasi kurikulum, tetapi juga

[19] Ajeng Sulistyaningrum et al., "Perubahan IAI Sunan Giri Bojonegoro Menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro dalam Mengembangkan Mutu Pendidikan dan Keunggulan Bersaing Perguruan Tinggi". *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* (2024), hlm. 78.

[20] Zainal Abidin Bagir, *Integrasi Ilmu dan Agama*: *Interpretasi dan Aksi* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 132.

memperkuat posisi institusi-institusi ini dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi di era modern.

B. Sejarah Perguruan Tinggi Islam di Indonesia

Dalam sejarah pendidikan tercatat di Yogyakarta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) didirikan secara resmi pada 24 Agustus 1960. Menurut Haidar, pendirian lembaga melibatkan penggabungan dua entitas pendidikan tinggi Islam utama pada saat itu. Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta, integrasi kedua institusi ini bertujuan untuk memperkuat dan memperluas akses pendidikan tinggi Islam di Indonesia, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang agama Islam.[21]

Pendirian IAIN bertujuan untuk memberikan pengajaran dan pendidikan tingkat universitas, serta menjadi pusat pengembangan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang ilmu pengetahuan dalam konteks agama Islam. Jurusan-jurusannya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman seperti syariah, tarbiyah, dakwah, dan ushuluddin, dengan tujuan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berwawasan luas dalam bidang agama Islam.[22]

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1961 menetapkan struktur dan penekanan akademik yang spesifik dalam pendidikan tinggi Islam di Indonesia, serta mengatur penyelenggaraan IAIN yang menetapkan kerangka dasar bagi IAIN dalam menyelenggarakan program akademiknya. Setiap

[21] Muhammad Iswantir, *Paradigma Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 40.

[22] Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 122.

fakultas dan jurusan di IAIN memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan tinggi Islam dengan pendekatan yang komprehensif dan multidisiplin, mencakup aspek keilmuan, pendidikan, hukum, dan sastra dalam konteks Islam dan kebudayaan. [23]

Dengan pendekatan multidisiplin ini, IAIN tidak hanya menitikberatkan pada aspek akademik, tetapi juga membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis dan kritis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Sehingga, para lulusan diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin, pengajar, cendekiawan, dan profesional yang berkontribusi positif dalam transformasi sosial, ekonomi, dan keilmuan di Indonesia.[24] Dalam perkembangan berikutnya, terjadi perubahan signifikan dalam struktur kurikulum di lembaga tersebut terutama tahun 1970-an. Pada periode ini, beberapa jurusan di IAIN mengalami pengecilan atau bahkan penghapusan. Jurusan-jurusan seperti Pedagogik, Ilmu Tentara, Etnologi, Sosiologi, Hukum, dan Ekonomi telah ditutup, tetapi Pendidikan Agama dan Bahasa Arab serta Bahasa Indonesia masih ada. Perubahan ini menunjukkan upaya IAIN untuk menyesuaikan kurikulumnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan pendidikan.[25]

Penyederhanaan atau penghapusan jurusan-jurusan tertentu mungkin dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya dan fokus pada bidang-bidang yang dianggap lebih relevan atau strategis dalam konteks pendidikan tinggi Islam.

---

[23] Wahid Wahab, *Peraturan Menteri Agama No. 15 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Institut Agama Islam Negeri* (Jakarta: Tanpa Penerbit, 1960), hlm. 2.

[24] *Ibid*., hlm. 127.

[25] Marwan Salahuddin, *Model Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia* (Mataram: Ulumuna, 2014), hlm. 130.

Hal ini juga dapat mencerminkan respons terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja, serta dinamika internal dalam lembaga pendidikan itu sendiri.

Dalam perkembangan berikutnya pada tahun 1973, terjadi ekspansi signifikan Institut Agama Islam Negeri, di mana 14 IAIN telah didirikan dan tersebar di seluruh negeri. Sebelumnya, keberadaan IAIN hanya terfokus di Jakarta dan Yogyakarta. Perkembangan ini menunjukkan bagaimana beberapa IAIN telah berevolusi dari institusi kecil menjadi lembaga yang lebih besar dan terorganisir. Awalnya, IAIN mungkin hanya memiliki satu atau dua fakultas, tetapi seiring waktu, mereka telah berkembang menjadi institusi dengan lima fakultas atau lebih.

Hal ini mencerminkan diversifikasi program akademik yang ditawarkan, yang mencakup berbagai disiplin ilmu dalam studi Islam dan bidang terkait lainnya. Transformasi ini juga menunjukkan peningkatan kapasitas IAIN dalam menyediakan pendidikan tinggi yang lebih komprehensif dan berkualitas. Dengan lebih banyak fakultas, IAIN dapat menawarkan lebih banyak program studi, menarik lebih banyak mahasiswa, dan menghasilkan lulusan yang lebih beragam dan siap bersaing di pasar kerja. [26]

Selain itu, transformasi ini juga merupakan respons terhadap tuntutan pendidikan yang semakin kompleks dalam era globalisasi dan digitalisasi, kebutuhan akan pendidikan tinggi yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman semakin mendesak.[27] Dengan memperluas dan

---

[26] Ahmad Syukri et al., *Transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dalam Meningkatkan Pelayanan Akademik* (Yogyakarta: K-Media, 2021), hlm. 3.

[27] Alya Fatma Hadi et al., "Strategi Organisasi Pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah dalam Menghadapi Tantangan Global", *Protasis: Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, dan Pengajarannya* (2023), hlm. 180.

meningkatkan program akademiknya, IAIN dapat memenuhi tuntutan tersebut dan memberikan pendidikan yang lebih baik bagi mahasiswanya.

Terakhir, peningkatan jumlah fakultas dan program studi di IAIN juga berarti peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi Islam di berbagai daerah di Indonesia.[28] Dengan berkembangnya IAIN menjadi lembaga yang lebih besar, lebih banyak mahasiswa dari berbagai latar belakang dapat mengakses pendidikan tinggi Islam yang berkualitas, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi di daerah mereka masing-masing.

Perkembangan IAIN menunjukkan transformasi signifikan dengan berkembang menjadi lima fakultas, yaitu Syariah, Ushuluddin, Adab, Tarbiyah, seta Dakwah. Penambahan jurusan baru seperti Tadris pada 1980-an untuk mengatasi kekurangan guru dalam Bahasa Inggris, IPA, Matematika, serta jurusan Kependidikan Islam (KI) pada 1990-an, mencerminkan respons terhadap tuntutan pendidikan yang semakin kompleks. Transformasi ini meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas pendidikan tinggi Islam di Indonesia, menunjukkan adaptasi IAIN terhadap kebutuhan masyarakat dan komitmen untuk menyediakan pendidikan yang relevan dan berkualitas.[29]

C. Dinamika Institusi: IAIN, STAIN, dan UIN

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) adalah institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan

[28] Sri Rizqi Wahyuningrum et al., *Tridarma Perguruan Tinggi (Teori dan Praktik*) (Madura: IAIN Madura Press, 2024), hlm. 4.

[29] Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Pendidikan Nasional Indones*ia (Jakarta: Kencana Press, 2012), hlm. 108.

agama Islam dan memperluas akses pendidikan tinggi di bidang agama.[30] Pada tanggal 1 Juli 1997, pemerintah Indonesia secara resmi mendirikan STAIN di berbagai wilayah di seluruh Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 Fakultas Institut Agama Islam Negeri yang didirikan di berbagai wilayah adalah dasar berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Mencuplik pendapat Haidar, bahwa STAIN berasal dari fakultas yang didirikan oleh masing-masing IAIN di berbagai tempat. Untuk memenuhi kebutuhan lokal, cabang-cabang STAIN didirikan di luar kota tempat IAIN induk berada, yang mengakibatkan duplikasi beberapa fakultas. Sebagai contoh, Haidar menyatakan bahwa IAIN Alauddin Ujung Pandang memiliki jurusan Tarbiyah di pusat Kota Makassar, serta di beberapa luar kota, seperti Ambon, Ternate, dan sebagainya. Fakultas lain di berbagai IAIN di Indonesia juga sama.[31]

Fakultas-fakultas ini dipisahkan dari IAIN induknya untuk menghindari duplikasi fakultas dan memberi mereka lebih banyak kebebasan untuk berkembang tanpa terikat pada peraturan yang membatasi dari IAIN induknya. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri merupakan nama yang diberikan pada lembaga-lembaga ini setelah mereka terpisah. Perkembangan IAIN juga dapat dilihat dari perubahan nama dan status beberapa fakultas menjadi STAIN. Misalnya, Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatra Utara berubah nama menjadi STAIN Padang Sidimpuan, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang berubah nama menjadi STAIN Malang. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana IAIN beradaptasi dan berkembang

[30] Ahmad Zaenuri, "Transformasi Kelembagaan Perguruan Tinggi Agama Islam dan Pengaruhnya terhadap Manajemen Kelembagaan", *Transformasi: Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam* (2018), hlm. 19.

[31] Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia* (Medan: IAIN Press, 2015), hlm. 220.

untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pendidikan tinggi Islam di bumi Nusantara.[32]

Perubahan nama dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) merupakan bagian dari transformasi penting dalam pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Hal ini mencerminkan respons terhadap perubahan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pendidikan yang semakin berkembang. Contohnya, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah mengalami perubahan status menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Transformasi ini menandai langkah besar dalam memperluas ruang lingkup program akademik yang ditawarkan. Sebagai universitas, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak hanya mempelajari ilmu agama Islam, tetapi juga menawarkan program studi dalam bidang ilmu pengetahuan umum, teknologi, sosial, dan humaniora, perubahan status ini tidak hanya mengubah nama institusi, tetapi juga mengindikasikan peningkatan kapasitas akademik, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat. UIN-UIN lainnya di Indonesia juga mengikuti jejak ini, mengubah diri dari IAIN menjadi universitas yang lebih luas dalam cakupan dan pelayanan pendidikan.

Transformasi dari IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) memang telah menjadi perdebatan dan perhatian sejak lama di kalangan para pemikir dan pendidik Islam di Indonesia. Abuddin Nata menekankan bahwa pemikiran ini tidak hanya berasal dari zaman Mahmud Yunus, tetapi juga didorong oleh sejarah pendirian institusi-institusi pendidikan Islam modern di Indonesia.[33] Contoh yang mencolok adalah Universitas Islam Darul Hikmah di Bukittinggi, yang awalnya

[33] S. Bahri, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam* (Jawa Barat: Adab, 2021), hlm. 76.

didirikan sebagai Perguruan Tinggi Islam Darul Hikmah pada tahun 1953, sebelum kemudian menjadi universitas pada tahun 1957, ini menunjukkan upaya awal untuk membangun lembaga pendidikan Islam yang berfokus pada ilmu pengetahuan umum, teknologi, dan agama.

Harun Nasution, dalam pemikirannya, menyoroti bahwa IAIN (dan institusi serupa) mengalami tantangan dalam menjawab kebutuhan zaman yang semakin kompleks. Ia meyakini bahwa alumni dari lembaga semacam ini harus dilengkapi dengan keterampilan yang lebih luas dan beragam, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan kepemimpinan yang progresif dan demokratis.[34]

Gagasan untuk mengubah IAIN menjadi universitas bukan hanya tentang perubahan nama, tetapi juga tentang memperluas wawasan, perspektif, dan kapasitas institusi dalam memenuhi tuntutan zaman. Seminar-seminar dan studi banding ke luar negeri menjadi sarana penting untuk mengembangkan visi ini, memperkaya pengalaman dan pengetahuan tentang tata kelola pendidikan tinggi Islam yang relevan dan kompetitif di tingkat global.

Sejak perubahan nama banyak IAIN menjadi UIN pada tahun 2002, telah terjadi pergeseran besar dalam perspektif pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Beberapa lembaga pendidikan seperti IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, IAIN Wali Songo Semarang, IAIN Raden Fatah Palembang, dan lainnya mengalami perubahan ini.

Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, IAIN/STAIN akan ditransformasi menjadi UIN, sehingga dapat memenuhi

[34] Muhammad Iswantir, *Paradigma Lembaga Pendidikan Islam* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 83.

kebutuhan pendidikan yang relevan dengan perkembangan umat manusia dan tuntutan masyarakat. Universitas mengembangkan ilmu pengetahuan alam, sosial, humaniora, agama yang mengintegrasikan ilmu wahyu dengan ilmu nonwahyu.[35]

Ahmad Tafsir memberikan beberapa alasan yang penting mengapa IAIN harus dikembangkan menjadi UIN, pertama Islam membutuhkan pemikir yang memiliki kemampuan berpikir kritis. Banyak masalah yang dihadapi umat Islam memerlukan pendekatan yang tidak hanya berdasarkan teori-teori pengetahuan agama, tetapi juga teori-teori pengetahuan umum. Dengan mengembangkan IAIN menjadi UIN, dapat diperluas ruang lingkup pendidikan yang memungkinkan integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga lulusan dapat menjadi pemikir yang lebih komprehensif dalam memecahkan masalah-masalah kompleks.

Ilmu Agama membutuhkan pengetahuan umum untuk meningkatkan kualitasnya dan penting untuk memperdalam pemahaman melalui integrasi dengan ilmu-ilmu umum. Saat IAIN dikembangkan menjadi UIN, ini memberikan kesempatan untuk membuka berbagai fakultas dan jurusan yang tidak hanya berfokus pada bidang ilmu agama Islam, tetapi juga pada bidang ilmu umum lainnya, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemahaman dan aplikasi ilmu agama.

Meningkatkan martabat mahasiswa dan sarjana muslim, transformasi IAIN menjadi UIN juga dapat meningkatkan martabat mahasiswa dan sarjana muslim. Dengan menyediakan akses yang lebih luas terhadap ilmu pengetahuan umum dan meningkatkan keberagaman program

[35] Haidar Putra Daulay, *Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2012), hlm. 48.

studi, lulusan UIN diharapkan dapat bersaing secara global dan meningkatkan kontribusi untuk pembangunan masyarakat Islam dan umat Islam secara keseluruhan. Transformasi ini tidak hanya tentang perubahan nama, tetapi juga tentang peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi Islam untuk mengatasi tantangan zaman yang semakin kompleks dan dinamis.[36]

Abuddin Nata menjelaskan alasan di balik perubahan IAIN menjadi UIN. *Pertama*, pendidikan Madrasah Aliyah telah mengalami transformasi menjadi sekolah umum dengan nuansa agama. Ini berarti bahwa mata pelajaran umum paling banyak jika dibandingkan dengan pelajaran agama yang dahulu lebih menonjol di Madrasah Aliyah. *Kedua*, perbedaan antara pelajaran agama dan umum serta masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan ini adalah sarjana atau lulusan, mayoritas hanya bisa bekerja di Kementerian Agama, dan sebagian bekerja di kantor lain, bidang pekerjaannya tetap sama, yaitu Departemen Agama. *Ketiga*, perubahan IAIN menjadi UIN memungkinkan lulusan melakukan mobilitas vertikal, bervariasi, dan bergengsi. Hal ini terjadi karena tuntutan dan era globalisasi yang menuntut lahirnya individu yang unggul yang mampu memanfaatkan peluang dalam lingkungan yang kompetitif.[37]

Dengan transformasi UIN, masyarakat dapat mengharapkan pendidikan tinggi Islam menjadi lembaga akademis dan pusat dakwah. Selain itu, transformasi ini membuka lebih banyak peluang kerja di berbagai departemen, tidak hanya di bidang agama. Oleh karena itu, UIN dapat

[36] Ahmad Tafsir et al., *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam* (Tanpa Kota: Mimbar Pustaka, 2004), hlm. 334.
[37] Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 55.

menghasilkan lulusan yang kompetitif dan siap bekerja di berbagai industri di tingkat nasional dan internasional.[38]

Upaya untuk mengubah IAIN menjadi UIN bukanlah hal yang mudah. Selain membutuhkan keinginan yang kuat dan kesungguhan, serta kemampuan yang dimiliki oleh para pemimpin dan pengelola saat ini, juga diperlukan pertimbangan tentang kemampuan untuk mengelola, meningkatkan, dan mengembangkan institusi secara berkesinambungan.

D. Epistemologi dan Struktur Organisasi, STAIN, IAIN, serta UIN

Perguruan Tinggi Islam Negeri di Indonesia adalah lembaga pendidikan tinggi yang di bawah Departemen Agama, Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) adalah tiga jenis perguruan tinggi Islam yang ada. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam menyediakan pendidikan tinggi yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun agama Islam.

Dalam struktural kelembagaan pendidikan tinggi, perbedaan antara STAIN, IAIN, dan UIN yang mengacu pada Permen Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, sangatlah jelas.[39] STAIN, awalnya didirikan sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam, fokus utamanya adalah pada satu ilmu disiplin tertentu yang terkait erat dengan Islam, seperti studi agama Islam, hukum syariah, atau pendidikan agama. Setelah mengalami perubahan status, STAIN menjadi IAIN fokus

[38] Winarni, *Pembaruan Sistem Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia: Telaah Konversi IAIN ke UIN* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 352.

[39] Zainal Abidin, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Mutu Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen pada 3 (Tiga) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri* (Jakarta: Antasari Press, 2021), hlm. 38.

menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang sejenis, mencakup berbagai bidang studi yang lebih luas daripada STAIN. UIN melaksanakan pendidikan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu, dengan struktur lembaga yang kompleks termasuk berbagai fakultas dan jurusan.

Evolusi ini mencerminkan adaptasi dan pengembangan lembaga pendidikan tinggi Islam yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat, dengan memperhatikan peraturan. Dengan demikian, perbedaan mendasar secara struktural kelembagaan antara ketiga jenis institusi ini terletak pada cakupan dan keberagaman disiplin ilmu yang mereka kelola akan nilai-nilai Islam dalam kurikulum dan kegiatan akademiknya.[40]

E. Tantangan dan Kendala dalam Pengembangan STAIN, IAIN, dan UIN

Mujammil Qomar menjelaskan bahwa pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) menghadapi berbagai kendala politis, kultural, sosial, dan psikologis. Pada era Orde Baru di bawah rezim Soeharto, kendala politis menjadi sangat signifikan. Perubahan dari IAIN menjadi UIN sangat sulit dilakukan karena tidak ada dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk *good will*, *political will*, maupun *political power*. Perubahan ini baru bisa terealisasi pada tahun 2002, setelah rezim Orde Baru berakhir. Selain itu, PTAIN mengalami diskriminasi dalam pendanaan. Pada masa Orde Baru, dana yang dianggarkan untuk 14 IAIN di seluruh

[40] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 6 Ayat 4, 5, dan 6.

Indonesia setara dengan alokasi dana untuk satu perguruan tinggi umum negeri. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan yang signifikan dalam hal pendanaan antara perguruan tinggi umum dengan perguruan tinggi agama.

Kendala kultural berkaitan dengan pandangan masyarakat dan birokrasi terhadap institusi agama yang mungkin dianggap kurang penting dibandingkan institusi umum. Kendala sosial mencakup masalah penerimaan masyarakat terhadap lulusan PTAIN, di mana mungkin terdapat pandangan bahwa lulusan dari institusi agama memiliki keterbatasan dalam persaingan di dunia kerja dibandingkan dengan lulusan dari perguruan tinggi umum. Kendala psikologis berhubungan dengan motivasi dan kepercayaan diri dosen dan mahasiswa PTAIN. Misalnya, dosen-dosen yang melanjutkan studi pascasarjana sering merasakan ketidakadilan karena dana bantuan yang mereka peroleh lebih sedikit dibandingkan dosen di perguruan tinggi umum. Kendala-kendala tersebut menggambarkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh PTAIN dalam mengembangkan diri dan mencapai kesetaraan dengan perguruan tinggi umum, baik dari segi struktur kelembagaan, pendanaan, maupun pengakuan masyarakat dan pemerintah.[41]

PTAIN menghadapi tantangan sosial. Masyarakat Indonesia tidak siap untuk kemajuan secara psikologis, termasuk pejabat, pendidik, siswa, dan orang tua. Akademisi PTAIN adalah bagian dari masyarakat Indonesia dan mewarisi ciri-cirinya. Antara tantangan yang dihadapi PTAI adalah globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan moral. Azyumardi Azra menyatakan bahwa IAIN memiliki beberapa kelemahan, antara lain bahasa yang buruk, sistem

[41] Qomar Mujammil, *Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 102.

dan metode yang buruk, sikap ilmiah yang buruk, dan kekurangan perangkat keras.[42]

Muhaimin menyatakan bahwa transformasi perguruan tinggi negeri menjadi UIN menghadapi sejumlah masalah penting. Pada kenyataannya, kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi umat Islam masih sangat rendah dan bahkan stagnasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa alasan. *Pertama*, mungkin karena orang sering menghormati pemikiran dan kontribusi orang-orang terdahulu secara berlebihan, sehingga karya-karya yang lebih baru cenderung mengulangi atau hanya mengomentari ulang ide-ide orang-orang terdahulu. *Kedua*, para dosen cenderung menjadi dai dari pada berkonsentrasi pada pengembangan akademik dan penelitian. Akibatnya, semangat keilmuan dan dedikasi dosen dalam penelitian kurang, dan penelitian hanya dilakukan untuk memenuhi persyaratan struktural seperti kenaikan pangkat. *Ketiga*, banyaknya tanggung jawab akademik karena jumlah dosen yang terbatas atau mobilitas yang tinggi yang mengharuskan dosen untuk mengajar di beberapa perguruan tinggi. *Keempat*, mungkin tidak ada penghargaan yang cukup untuk hasil penelitian atau karya ilmiah, yang dapat mengurangi keinginan untuk membuat sesuatu yang baru.[43]

Selain hambatan eksternal yang telah disebutkan di atas, IAIN juga menghadapi masalah besar di dalamnya. Ini termasuk pengelolaan, proses perkuliahan, masalah kurikulum, kualitas dosen, serta kualitas lulusan. Hingga sekarang PTAI masih menghadapi beberapa hambatan dalam pertumbuhan lembaganya. Hambatan-hambatan ini menyulitkan upaya untuk memperbaiki kelembagaan PTAI.

[42] Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 129.
[43] Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam* (Bandung: Rosda, 2008), hlm. 72.

Akibatnya, terobosan baru diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kualitas lulusan PTAI agar mereka dapat berkontribusi dalam lebih banyak bidang keahlian.

F. Kesimpulan

Proses perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) dimulai pada tahun 2002 dengan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai pionir. Rencana tersebut diinisiasi oleh pendiri IAIN untuk memberikan pendidikan yang lebih komprehensif dalam bidang keislaman dan humaniora. Perubahan ini juga melibatkan restrukturisasi kurikulum dan penghapusan beberapa jurusan yang tidak relevan. Pada tahun 1973, terdapat 14 IAIN di seluruh Indonesia dengan cabang-cabang fakultas yang berdiri di berbagai wilayah untuk memenuhi kebutuhan lokal.

Transformasi ini bertujuan untuk menghindari duplikasi fakultas dan memberikan lebih banyak kebebasan bagi fakultas-fakultas untuk berkembang. Beberapa STAIN kemudian diubah menjadi IAIN dan beberapa IAIN menjadi UIN. Gagasan perubahan ini didorong oleh kebutuhan zaman yang menuntut kemampuan yang lebih luas seperti penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan inovasi. Sejak tahun 2002, beberapa IAIN telah berubah menjadi UIN berdasarkan keputusan presiden. Alasan utama perubahan ini adalah untuk mengintegrasikan elemen keilmuan umum dengan ilmu agama, menghilangkan dikotomi antara ilmu umum dan agama serta menghasilkan lulusan yang kompetitif, serta siap bekerja di berbagai industri. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan martabat sarjana dan mahasiswa muslim serta memenuhi tuntutan

globalisasi yang memerlukan individu yang unggul dan adaptif.

G. Daftar Pustaka

Abidin, Zainal. 2021. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Mutu Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen*. Jakarta: Antasari Press.

Azra, Azyumardi. 1999. *Konteks Berteologi di Indonesia*. (Jakarta: Paramadina).

Bagir, Zainal Abidin. 2005. *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi*. Jakarta: Mizan Pustaka.

Bahri, S. 2021. *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Jawa Barat: Adab.

Daulay, Daulay, Haidar Putra. 2007. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

_____. 2012. *Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing.

_____. 2012. *Pendidikan Islam dalam Pendidikan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Press.

Haidar Putra. 2015. *Dinamika Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia*. Medan: IAIN Press.

Iswantir, Muhammad. 2019. *Paradigma Lembaga Pendidikan Islam.* Jakarta: Anugrah Utama Raharja.

Muhaimin. 2008. *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: Rosda.

Nata, H. Abuddin. 2012. *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesi*a. Jakarta: Kencana.

Qomar, Mujammil. 2007. *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga.

Syukri, Ahmad et al. 2021. *Transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)*. Yogyakarta: K-Media.

Tafsir, Ahmad et al. 2004. *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Mimbar Pustaka.

Wahab, Wahid. 1960. *Peraturan Menteri Agama No. 15 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Institut Agama Islam Negeri.* Jakarta.

Wahyuningrum, Sri Rizqi et al. 2024. *Tridarma Perguruan Tinggi (Teori dan Praktik*). Madura: IAIN Madura Press.

Winarni. 2013. *Pembaruan Sistem Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia: Telaah Konversi IAIN ke UIN*. Jakarta: Kencana.

Sumber Lain:

Arsyad, J. Mayurida M. dan G. Gunawan. 2022. "Pertumbuhan Institusi Pendidikan Islam di Era Modern Kajian terhadap Madrasah, Sekolah, dan Perguruan Tinggi di Indonesia. *Edu-Riligia: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan*.

Hadi, Alya *Fatma* et al. 2023. "Strategi Organisasi Pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah dalam Menghadapi Tantangan Global". *Protasis: Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, dan Pengajarannya*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 6 ayat 4, 5, dan 6.

Salahuddin, Marwan. Tanpa Tahun. "Model Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia". *Jurnal Ulumuna* diakses melalui tautan https://ulumuna.or.id/index.php/ujis/article/view/256.

Sulistyaningrum, Ajeng et al. 2024. “Perubahan IAI Sunan Giri Bojonegoro Menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro”. *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*.

Zaenuri, Ahmad. 2018. “Transformasi Kelembagaan Perguruan Tinggi Agama Islam dan Pengaruhnya Terhadap Manajemen Kelembagaan. Transformasi”. *Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam* diakses melalui tautan http://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/312.

Bab 3
Berguru Islam ke Barat
(Proses Pelaksanaan serta Pro dan Kontra dalam Sebuah Gagasan)

Muhib Ali Hasan Ristia

A. Pendahuluan

Kegelisahan dan kegundahan para cendikiawan muslim Indonesia semakin berkecamuk setelah melihat realitas di negerinya yang mana masih tertinggal jauh dalam segi peradaban dan keilmuan. Ketertinggalan ini menyebabkan ketidakstabilan tatanan sosial dan keterbelakangan cara berpikir masyarakat secara umum. Pelbagai upaya dilakukan agar keadaan nyata tersebut bisa berubah di mulai dari upaya memperbaiki sistem pendidikan dan kebudayaan melalui institusi pendidikan baik dimulai dari tingkat yang paling dasar seperti sekolah sampai dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

Langkah tersebut berusaha didialogkan oleh segenap para sarjana dan cendikiawan dengan pemerintah Indonesia yang pada akhirnya pihak pemerintah memberikan angin segar dengan memberikan bantuan materi berupa beasiswa untuk studi ke Barat bagi para cendikiawan muslim yang sudi berjuang dengan lahan perjuangan tersebut. Oleh sebab itu, keinginan dan cita-cita kuat untuk mengubah keadaan tersebut terlihat dari upaya para cendikiawan muslim yang

rela sudah payah belajar dan menimba ilmu ke Barat tentang bagaimana cara belajar orang barat dalam memahami Islam.

Impian merupakan kekuatan jiwa yang kreatif tetapi berbentuk jiwa abstrak. Hal ini perlu dipelajari lebih mendalam, termasuk rangkaian ilmu pengetahuan yang menjadi pendukung terwujudnya impian tersebut. Metode yang dilakukan oleh orang Barat dalam mempelajari sebuah konsen keilmuan serta cara berpikir kritis inilah yang akan dipelajari oleh para cendikiawan muslim Indonesia. Dari hal itu, harapan terbesar dari pihak pelaksana misi mulia tersebut dengan pihak pemerintah agar kiranya dapat mengubah iklim peradaban keilmuan serta iklim belajar peserta didik dan mahasiswa Indonesia menuju yang lebih baik.

B. Motivasi para Cendikiawan Muslim Indonesia untuk Berguru Islam ke Barat

Konsentrasi pada pembahasan ini, bukan para cendikiawan muslim mempelajari Islam secara totalitas dari bangsa Barat. Tentu saja tidak. Yang dimaksud belajar Islam ke Barat ini adalah para cendikiawan sebenarnya sudah kafah dalam mempelajari Islam, tetapi terdapat keinginan untuk membuka cakrawala baru bagaimana sebenarnya orang Barat dalam memahami Islam. Jika dalam sisi ini orang Islam memahami yang sebenarnya bagaimana orang barat dalam memahami Islam, maka diharapkan orang Islam di Indonesia juga mempunyai semangat yang besar dalam mempelajari Islam itu sendiri. Bahkan dapat membuka paradigma berpikir yang luar biasa dalam hal keilmuan dan tidak primitif dengan merasa jemawa cara berpikir lokal yang mana mereka nonmuslim saja sudah berpikir secara global bahkan

internasional.[44] Hikmah inilah yang menjadi tujuan utama adanya pembahasan terkait. Untuk itu, dibutuhkan kepercayaan diri, inisiatif, dan jiwa pemimpin di mana ketiga hal tersebut pada awalnya dibangun berdasarkan impian-impian yang berperan sebagai kekuatan sugesti.[45]

Dalam paradigma historis, model pendidikan yang ada di Indonesia khususnya pada tahap perguruan tinggi terdapat pengaruh beberapa model pemikiran yang semuanya sebetulnya baik dan memberikan dampak positif. Mulanya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau disingkat dengan PTKI di Indonesia terdapat tiga model pendidikan. *Pertama*, model pendidikan yang diadopsi dari Timur Tengah. Upaya dalam mengonstruk beberapa fakultas di Institut Agama Islam Negeri atau sering disingkat dengan IAIN seperti contoh Fakultas Ushuluddin, model seperti ini diadopsi dari Fakultas Syariah dan Adab dari Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Bahkan dalam sistem ujiannya pun dikoneksikan dengan al-Azhar.

Adapun salah satu faktor penyebab dilakukannya meniru model tersebut terdapat beberapa alasan yang salah satunya adalah banyaknya *mutakhorijin* atau alumnus al-Azhar yang menempati peranan esensial di Kementerian Agama yang pada saat itu, dan alumnus tersebut ikut berperan aktif serta dalam mengonstruk berdirinya PTKI. Inilah alasan kuat yang melatarbelakangi pengaplikasian model pembelajaran tersebut.[46]

---

[44] Asep Maulana Rohimat, *Metodologi Studi Islam: Memahami Islam Rahmatan Lil'alamin* (Tanpa Kota: Tanpa Penerbit, 2018).

[45] M. Hari Wijaya, *The Power of Dream* (Tanpa Kota: Platinum, 2013), hlm. 3.

[46] Abdul Zebar dkk., "Studying Islam to the West and Developing Islamic Religious Colleges in Indonesia", *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, diakses melalui tautan http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis.

Kedua, model pendidikan konvensional lokal. Umat Islam pada saat itu menginginkan agar kebutuhan terhadap pengajar agama berupa seorang ustaz dan guru ngaji serta seorang dai sangatlah besar. Dari hal itulah mulai dilegalkan Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Dakwah yang orientasinya untuk mencetak para pendakwah Islam yang berkompeten di tengah kehidupan masyarakat muslim Indonesia.

Ketiga, model pembelajaran dan pendidikan yang bermodelkan Barat. Model demikian memiliki ciri utama yaitu menitiberatkan sistem kredit SKS yang wajib dilaksanakan oleh segenap mahasiswa dalam waktu yang sudah ditentukan.[47] Tujuannya adalah untuk memudahkan para mahasiswa untuk lebih konsentrasi dan fokus dalam mempelajari materi perkuliahan serta membentuk pemetaan cara berpikir yang lebih konkret. Terbukti sampai saat ini sistem tersebut masih tetap eksis dan memberikan dampak yang positif baik bagi mahasiswa maupun perguruan tinggi. Beberapa poin di atas adalah bentuk suatu upaya untuk mendobrak inovasi dalam dunia pendidikan. Tujuan inovasi pendidikan yaitu meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas dan efektivitas sarana, serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya.[48]

Diakui atau tidak, pengaruh yang membawa nada positif dari pembelajaran bangsa Barat terhadap atmosfir dan iklim PTKI. Selain dari model pendidikan, ternyata hal yang dirasakan juga sangat beragam tetapi sangat nyata. Di Mesir, ide-ide peng-*upgrade*-an berlaku sejak abad ke-19 sampai dengan abad ke-20 pada dunia umat Islam, tepatnya setelah

[47] N. Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017).

[48] Amos Neolaka and Grace Amalia A, *Landasan Pendidikan: Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 381.

adanya upaya kolaborasi yang dimulai dengan interaksi budaya belajar Islam dengan budaya belajar Barat.

Indonesia yang notabenenya negara berpenduduk mayoritas beragama Islam juga dapat merasakan dengan nikmat ombak kepositifan yang mayoritas umat Islam menilai baik dan menerima dari model ide brilian seputar pembaruan yang dilakukan tersebut.[49] Pembaruan ini menjadi angin segar dalam membuka cakrawala baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dari hal tersebut, mulailah bermunculan beberapa paradigma tentang langkah mengintegrasikan keilmuan yang pada akhirnya bersahabat dengan momentumnya yang sangat tepat, yaitu pada konferensi Islam yang topik utamanya adalah seputar iklim persahabatan dan yang paling dominan adalah tentang pendidikan sedunia bertempat di Makkah al-Mukarromah pada tahun 1977.[50]

Setelah masa kembalinya para *mutakhorrijin* yang dibelajarkan oleh pemerintah yang dalam hal ini wewenangnya diamanatkan pada Kementerian Agama dari luar negeri atau bahasa lainnya para dosen yang diberikan beasiswa memberikan pandangan baru yang *fresh*. Dampaknya, desisan ide pembaruan pun ini semakin seru bersuara di ranah PTKI.

Memiliki intelektual berkompetensi tinggi yang berbasis keislaman secara kafah serta memegang teguh kebudayaan dengan erat adalah cita-cita yang nyata bagi PTKI. Terdapat beberapa hal yang mendasar bagi terlahirnya PTKI. *Pertama*, ketertinggalan jauh dalam hal pendidikan dan kebudayaan adalah kesadaran yang nyata bagi bangsa Indonesia. Fakta tersebut tidak dapat terbantahkan. *Kedua*, menyadari bahwa

[49] D. Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1980).
[50] H. Asari, *Modernisasi Islam; Tokoh, Gagasan, dan Gerakan* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007).

masyarakat nonmuslim maju karena mereka terbuka dan menyambut baik untuk meniru dan merealisasikan metode belajar dan pembelajaran dari bangsa Barat di dalam konstruksi pendidikan golongan mereka. *Ketiga*, esensialaitas relasi dengan dunia internasional yang tujuannya adalah mengomparasikan sistem pendidikan Islam yang ada di Indonesia agar supaya lebih baik dan terbuka*. Keempat*, penting untuk diperhatikan dalam pendidikan Islam pada model pendidikan unsur lokal.[51]

Pada perkembangan dan eksistensinya khususnya di negara Mesir dan negara Arab Saudi yang dipimpin oleh Raja Ibnu Saud dan generasinya, studi Islam atau sering disebut dengan Islamic Study di dalam PTKI tidak mampu bahkan tidak bisa dipatahkan dari dalam kerangka studi Islam yang menyebar di banyak seantero hamparan dunia Islam, saat itu studi masih terfokus pada keilmuan Islam tradisional yaitu *ushul fiqh*, fikih, hadis, *ulumul hadist*, tafsir (interpretasi al-Qur'an), *ulumu attafsir*, *ulumul kalam* (teologi Islam), dan *lughoh* Arab.

Oleh karena itu, menurut salah satu cendikiawan muslim Azyumardi Azra pada kurun waktu dasawarsa (sepuluh tahun) permulaan perkembangan pada PTKI model kajian Islam memiliki tiga corak paradigma pokok. *Pertama*, bersifat *normative idealistic*, orientasi pada sektarianisme mazhab, khususnya Mazhab Syafi'i dan kalam Asy'ari. *Kedua*, kiblat keilmuan ke Timur Tengah: terpencil dari wacana keilmuan yang luas.[52] Selain dari pada hal itu, terdapat tiga model metodologi yang tergolong konvensional atau lama yang

[51] Fanani, *Jurnal Studi Keislaman Ulumuna* Volume XI Nomor 1 (Juni 2007).

[52] Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999).

lestari pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) sebelum sekitar tahun 1970-an.[53]

Pertama, metodologi *research interpretation* yang berkorelasi dengan beberapa tema terkini terkodivikasikan dalam pembahasan ulumul Qur'an. *Kedua*, metodologi *research hadist* yang terkomparasikan dalam Ilmu Musthalah al-Hadis atau suatu cabang keilmuan yang membahas tentang disiplin ilmu hadis*. Ketiga*, ilmu *ushul fiqh* atau ilmu yang membahas tentang konstruksi ilmu fikih. Ketiga metodologi ini berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan yang pada saat itu masih belum berkembang pesat dikarenakan hanya menyentralisasikan pada eksistensi ilmu bayani, yaitu orientasi Islamic Study yang berbasis tekstualisasi dengan menggunakan kerangka berpikir deduktif-analogis. Keadaan semacam ini menjadikan proses pendidikan di PTKI hanya sebagai perpanjangan tangan dari materi pembelajaran dari pondok pesantren. Akhirnya menjadikan alumni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) kurang diterima di tengah masyarakat umum. Dari fakta tersebut, maka tergeraklah pemikiran serta keinginan untuk menempuh inovasi pendidikan Islam yang nilainya secara universal.

Kemajuan serta perkembangan tersebut secara kontras terjadi dengan evolusi di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada dasawarsa (sepuluh tahunan) tepatnya tahun 1970-an, dengan disinyalir dari beberapa faktor. *Pertama*, di negara-negara berkembang, mereka berasumsi perlunya pembaruan atas efek dari masuknya modernisasi dari negara Barat. Kegiatan ini pun diaktualisasikan dan difasilitasi oleh pemerintahan masa orde baru dengan cara membentuk

[53] M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

persekutuan atau koalisi dalam bidang militer dan bidang teknokrat yang dalam hal ini melibatkan perubahan hasil dari didikan Barat.

Kedua, diserapnya cara serta mengadopsi dari strategi pendayagunaan serta pembangunan yang beraplikasi dan bertumpu pada dua kaki, yaitu pembangunan dalam bidang pertanian untuk tercapainya swasembada pangan yang dipersiapkan sebagai penjaga stabilitas ekonomi-politik serta pada pijakan kaki yang lain berkorelasi pada industrialisasi sebagai salah satu langkah untuk pemenuhan kebutuhan rakyat secara umum melalui orientasi industrial dalam negeri, ataupun melalui proses kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh segenap eksportir dan importir.[54]

Pada dimensi eksistensi yang lainnya, munculnya kelompok gerakan para pembaruan dalam bidang keilmuan dan cendikiawan seperti Nurcholish Madjid dan kawan-kawan, nyatanya Mukti Ali yang bertindak sebagai Menteri Agama dan Harun Nasution bertindak sebagai Rektor IAIN Jakarta, mereka berdua mendukung terjadinya inovasi dalam keilmuan dan kajian pendidikan Islam.[55] Signifikansi pada kajian-kajian Islam di PTKI yang pada masa sebelumnya bentuk dan model keilmuannya berorientasi serta cenderung ke arah pemikiran Timur Tengah, spesifikasinya kampus Universitas al-Azhar berkembang ke spektrum yang lebih lebar.

Kemunculan pendekatan dan model pendidikan barat inilah menurut Azyurmardi Azra mulai tubuh subur salah satunya dengan faktor para dosen yang mendapatkan kepercayaan untuk mengenyam pendidikan di Barat dengan jalur beasiswa. Sejumlah pendekatan itu bertemu momentum

[54] M. D. Rahardjo*, Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa* (Bandung: Mizan, 1996).
[55] Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999).

yang sangat fantastik dengan sebab berpulangnya alumni universitas Barat untuk mengajar di IAIN. Ini adalah suatu revolusi pemikiran yang sangat baik dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia.

Menurut Muhammad Atho Mudzhar dalam bukunya *Belajar Islam di Amerika* yang dikutip oleh Najmu Hayati[56] terdapat hal yang memotivasi para dewan dosen PTKI untuk bersedia mempelajari Islam ke negeri Barat. *Pertama*, secara historis para dosen yang dikirim diberikan beasiswa unik studi di negara Barat tidak untuk mempelajari ajaran Islam dari personal Barat, tetapi untuk mempelajari ajaran Islam dengan metode paradigma Barat. Walaupun diakui bahwa memang terdapat rasa sentimental orientalis terhadap kelompok Islam dan agama Islam, sejatinya tidak semua kaum orientalis memiliki paradigma yang kontroversi seperti itu.

Kedua, secara faktual orang bangsa Barat memiliki tradisi keilmuan yang lebih universal dibandingkan dengan mayoritas umat Islam. Bangsa Barat sangat menjunjung tinggi eksistensi naskah lama serta manuskrip zaman terdahulu dan kuno, perbendaharaan referensi pada perpustakaan yang lengkap dan penuh dengan sikap kritis yang parut di acungi jempol.

Ketiga, tidak selamanya buku bacaan mereka adalah karangan para kaum orientalis, justru mayoritas buku yang mereka baca adalah buku yang notabenenya berbahasa Arabi dan berbahasa Inggris yang semuanya dikarang dan diabadikan oleh ulama Islam.

Keempat, terealisasinya program beasiswa dini adalah sebuah fasilitas sekaligus upaya yang cemerlang dari pemerintah yang memberikan kesempatan untuk para dosen belajar Islam di Barat tepatnya di negara Amerika. Tentunya

[56] *Proseding Gerakan Islam Merespons Isu Kontemporer* (IAIN Imam Bonjol Padang, 2010).

beasiswa itu dapat sangat membantu proses penggalian pemahaman dari segenap dosen yang dikirim atas paradigma Barat kepada dunia Islam.

Hal tersebut berawal dari pemikiran A. Mukti Ali yang dikenal sebagai pioner perubahan arah PTKI dari model pendidikan Timur Tengah ke model pendidikan Barat. Sesuatu yang paling berkesan adalah dengan bagaimana studi Islam di Barat diajarkan secara sistematis dan terstruktur. Mulai saat itu juga banyak sekali dari kalangan dosen PTKI yang termotivasi untuk melanjutkan studi dan kuliah ke Barat untuk mempelajari Islam dari paradigma dan khazanah keilmuan Barat di berbagai jelajah universitas yang ada di Eropa maupun jelajah universitas yang ada di Amerika.

Pada saat itu, Mukti Ali menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 1971–1978, dalam upayanya sebagai fasilitator mahasiswa yang berkeinginan untuk mengikuti jejaknya, ia banyak merekomendasikan serta memberangkatkan para dosen PTAI IAIN untuk belajar ke negeri Barat. Seperti itu dapat diambil kesimpulan bahwa Ali Mukti sendiri menyandang gelar akademik dengan gelar M.A. dari McGill University di Kanada. Pengenalan pada Islamic Study di Barat membentuk studi Islam di PTKI mengalami pencerahan dan kemajuan yang sangat pesat, yang paling kontras adalah dari paradigma metodologi dan pendekatannya dalam sebuah keilmuan.

Studi keislaman atau *Islamic studies* yang dikenal sebatas keilmuan yang bernuansa kuno dengan metodologinya yang jadul, akhirnya berbenah untuk berubah menjadi lebih luas dan lebih komprehensif dengan penggunaan rangkaian disiplin ilmu sosial kemasyarakatan yang bersifat humaniora. Sinergitas antara PTKI dengan beberapa lembaga pendidikan

Barat membuka banyak celah bagi para pegiat kajian Islam untuk agar supaya Islam menjadi santun dan bersahaja di mata dunia serta menjadi Islam yang lebih bersifat metodologis dan historis dalam setiap langkah pengkajiannya.

Pada umumnya, kajian tentang Islam diajarkan oleh tokoh-tokoh orientalis yang ahli di bidang ilmu ketimuran atau bahkan ahli tentang agama Islam secara mendalam, walaupun secara realitas mereka tidak memeluk agama Islam. Alumni universitas Barat yang mengambil Studi Pengkajian Islam (Islamic Studies) tersebut kemudian kembali ke tanah air dengan mengembangkan ilmu yang diperolehnya dan diajarkan di berbagai universitas atau institut yang ada di Indonesia. Pada umumnya kajian Islam (Islamic Studies/Dirasah Islamiyah) lebih banyak dilakukan di IAIN karena sebagian dosennya adalah alumni dari universitas di Barat, seperti Universitas Mc Gill Kanada, Universitas Sorbone Prancis, Universitas Leiden Belanda, Universitas California Amerika Serikat, Universitas Chicago Amerika Serikat, dan sebagainya.[57]

C. Pro-Kontra terhadap Program Pengiriman Dosen Beasiswa ke Barat

Apa pun dan bagaimanapun yang dilakukan seseorang di dunia ini pasti memiliki sisi pro dan kontra. Begitu pula dengan program mulia yang dilakukan oleh para pejuang kemajuan pendidikan Islam Indonesia ini. Para tokoh yang pro beranggapan bahwa selama ini pengembangan keilmuan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) cenderung sektarisme mazhab tertentu yang mengakibatkan cara

[57] Abdul Zebar dkk., "Studying Islam to the West and Developing Islamic Religious Colleges in Indonesia", *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, diakses melalui tautan http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis.

berpikir yang kurang komprehensif. Seakan dalam peribahasa "bagai katak dalam tempurung", merasa hebat tiada tanding tetapi setelah tabir tersibak maka ternyata dunia ini sangat luas tiada ujungnya. Oleh sebab itu, pemikiran yang kontinu dan tanpa lelah dilakukan oleh Mukti Ali dan teman-temannya guna menumbuhkan cara berpikir yang ideal agar tercipta suasana keilmuan yang komprehensif.[58]

Cara berpikiran yang dibangun oleh pihak yang pro adalah perlunya langkah memperluas cakrawala pengembangan keilmuan yang awalnya terkungkung dan terbatas. Secara kelembagaan pada awalnya bentuk sekolah tinggi dengan nama Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTAIN) yang kemudian dikembangkan menjadi institut dengan nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Cakupan ilmu lebih luas di IAIN daripada PTAIN. Selanjutnya, perkembangan pemikiran tentang ide dan gagasan integrasi ilmu antara ilmu-ilmu kewahyuan dan nonkewahyuan (*perennial knowledge* dan *acquired knowledge*) melahirkan Universitas Islam Negeri (UIN)[59]. Keinginan yang kuat untuk berubah menuju yang lebih baik inilah yang menjadi landasan berpikir untuk mengirimkan personal dosen-dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) belajar menimba ilmu pengetahuan ke Barat agar cakupan keilmuan mereka lebih universal.

Terdapat paradigma pesimistis di tengah para pengamat pendidikan bahwa, secara visual sepertinya para cendikiawan muslim dan secara mayoritas para pendidik Islam masih berkutat dengan kesibukan atas pribadi Islam sendiri. Malahan secara sadar ataupun tidak bahwa kemajuan dalam

[58] Al-Makin dkk., *70 Tahun M. Amin Abdulloh; Pemikir Guru dan Pemimpin* (Yogyakarta: Laskbang Akademika, 2023), hlm. 20.

[59] A. Daulay dan Ja'far. *Falsafah Pendidikan Islami; Menguak Nilai-Nilai Pendidikan dalam Tradisi Islam* (Medan: Perdana Publishing, 2016).

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berjalan secara progresif dipandang bukan merupakan sumbangan perguruan tinggi Islam, melainkan produk karya perguruan tinggi yang tidak membawa-bawa level Islam.

Perguruan tinggi Islam, khususnya di Indonesia, masih sibuk mengurus pengembangan ilmu-ilmu keagamaan, seperti ushuluddin, ilmu syariah, ilmu tarbiyah, ilmu adab, dan ilmu dakwah yang membuat Islam dipandang sebagai agama yang sempit dan tertinggal dalam perkembangan pemikiran. Bahkan tidak jarang yang dalam prosesnya hanya memikirkan bidang kosmologi Islam, seperti surga, neraka, pahala, dan lain-lain, sementara metodologi yang digunakan pun masih terbatas dan terkesan jadul. Oleh karena itulah metodologi dan ragam perspektif untuk mengkaji Islam pun dibutuhkan metode secara komprehensif. Makanya perlu diutus dosen-dosen untuk belajar ke negara-negara yang mengkaji Islam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih universal.

Selain itu, dalam tradisi intelektual Islam di masa lampau bahwa Islam tidak mengenal dikotomi ilmu dan pengetahuan. Ilmu itu ibarat hikmah yang bisa diambil dari mana saja, bahkan terdapat *qoul hikmah* bahwa ilmu dan hikmah dapat dipungut dari seekor anjing jalanan.[60] Betapa Islam sebenarnya sangat menjunjung tinggi eksistensi ilmu dan hikmah. Hal ini baru disadari oleh umat Islam sejak munculnya pembaruan pemikiran Islam di Timur Tengah seperti yang digagas oleh Muhammad Ali Pasha, al-Tahtawi, Jamal al-Din al-Afghani, dan Muhammad Abduh.[61]

Pembaruan di daerah Mesir berpengaruh bagi segenap mahasiswa Islam Indonesia untuk juga mendalami

[60] Fuad Mahbub Siraj, "Islam dan Rasionalitas dalam Pemikiran M. Natsir", *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid* (2019) hlm. 1–18.
[61] H. Asari, *Modernisasi Islam; Tokoh, Gagasan, dan Gerakan* (Bandung: Citapusta Media, 2007).

sebagaimana proses pembelajaran di Barat. Ide, gagasan, dan pemikiran untuk mendirikan perguruan tinggi di kalangan umat Islam yang telah muncul pada tahun 1930-an baru bisa dikembangkan menjadi IAIN pada tahun 1960 dan baru muncul UIN pada tahun 2000-an. Inilah realitas yang ada pada perkembangan pendidikan perguruan tinggi Indonesia yang mempunyai efek baik bagi para pelajar Islam Indonesia.

Pengiriman para dosen ke negara-negara Barat menjadi pilihan bagi perubahan kebijakan di PTAI IAIN demi kepentingan dalam jangka panjang. Sebagian besar dari nama-nama yang tersebut di atas menduduki peran esensial dalam perkembangan orientasi studi Islam di lingkungan IAIN.[62] Hal ini bisa dikatakan dengan langkah progresif yang membanggakan bagi dunia pendidikan Islam Indonesia. Suatu lompatan langkah yang cukup berani dari pemerintah Indonesia yang dipelopori oleh Mukti Ali yang secara nyata banyak hambatan dan rintangan yang salah satunya adanya klan pro dan kontra dalam kebijakan tersebut. Tidak mengherankan apabila pada masa-masa selanjutnya, pengaruh studi Islam di Barat sangat kontras terasa, khususnya di program magister maupun program doktor. Secara kelembagaan Harun Nasution adalah pelopor kajian Islam dengan menggunakan metodologi Barat di IAIN.

Klan yang kontra beranggapan bahwa belajar Islam ke Barat akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Ini terlihat dari nada sumbang tentang pendekatan model Barat yang dicurigai sebagai menerapkan pendekatan orientalis dalam mengkaji Islam. Selain itu, kritik pengiriman para dosen IAIN ke luar negeri, khususnya ke perguruan- perguruan tinggi di

[62] Ahwan Fanani, "Orientalisme, Liberalisme Islam, dan Pengembangan Studi Islam di IAIN", *Ulumuna* (2007), hlm. 93–120.

Barat, dianggap sebagai salah satu biang keladi menjamurnya gagasan-gagasan menyimpang yang bermunculan di PTKI.

Salah satu tokoh pendidikan yang bernama Hartono Ahmad Jaiz bahkan secara terang-terangan beranggapan bahwa pengiriman mahasiswa/dosen ke Barat ikut bertanggung jawab terhadap proses pemurtadan di beberapa IAIN. Hal ini tampak kurang yakinnya sebagian orang akan kebijakan tersebut sehingga memunculkan paradigma pesimistis. Pengaruh seperti ini menurut kaum fundamentalis melahirkan umat Islam yang dikategorikan "liberal". Dalam konteks tersebut, IAIN menjadi tempat berkembangnya liberalisme dalam beragama. Hal itu sebagai konsekuensi PTKI yang menempatkan agama sebagai objek ilmu sehingga hal-hal yang sakral mengalami proses desakralisasi. Itulah konsekuensi logis upaya memajukan PTAI sebagai lembaga keilmuan dan intelektual. Kaum liberal mendapatkan habitat yang tepat di PTAI. Para pengambil kebijakan di IAIN pun tampaknya tidak menolak kecenderungan kajian-kajian Islam yang menggunakan pendekatan-pendekatan baru tersebut dan lebih melihat itu sebagai dinamika serta proses pendewasaan pemikiran.

D. Kesimpulan

Program pengiriman dosen ke Barat adalah bermula dari adanya kegelisahan atas fakta yang terjadi bahwa kualitas pendidikan perguruan tinggi serta kebudayaan bangsa Indonesia yang tertinggal jauh dengan bangsa lain khususnya dengan bangsa barat. Cita-cita serta ekspektasi para cendikiawan musim Indonesia untuk memajukan dalam hal pendidikan sangat kuat. Upaya yang mereka lakukan adalah salah satunya dengan membuat kebijakan untuk mengirimkan

dosen yang bersedia untuk sudi mengikuti program tersebut. Tujuan utamanya adalah agar ada inovasi baru dalam dunia pendidikan dan kebudayaan Indonesia dalam memajukannya. Walaupun dalam cita-cita luhur tersebut tidak sedikit hambatan dan halangan. Terdapat pro dan kontra dalam hal ini, tetapi pada akhirnya elemen masyarakat pendidikan dapat merasakan perubahan yang signifikan terhadap kebijakan tersebut yang berimbas pada kemajuan pendidikan dan kebudayaan serta iklim pendidikan yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya, di dalam Islam tidak ada istilah dikotomi dalam ranah ilmu pengetahuan. Hal inilah yang menjadi tolok ukur utama bagi para cendikiawan muslim Indonesia dalam mengambil langkah mulia tersebut.

E. Daftar Pustaka

A. Daulay & Ja'far. 2016. *Falsafah Pendidikan Islami; Menguak Nilai-Nilai Pendidikan dalam Tradisi Islam*. Medan: Perdana Publishing.

Al-Makin dkk. 2023. *70 Tahun M. Amin Abdulloh; Pemikir Guru dan Pemimpin*. Yogyakarta: Laskbang Akademika.

Amos & Grace Amalia A. 2017. *Landasan Pendidikan: Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*. Depok: Kencana.

Asari, H. 2007. *Modernisasi Islam; Tokoh, Gagasan, dan Gerakan*. Bandung: Cita Pustaka Media.

Azra, Azyumardi. *1999. Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Wacana Ilmu.

Huda, N. 2017. *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Husaini, Ah dkk. 2006. *Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Gema Insani.

Mudzhar, M. Atho'. 2002. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Neolaka, Noer, D. 1980. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Rahardjo, M. D. 1996. *Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa*. Bandung: Mizan.

Rohimat, Asep Maulana. 2018. *Metodologi Studi Islam: Memahami Islam Rahmatan Lil'alamin*. Tanpa Penerbit: Tanpa Tahun.

Wijaya, M. H. 2013. *The Power of Dream*. Tanpa Kota: Platinum.

Sumber Lain:

Fanani, Ahwan. 2007. "Orientalisme, Liberalisme Islam, dan Pengembangan Studi Islam di IAIN". *Ulumuna*.

Fanani. 2007. *Jurnal Studi Keislaman Ulumuna;* Volume XI Nomor 1 Juni.

Proseding Gerakan Islam Merespon Isu Kontemporer. 2010. IAIN Imam Bonjol Padang.

Siraj, Fuad Mahbub. 2019. "Islam dan Rasionalitas dalam Pemikiran M. Natsir". *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*.

Zebar, Abdul dkk. 2012. "Studying Islam to the West and Developing Islamic Religious Colleges in Indonesia". *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, diakses melalui tautan http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis.

Bab 4
Jaringan Timur Tengah Ulama Nusantara

Afiful Ihwan

A. Pendahuluan

Islam yang ada di bumi nusantara merupakan cikal bakal terbentuknya jaringan ulama timur tengah dengan ulama Nusantara, perihal tersebut merupakan bagian dari sejarah masuknya Islam di Indonesia yang tentunya memerlukan banyak kajian dari berbagai sumber yang berkaitan.[63] Terdapat diskusi dan perdebatan panjang di antara para ahli mengenai tiga masalah yaitu tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Berbagai teori dan pembahasan yang berusaha menjawab ketiga masalah pokok ini jelas belum tuntas, tidak hanya kurangnya data yang dapat mendukung suatu teori yang ada. Namun terdapat kecenderungan kuat, suatu teori tertentu untuk menekankan terhadap aspek-aspek khusus dari ketiga masalah pokok, sementara mengabaikan aspek-aspek lainnya.[64]

Jaringan Timur Tengah Ulama Nusantara abad ke-17, dua dari tiga mata rantai utama dari jaringan ulama di wilayah Melayu Indonesia, yaitu yang berasal dari al-Raniri dan al-Sinkili, berkembang di Kesultanan Aceh, sementara perintis lain, al-Maqassari, bergerak di Sulawesi dan memulai

[63] Margo Sampurno, "Nahdlatul Turats: Gerakan Filologi Islam dalam Melacak Jaringan Keilmuan Ulama Nusantara", *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* (2024), hlm. 15–28.

[64] Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah & Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, *Akar Pembaruan Islam Indonesia* (Depok: Prenadamedia Group, 2018). hlm. 4.

kariernya di Banten, Jawa Barat (sekarang, Banten menjadi provinsi sendiri, terpisah dari Provinsi Jawa Barat).[65] Al-Raniri memiliki hubungan dengan inti jaringan di Haramayn. Al-Sinkil melampaui al-Raniri dalam hal tersebut ia mempunyai banyak rantai langsung dan kukuh yang terhubung dengan para tokoh utama dari jaringan ulama.

Pada abad ke-18, jaringan ulama Melayu Indonesia berasal dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Di antara para ulama tersebut turut hadir Syihab al-Din bin Abdallah Muhammad, Kemas Fakhr Als Din, Abd. al-Shamad al-Palimbani, Kemas Muhammad bin Ahmad, dan Muhammad Muhyi al-Din bin Syihab al-Din. Selanjutnya adalah Muhammad Arsyad al-Banjari dan Muhammad Nafis al-Banjari dari Kalimantan Selatan Abd al-Wahhab al-Bugisi dari Sulawesi Abd al-Rahman al-Mashri al-Batawi dari Batavia, dan Dawud bin Abd al-Lah al-Fatani dari wilayah Patani (Thailand Selatan). Meski informasi ajaran yang dipelajari menjelaskan bahwa para ulama tersebut terlibat baik secara sosial maupun intelektual dalam jaringan ulama. Jika digabungkan, mereka mengenai sebagian di antara para ulama ini sangat minim, karier dan merupakan para ulama paling penting di Nusantara pada abad ke-18.[66]

Selanjutnya pada abad ke-19 para Ulama Jawi yang berada di Makkah dan Madinah memperluas jaringan ulama sampai ke Kairo. Awal mula kehadiran Komunitas Jawi di Kairo tercatat melalui jaringan Timur Tengah, para ulama memainkan peranan penting dalam membuat Islam di Hindia Belanda menjadi bagian dari Islam internasional. Dalam kaitan ini, peredaran luas buku-buku agama di pesantren merupakan

[65] *Ibid*., hlm. 205.
[66] Kholis Tohir, *Model Pendidikan Pesantren Salafi* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020). hlm. 20.

salah satu bukti paling nyata dan penting yang menunjukkan kontak intensif antara Islam Hindia Belanda dengan Timur Tengah.[67]

Pada Abad ke-20 adalah masa gejolak dan pergumulan intelektual yang luar biasa, hal itu tergambar pada beberapa pengarang yang memberikan penjelasan secara singkat jaringan Timur Tengah dengan ulama Nusantara dari mulai Islam masuk ke Nusantara dan mulai bersentuhan ulama Nusantara dari abad ke-17 sampai abad ke-20, sehingga terbentuklah jaringan Timur Tengah ulama Nusantara yang selanjutnya saat ini memasuki abad ke-21.

B. Latar Belakang Pendidikan para Ulama Terkemuka Nusantara (Abad ke-20 sampai dengan Abad ke-21)

Setelah membaca hubungan ulama Nusantara dengan Timur Tengah dari awal masuknya Islam di Nusantara, hingga terjalinnya hubungan ulama Timur Tengah dengan ulama Nusantara mulai abad ke-17 sampai abad ke-20 di baik itu Makkah, Madinah, Kairo, dan negara lain di timur tengah, tentunya hubungan itu tetap berlanjut karena di hubungkan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan keterkaitan antara guru dan murid yang belajar di sana. Berdasarkan jalinan hubungan tersebut mulai bermunculan ulama terkenal sepanjang sejarah pada abad ke-20 sampai abad ke-21 saat ini.

1. Haji Abdul Malik Karim Amrullah/Buya Hamka (1908–1981 M)

Ulama Nusantara yang memiliki hubungan dengan Timur Tengah adalah Buya Hamka. Penulis mencoba menjabarkan biografi dari Buya Hamka sampai kepada

[67] H. Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), hlm. 15.

karier hingga akhir hayatnya. Buya Hamka adalah singkatan dari nama Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dan Abdul Malik ialah panggilannya di waktu kecil.[68]

Ia lahir di Negeri Sungai Batang, Maninjau, Sumatra Barat, pada Minggu siang tanggal 16 Februari 1908 M bertepatan dengan 13 Muharam 1326 H,[69] dan meninggal di Jakarta 24 Juli 1981 pada usia ke 73 tahun. Hamka merupakan anak dari pasangan Haji Abdul Karim Amrullah dan Shafi'ah. Ayahnya ialah tokoh pelopor gerakan Islam kaum muda dan ulama yang berpengaruh di tanah Minangkabau yang memulai gerakannya pada tahun 1906, setelah kembali dari Makkah.[70] Hamka, sebagai salah satu tokoh Islam Nusantara, mencetuskan beberapa hal berkaitan dengan pendidikan Islam, yang jika direkonstruksi lebih lanjut, sangat relevan serta masih bisa diaplikasikan dengan keadaan keumatan sekarang. Di antara pemikiran tersebut berkaitan dengan tujuan pendidikan, kurikulum, pendidik peserta didik dalam Islam, serta materi pendidikan Islam.[71]

Sebagai seorang anak dari Haji Abdul Karim Amrullah seorang pelopor gerakan Islam, tentu hal ini tentu menjadikan awal pengetahuan bagi seorang Hamka kecil. Ayah Hamka merupakan sosok pelopor gerakan kaum muda Islam di Minangkabau yang meniti karier gerakannya pada tahun 1906 setelah kembalinya dari

---

[68] Samsul Nizar, *Sejarah Sosial & Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 6.

[69] *Ibid*., hlm. 6.

[70] Eka Yudha Wibowo, "Ibadah Haji dan Kontribusinya terhadap Berbagai Bidang Sosial Masyarakat di Indonesia (Tahun 1900–1945)", *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* (2019), hlm. 109–122.

[71] M. Alfian, "Pemikiran Pendidikan Islam Buya Hamka", *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* (2019), hlm. 89–98.

Makkah, sehingga sempat ketika Hamka berusia tiga tahun sudah mendengarkan perdebatan sengit mengenai apa yang disebut dengan pemahaman keagamaan.[72] Sebagai seorang anak, Hamka kecil tentu menginginkan kasih sayang dari seorang ayah. Namun dampak dari kesibukan ayahnya yang menjadi pelopor dalam gerakan Islam, berakibat kurangnya Hamka mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Sebagai seorang ulama modernis, ayahnya sangat diperlukan masyarakat sekitarnya sehingga harus sering meninggalkan rumah dan jarang sekali bertemu dengan Hamka.[73]

Selain pendidikan agama, Hamka kecil juga menikmati pendidikan di sekolah. Setelah setahun kemudian di saat usianya tujuh tahun, ayahnya memasukkan Hamka ke sekolah desa dan menuntut ilmu tambahan di Sekolah Diniah pada usia delapan tahun. Sekolah desa di pagi hari dan di sore hari belajar di Diniah, sedangkan di malam hari Hamka berada di surau atau musala bersama teman sebayanya. Seperti itulah putaran kehidupan Hamka di waktu kecil. Hal tersebut bukanlah sebuah kebahagiaan bagi Hamka melainkan pengekangan kebebasan hidup di masa kecilnya.[74]

Setelah mengikuti keinginan ayahnya sekolah di pendidikan agama, hal lain yang menimpa keluarga Hamka kecil adalah mengalami suatu peristiwa yang mengguncangkan jiwanya. Peristiwa yang pertama kali dalam kehidupannya, yaitu pada saat usianya 12 tahun

[72] Moh. Rivaldi Abdul et al. "Pembentukan Akhlak dalam Memanusiakan Manusia: Perspektif Buya Hamka", *Pekerti: Journal Pendidikan Islam dan Budi Pekerti* (2020), hlm. 79–99.
[73] A. Akhbar, *Nikah Mutah di Mata Hamka* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2018), hlm. 43.
[74] Hadi Nur Rakhmad, *Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) tentang Pendidikan Islam* (Jawa Barat: Guepedia, 2021), hlm. 30.

(1920), Hamka harus menerima kenyataan pahit, yakni harus menerima perceraian ayah dan ibunya.[75] Akibat perceraian orang tuanya, ia merasa kehilangan arah dan hampir satu tahun Hamka mengalami hidup tidak menentu dan bergaul dengan preman. Pendek kata, Hamka menjadi nakal, susah diatur, dan bandel.[76]

Usianya 15 tahun ketika itu, Hamka nekat merantau ke daerah Jawa seorang diri, hal ini merupakan wujud pemberontakan terhadap ayahnya. Perjalanan Hamka ini terhambat karena terserang penyakit cacar kulit. Selama dua bulan, Hamka terkulai lemas, dan setelah sembuh kemudian pulang ke Padang Panjang dengan membawa bekas luka cacar kulit.[77]

Kegagalan tersebut tidak membuat Hamka putus asa, setahun kemudian 1924, untuk kedua kalinya ia berangkat kembali ke tanah Jawa (Yogyakarta), lewat Ja'far Amrullah, pamannya. Hamka mendapat kesempatan untuk mengikuti kursus-kursus yang diadakan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam (SI). Dari kursusnya itu ia mendapat kesempatan bertemu dengan Ki Bagus Hadi Kusumo dan HOS Cokroamimoto, dari situlah Hamka mendapat pelajaran Tafsir al-Qur'an dan Ceramah Islam serta Sosialisme. Melalui forum semacam ini pula Hamka mendapat kesempatan berdialog dengan Haji Fakhruddin, Samsul Rizal, (tokoh Jong Islamieten Bond), dan tokoh penting lainnya.[78]

---

[75] Mohamad Ali, *Studi Filosofis Konsep Pendidikan* (Tanpa Kota: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun), hlm. 175–187.

[76] R. Shafa et al., "Construction of Climate of Social Affection in Realizing the Noble Morals of Youth (Phenomenology Study in Medan Johor Kota Medan district)", *International Journal of Islamic Education, Research, and Multiculturalism (IJIERM)* (2021), page. 93–119.

[77] Naurah Luthfiah, et al., "Best Practice dalam Keluarga Buya Hamka", *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* (2023), page 11–42.

[78] *Ibid*., hlm. 22.

Kunjungan Hamka yang kedua ke tanah Jawa inilah memberikan merupakan pengalaman dan pengetahuan yang besar terhadap semangat baru dalam mempelajari Islam. Sebagaimana yang dikatakannya di Yogyakarta menemukan Islam sebagai sesuatu yang hidup, yang memberikan sebuah pendirian dan perjuangan hidup yang dinamis.[79]

Hamka kecil yang dulunya nakal berubah seratus derajat, sosoknya menjadi ulama dan tokoh muda. Ia yang berusia 17 tahun memutuskan kembali ke kampung halaman dan menjadi pemimpin di lingkungannya. Hamka mulai berpidato dan berceramah dan menjadikan orang yang berpengaruh di daerahnya. Ternyata tantangan dan hambatan tidak mudah, banyak masyarakat yang menilai Hamka hanya pandai dalam berpidato dan kurang beragama seperti pemahaman dan pendalaman terhadap bahasa Arab ilmu nahu dan saraf, walaupun Hamka sangat suka membaca kitab-kitab Arab dan karya tulis Indonesia.[80]

Hamka yang jiwanya tertanam sebagai aktivis mulai aktif sebagai Pengurus Muhammadiyah Cabang Padang Panjang, dan diberi tugas untuk memimpin sekolah yang diberi nama Tabligh School.[81] Perjalanan Hamka ternyata tidak sia-sia dan menjadi bukti bahwa ia telah berhasil mengukuhkan dirinya sebagai tokoh dan penganjur Islam. Ketika menghadiri Kongres Muhammadiyah ke-19 di

[79] Muhammad Syahripin et al., "Principal Planning Management in Increasing Teacher Work Productivity", *International Journal of Islamic Education, Research, and Multiculturalism (IJIERM)* (2021), page 184–187.

[80] Mohamad Ali, *Studi Filosofis Konsep Pendidikan* (Tanpa Kota: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun), hlm. 175–187.

[81] Adian Husaini dan Bambang Galih Setiawan, *Pemikiran dan Perjuangan M. Natsir dan Hamka dalam Pendidikan* (Jawa Barat: Gema Insani, 2020), hlm. 3.

Bukittinggi 1930, Hamka membawakan judul makalah tentang "Agama Islam dan Adat Minangkabau".

Hamka merupakan salah satu tokoh revolusioner Indonesia di abad modern. Karya-karyanya menjadi bukti bahwa ia merupakan salah seorang tokoh penting akan berkembangnya keislaman Indonesia di abad 20, yaitu dari jamin pemerintahan Kolonial Belanda, Rezim Jepang, hingga pemerintahan Soekarno (Orde Lama), pemerintahan Soeharto (Orde Baru Indonesia), sampai sekarang ini. Terbukti bahwa, banyak sekali keberpengaruhan Hamka melalui gerakannya bisa mengubah cara berpikir masyarakat Indonesia. Sampai saat ini, tentunya karya tulis Hamka masih menjadi rujukan.[82]

Karya-karya dari Hamka sangat banyak, yang diterbitkan Bulan Bintang ada sekitar 20 buku, karya-karya yang terdata oleh Irfan Hamka ada 13 buku, dan karya-karya yang terdata oleh Rusydi Hamka ada 78 buku. Terdapat pula satu kitab yang terkenal dari Hamka adalah kitab *Tafsir al-Azhar*.

2. Wahid Hasyim (1914–1953 M)

Wahid Hasyim adalah putra Hasyim Asy'ari yang lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 1 Juni 1914. Mula-mula ia belajar agama pada ayahnya sendiri serta belajar pula pada Madrasah Salafiah di Tebuireng pada pagi hari. Pada tahun 1926 waktu berusia 12 tahun, ia telah tamat dari Madrasah Salafiah. Pada masa itu ia amat rajin mempelajari bahasa Arab dan kesusastraannya dengan membaca buku-buku dan belajar sendiri. Sebab itu banyak

[82] A. Akhbar, *Nikah Mutah di Mata Hamka* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2018), hlm. 60.

sekali ia menghafal syair dalam bahasa Arab. Tahun 1927, ia pergi belajar ke Pondok Siwalon Panji, Sidoarjo, tetapi tidak lama ia belajar di sana.[83]

Tahun 1929, ketika berumur 15 tahun, Wahid Hasyim baru mengenal huruf latin, dengan bersungguh-sungguh belajar ilmu pengetahuan secara belajar sendiri. Sebab itu ia banyak berlangganan dengan surat-surat kabar dan majalah-majalah, bahkan ia berlangganan pula dengan majalah-majalah *Hijaz* dan Mesir. Kemudian, di usia 18 tahun, Wahid Hasyim melanjutkan studinya di Makkah (1932–1933), mengikuti pengalaman belajar ayahnya dan ulama lain umumnya pada masa itu.[84]

Pada akhir tahun 1933, Wahid Hasyim kembali pulang ke Indonesia. Awalnya mengajar di Pondok Tebuireng dengan maksud mengadakan perubahan dalam dunia pendidikan dan pengajaran pesantren. Ia mengadakan perubahan kepada empat orang pelajar yang dianggapnya terpandai di antara santri lainnya. Setelah setahun mengadakan percobaan itu, tahun 1935 ia mulai membuka sebuah madrasah yang modern bernama Madrasah Nizamiyah. Di antara pelajaran agama Islam diadakan juga pelajaran pengetahuan umum dan di samping pelajaran bahasa Arab diadakan pula pelajaran bahasa Belanda dan bahasa Inggris.[85]

Madrasah Nizamiyah mula-mula hanya terdiri atas satu kelas dengan 29 murid, tetapi berselang beberapa waktu Wahid Hasyim harus menambah dua kelas lagi,

---

[83] J. Burhanudin, *Ulama & Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim*, (Tanpa Kota: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun), hlm. 347.

[84] M. Thoyyib, "Peran Ulama Abad XIX dalam Mengembangkan Pesantren di Indonesia: Studi Atas Pemikiran Abdurrahman Mas'ud tentang Pendidikan Pesantren", *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* (2019), hlm. 134–145.

[85] *Ibid*.

sehingga terdiri atas tiga kelas (kelas I, kelas II, dan kelas III). Pada tahun 1936, didirikanlah Ikatan Pelajar Pelajar Islam (IKPI) yang dipimpin oleh Wahid Hasyim sendiri, selanjutnya ia mendirikan taman pembacaan yang menyediakan kitab-kitab bacaan dalam bermacam-macam bahasa serta berlangganan dengan surat-surat kabar dan majalah-majalah.[86]

Secara singkat, dalam tahun 1936 Tebuireng mengalami suatu masa kemajuan yang gilang gemilang dalam lapangan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama ataupun ilmu umum. Dalam tahun 1938, Wahid Hasyim mulai mencurahkan tenaganya ke dalam pergerakan dan perkumpulan Islam yaitu organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Akhirnya pada tahun 1940, ia dipilih menjadi anggota Pengurus Besar NU bagian Ma'arif[87].

3. K.H. Abdurrahman Wahid/Gus Dur (1940–2009 M)

Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur, dengan nama lengkap Abdurrahman al-Dakhil, lahir pada 4 Agustus 1940, di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, di rumah pesantren milik kakek dari pihak ibunya, Kiai Bisri Syansuri.[88] Ia merupakan putra pertama dari enam bersaudara. Ayahnya bernama Wahid Hasyim, putra K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri pondok pesantren Tebuireng dan pendiri Nahdlatul Ulama (NU) (Fearly, 1998:32), organisasi dengan massa terbesar di Indonesia. Ibunya

[86] Yusril Rubiantara Abas, "Nizhamiyah dan Kebangkitan Pendidikan Islam di Baghdad", *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, hlm. 127.

[87] Nur Hidayatullah, "Idham Chalid di Nahdlatul Ulama", *Idrak: Journal of Islamic Education* (2018), hlm. 1–18.

[88] M. Tohet, "Pemikiran Pendidikan Islam K.H. Abdurrahman Wahid dan Implikasinya bagi Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Agama Islam, Edureligia* Vol. 1, No. 2 (Juli–Desember 2017), hlm. 178–179.

bernama Hj. Solichah, juga putri tokoh besar NU yakni K.H. Bisri Syansuri, pendiri pondok pesantren Denanyar Jombang dan Ro'is Am Syuriah Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) setelah K.H. Abdul Wahab Chasbullah.[89]

Sebagai cucu Hasyim Asy'ari dan Wahid Hasyim, Abdurrahman Wahid datang dari inti keluarga ulama di Jawa. Lahir di Jombang tahun 1940, Gus Dur nama populer Abdurrahman Wahid memperoleh pendidikan dasarnya di Pesantren Tebuireng. Ia kemudian menghabiskan beberapa tahun belajar di sejumlah pesantren di Jawa, Pesantren Tegalrejo di Magelang (1957–1959) dan Pesantren Krapyak di Yogyakarta (1959–1963) di mana ia belajar dari ulama NU terkemuka, Kiai Ali Maksum. Di tahun 1964, ia meninggalkan Indonesia menuju Kairo, Mesir, untuk belajar (dan tak pernah selesai) di al-Azhar.[90]

Dari Kairo, Gus Dur pergi ke Baghdad untuk mempelajari sastra dan kebudayaan Arab. Studinya di Timur Tengah berlangsung hingga tahun 1971 saat ia kembali ke Pesantren Tebuireng milik keluarganya. Dari pesantren inilah ia mulai membangun kariernya dalam kehidupan sosial-politik Indonesia.[91] Karier politik K.H. Abdurrahman Wahid dalam negara Indonesia yakni pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-4 mulai tanggal 20 Oktober 1999 sampai 24 Juli 2001.

---

[89] Dwi Kurniawan, "Konsep Pendidikan Pluralis-Humanis dalam Bingkai Pemikiran Gus Dur", *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan* (2022), hlm. 235–247.

[90] M. Tohet, "Pemikiran Pendidikan Islam K.H. Abdurrahman Wahid dan Implikasinya bagi Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Agama Islam, Edureligia* Vol. 1, No. 2 (Juli–Desember 2017), hlm. 180.

[91] J. Burhanudin, *Ulama & Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim* (Tanpa Kota: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun), hlm. 389.

C. Pengaruh Jaringan Timur Tengah Ulama terhadap Paham dan Keberagamaan Umat Islam Indonesia

Pengaruh besar dari belajar dengan para ulama Timur Tengah tentulah memberikan pengaruh besar terhadap pemahaman muridnya dan tentu menjunjung tinggi dari paham yang dibawa oleh ulama tersebut. Dalam hal ini, beberapa ulama terkenal di Indonesia yang sudah dibahas oleh penulis sebelumnya, sekarang penulis mencoba menjelaskan pemahaman masing-masing ulama.

1. Haji Abdul Malik Karim Amrullah/Buya Hamka (1908–1981 M)

Pemahaman yang dibawa oleh Buya Hamka adalah pemahaman Muhammadiyah hal ini terbukti bahwa ia belajar dengan ayahnya yang juga memiliki paham Muhammadiyah dan Syaikh Ahmad Rasyid Sutan Mansur (Pemimpin Muhammadiyah). Tentunya tidak diragukan lagi Buya Hamka mempelajari ide pembaruan Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dari al-Azhar Kairo.[92]

Hamka adalah satu contoh yang baik. Ia tumbuh dalam suasana rumah tangga yang religius dan dididik di sekolah-sekolah agama. Pada saat usianya mencapai 20 tahun, ia telah menerbitkan karya-karya keagamaan dan sekuler secara luas dan ia juga bekerja sebagai seorang wartawan, termasuk sebagai redaksi. Ia dikenal pula sebagai penulis novel (novelis), yang sering mengangkat tema-tema keagamaan, dan guru di beberapa lembaga keagamaan.[93]

---

[92] Samsul Nizar, *Sejarah Sosial & Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 6.

[93] Moh. Rivaldi Abdul et al. "Pembentukan Akhlak dalam Memanusiakan Manusia: Perspektif Buya Hamka", *Pekerti: Journal Pendidikan Islam dan Budi Pekerti* (2020), hlm. 89.

Oleh karena itu, pengaruh paham dan keberagaman umat Islam Indonesia merupakan pelopor intelektual pembaruan-pembaruan pendidikan di Indonesia serta seorang penulis yang aktif sehingga menciptakan karya-karya populer yang masih berkembang sampai saat ini, di antaranya kitab *Tafsir al-Azhar*.

2. Wahid Hasyim (1914–1953 M)

Pemahaman yang dibawa oleh Wahid Hasyim adalah pemahaman Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi keagamaan yang bentuk oleh ayahnya Hasyim Asy'ari yang berpaham tarekat Sufi yang telah dipelajari dari guru-gurunya. Hasyim Asy'ari melanjutkan belajar Islam. Mahfudz Termas, salah satu ulama Jawa terkemuka saat itu, adalah gurunya yang paling penting, yang menjadi sumber utama pembentukan pengetahuan keislamannya. Dari Mahfudz Termas, Hasyim Asy'ari terutama mempelajari kitab hadis standar karya Imam Bukhari (Shahih Brukhari), yang membuatnya diakui sebagai seorang pakar yang otoritatif di bidang ini.[94]

Dalam kariernya, Wahid Hasyim menjadi menteri selama tiga periode dalam Kabinet Soekarno (1945). Ia menjadi Menteri Negara, lalu pada Kabinet Hatta (1950) menjadi Menteri Agama, dan pada Kabinet Sukiman juga sebagai Menteri Agama. Pada hakikatnya Wahid Hasyim-lah membentuk dan mengorganisir Kementerian Agama sampai merupakan bentuk seperti sekarang. Jasa Wahid Hasyim dalam pendidikan Islam saat menjadi Menteri Agama banyak sekali usaha dan jasanya dalam pendidikan

[94] Yusril Rubiantara Abas, "Nizhamiyah dan Kebangkitan Pendidikan Islam di Baghdad", *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, hlm. 131.

dan pengajaran mulai dari mengatur susunan serta tugas jabatan urusan agama, memuat pendidikan agama di sekolah-sekolah, menyusun standar operasional prosedur pegawai negeri, mendirikan kantor-kantor urusan agama, memberikan penghargaan kepada madrasah-madrasah, serta mendirikan Sekolah Pendidikan Agama (PGA) mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi di berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia.[95]

Salah satu keberhasilan dari Wahid Hasyim adalah melakukan inovasi pendidikan dalam pesantren, yaitu mulai akrab dengan metodologi modern, semakin berorientasi pada pendidikan yang fungsional atau terbuka atas perkembangan yang ada, diversifikasi program dan kegiatan makin terbuka dan ketergantungannya dengan kiai tidak absolut sehingga dapat membekali santri dengan berbagai pengetahuan di luar pelajaran agama maupun keterampilan yang diperlukan dunia kerja, dan dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat.[96] Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman Wahid Hasyim adalah tarekat Sufi, dan kemampuan dan kepandaiannya menjadi pemimpin sehingga ia ditunjuk menjadi menteri tiga periode, serta banyak kebijakan darinya yang sangat bermanfaat kepada pendidikan Islam di Indonesia.

3. K.H. Abdurrahman Wahid/Gus Dur (1940–2009 M)

Pemahaman K.H. Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur tidak jauh berbeda dengan Wahid Hasyim

[95] Nur Hidayatullah, "Idham Chalid di Nahdlatul Ulama", *Idrak: Journal of Islamic Education* (2018), hlm. 4.

[96] U. Asnawan, "K.H. Abdul Wahid Hasyim Pembaru Pesantren", *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* (2018), hlm. 431–454.

karena ia adalah anak dari Wahid Hasyim. Gus Dur memiliki basis sosial-budaya yang kuat untuk dapat diterima sebagai pemimpin lembaga ulama seperti Nahdlatul Ulama (NU). Garis keturunannya yang sampai pada Hasyim Asy'ari memberinya legitimasi kultural, dan pada gilirannya keagamaan. Bagi para tokoh dan warga NU, kepemimpinannya menegaskan keberlanjutan peran vital ulama di lingkungan NU dan di tengah umat muslim Indonesia. Dengan kecakapan memimpin dan naluri politiknya yang kuat.[97]

Gus Dur berhasil memimpin institusi ulama tersebut. Ia mendominasi perkembangan NU dan sekaligus wacana keislaman Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Gagasan Islamnya liberal dan progresif, yang diidentifikasi bersama dengan Nurcholish Madjid, Djohan Effendy, dan Ahmad Wahib sebagai "neo-modernis".[98] Jadi paham dari Gus Dur dari Sufi menjadi lebih liberal dan progresif atau dengan istilah neo-modernis, serta pengalaman-pengalamannya dari belajar di luar negeri menjadikan ia pemimpin yang kuat baik di kelembagaan NU dan bangsa Indonesia.

Kepemimpinan Gus Dur atas NU berhasil meningkatkan kehidupan intelektual di dalam NU, menegaskan kembali otoritas keagamaan ulama, dan lebih penting lagi mengubah NU menjadi suatu lembaga sipil Islam yang berpengaruh kuat dalam pembentukan wacana sosial-politik di Indonesia kontemporer. Ditetapkannya Gus Dur sebagai Presiden Indonesia (2000–2001)

[97] Dwi Kurniawan, "Konsep Pendidikan Pluralis-Humanis dalam Bingkai Pemikiran Gus Dur", *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan* (2022), hlm. 237.

[98] J. Burhanudin, *Ulama & Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim* (Tanpa Kota: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun), hlm. 389.

sebagian terkait dengan keberhasilannya memimpin gerakan atas nama institusi ulama ini. Ia membawa NU, dengan ulama dan pesantrennya, ke jantung perpolitikan Indonesia, yang kemudian termanisfestasikan dalam pembentukan partai politik berbasis NU (ulama), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).[99]

Dari pembahasan tersebut, selain berpaham Sufi, pengaruh pendidikan yang ditempuh Gus Dur di berbagai negara telah membentuk karakter dan pemikirannya sendiri. Walaupun karakter dari sufi dan liberal dapat dipadukan dalam dirinya dan kepemimpinannya menjadikannya ulama yang sangat berpengaruh dalam NU bahkan dalam perpolitikan Indonesia, ia juga mampu memimpin negara Indonesia.

D. Kesimpulan

Pada abad ke-19, ulama Nusantara Melayu Indonesia banyak yang berasal dari berbagai wilayah dari Nusantara di antaranya yakni Muhammad Nawawi al-Bantani, dan abad ke-20 Muhammad Yasin al-Fadani. Abad ke-20 dan 21 adalah abad pembaruan intelektual karena Nusantara telah dimasuki paham-paham kolonialisme. Ulama-ulama terkemuka di Indonesia yang bersentuhan dengan jaringan Timur Tengah dalam hal ini adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah (1908–1981 M), Wahid Hasyim (1914–1953 M) K.H. Abdurrahman Wahid/Gus Dur (1940–2009 M). Pengaruh dari jaringan Timur Tengah sangat memengaruhi pemahaman yang mereka terapkan di Indonesia, Buya Hamka menganut paham Muhammadiyah sehingga penerapan di masyarakat Indonesia lebih dalam bidang Intelektual pembaruan modern, Wahid

[99] *Ibid*., hlm. 350.

Hasyim pahamnya lebih kepada Nahdlatul Ulama (NU) yang penganut Sufi dan lebih kepada pembaruan pesantren serta pengaruhnya dalam pendidikan sangat kuat ketika ia ditunjuk menjadi menteri tiga periode. K.H. Abdurrahman Wahid pemahamannya dari sufi menjadi lebih liberal dan progresif atau dengan istilah neo-modernis, sehingga dengan kemampuannya ia mampu memimpin NU serta melakukan perubahan-perubahan di dalamnya, dan menjadi Presiden Republik Indonesia.

E. Daftar Pustaka

Abas, Yusril Rubiantara. 2022. *Nizhamiyah dan Kebangkitan Pendidikan Islam di Baghdad: Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Jakarta: Qweenpedia.

Akhbar, A. 2018. *Nikah Mutah di Mata Hamka*. Yogyakarta: Semesta Aksara.

Asari, H. 2020. *Menyikap Zaman Keemasan Islam*. Medan: Cita Pustaka.

Azra, Azyumardi. 2018. *Jaringan Ulama Timur Tengah & Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII, Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group.

Burhanudin, J. 2012. *Ulama & Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta: Mizan.

Husaini, Adian dan Bambang Galih Setiawan. 2020. *Pemikiran dan Perjuangan M. Natsir dan Hamka dalam Pendidikan*. Jawa Barat: Gema Insani.

Nizar, Samsul. 2013. *Sejarah Sosial & Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*. Jakarta: Kencana.

Permana, Agus dkk. 2021. *Jaringan Habaib di Pulau Jawa Abad 20 (Studi Integrasi Islam dan Budaya Lokal dalam Bingkai Islam Nusantara)*. Bahasa dan Sastra Arab, UIN Sunan Gunung Djati.

Rakhmad, Hadi Nur. 2021. *Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) tentang Pendidikan Islam*. Jawa Barat: Guepedia.

Syafi'i, Ahmad. 2019. *Studi Hukum Islam Interdisipliner Madzhab Sunan Giri*. Tanpa Kota: Nata.

Sumber Lain:

Abdul, Moh. Rivaldi et al. 2020. "Pembentukan Akhlak dalam Memanusiakan Manusia: Perspektif Buya Hamka". *Pekerti: Journal Pendidikan Islam dan Budi Pekerti*.

Alfian, M. 2019. "Pemikiran Pendidikan Islam Buya Hamka". *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*.

Alfiyah, Avif. 2016. "Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar". *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*.

Ali, Mohamad. 2022. "Studi Filosofis Konsep Pendidikan Menurut Hamka dan Relevansinya dengan Sistem Perkaderan Muhammadiyah". *Heutagogia: Journal of Islamic Education*.

Aliyah, Ida Hidayatul dkk. 2018. "Feminisme Indonesia dalam Lintasan Sejarah". *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*.

Amin, Faizal dan Rifki Abror Ananda. 2019. "Kedatangan dan Penyebaran Islam di Asia Tenggara: Telaah Teoretis tentang Proses Islamisasi Nusantara". *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*.

Asnawan, U. 2018. "K.H. Abdul Wahid Hasyim Pembaru Pesantren". *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*.

Assiroji, Dwi Budiman. 2020. "Konsep Kaderisasi Ulama di Indonesia". *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*.

Hidayatullah, Nur. 2018. "Idham Chalid di Nahdlatul Ulama". *Idrak: Journal of Islamic Education*.

Karim, Mochamad Faisal. 2016. "Proses Munculnya Euro-Islam sebagai Transnational Norms di Kalangan Muslim Eropa". *Jurnal Kajian Wilayah*.

Kurniawan, Dwi. 2022. "Konsep Pendidikan Pluralis-Humanis dalam Bingkai Pemikiran Gus Dur". *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*.

Luthfiah, Naurah et al. 2023. "Best Practice dalam Keluarga Buya Hamka". *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society*.

Mauliddina, Shela Andri. 2022. "Pemahaman Pendidikan Menurut Buya Hamka dengan Mengimplementasikan Lambang Bangsa Indonesia". *Aulad: Journal on Early Childhood*.

Naldi, Anri. 2022. "Network of the Middle East Nusantara Ulama (20th Century to 21st Century)". *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora*.

Putra, Apria. 2018. "Ulama dan Karya Tulis: Diskursus Keislaman di Minangkabau Awal Abad 20". *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*.

Sampurno, Margo. 2024. "Nahdlatul Turats: Gerakan Filologi Islam dalam Melacak Jaringan Keilmuan Ulama Nusantara: Gerakan Filologi Islam dalam Melacak Jaringan Keilmuan Ulama Nusantara". *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*.

Shafa, R. et al. 2021. "Construction of Climate of Social Affection in Realizing the Noble Morals of Youth (Phenomenology study in Medan Johor Kota Medan district)". *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*.

Syahripin, Muhammad dkk. 2021. "Principal Planning Management in Increasing Teacher Work Productivity". *International Journal of Islamic Education, Research, and Multiculturalism (IJIERM)*.

Thoyyib, M. 2019. "Peran Ulama Abad XIX dalam Mengembangkan Pesantren di Indonesia: Studi Atas Pemikiran Abdurrahman Mas'ud tentang Pendidikan Pesantren". *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*.

Bab 5
Kebangkitan Pendidikan Agama Islam di Sekolah: SDIT, SMPIT, SMAIT

Mohammad Wisnu Khumaidi

A. Kebangkitan Pendidikan Agama Islam

Semangat kebangkitan nasional bertujuan menumbuhkan rasa bangga atas bangsa dan negara harus diakui di masyarakat. Semangat kebangkitan nasional adalah suatu perasaan yang mendorong bangsa Indonesia untuk berjuang melawan penjajahan, menuntut kemerdekaan dan kemudian mempertahankan kemerdekaan negeri sebagai jati diri bangsa. Bangsa Indonesia tidak mungkin dapat menjadi bangsa yang merdeka dan bebas seperti saat ini apabila tidak ada usaha untuk bangkit dan melepaskan diri dari penjajahan. Kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit tumbuh seiring lahirnya generasi muda yang terdidik dan peduli terhadap kemerdekaan Indonesia.

Di bidang pendidikan, semangat kebangkitan yang diwujudkan dalam bentuk gerakan kemajuan dan naik level gaungnya terkesan lebih kecil suaranya dibandingkan dengan gaung mengenai masalah dan keburukan. Kekurangan guru, kualitas gedung sekolah yang rusak, dan mutu belajar yang rendah di daerah terpencil menjadi mudah diketahui dengan adanya berita di media. Pada saat bersamaan, di lokasi lain dilaporkan oleh jurnalis terjadi peningkatan signifikan jumlah guru dan meningkatnya kesempatan bagi anak usia dini untuk mendapat pendidikan.

Usaha perbaikan kualitas pendidikan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Hanya saja program ini jarang diberitakan secara luas oleh media-media nasional. Rumah Sokola[100], misalnya, telah mengembangkan program belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Program ini telah dilaksanakan di Jambi, Makassar, Flores, Bukukumba, dan Halmahera.[101] Gerakan 1.000 Guru[102] telah memanfaatkan kelimpahan ilmuwan Indonesia di berbagai bidang untuk menyelenggarakan telekonferensi, menulis majalah ilmiah, dan membuat video pendidikan untuk dibagikan secara gratis kepada sekolah-sekolah di Indonesia.

Contoh tersebut adalah bukti-bukti kebangkitan pendidikan di Indonesia. Tanaman yang kita rawat di kebun telah mendatangkan hasil. Hasilnya bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan bahkan dipertukarkan dengan tetangga. Tantangan kita adalah merawat dan menanam lebih banyak lagi produk-produk unggul untuk menunjukkan eksistensi kita di tingkat Internasional. Tentu saja pada saat bersama, kita juga perlu memikirkan solusi untuk masalah-masalah yang masih kita hadapi.

B. Sejarah Berdirinya Sekolah Islam Terpadu

Menjelang tahun 1990-an, ada perubahan yang cukup menarik mengenai tren pendidikan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan lahirnya sekolah-sekolah Islam Terpadu. Pada masa sebelumnya, model lembaga pendidikan di Indonesia hanya mengenal tiga model lembaga pendidikan yakni pesantren, madrasah, dan sekolah (umum). Sekolah (umum)

[100] Sokola, Sekolah Pesisir

[101] "Kebangkitan Pendidikan Indonesia" diakses melalui kompasiana.com

[102] "Berbagi Pengetahuan, dari Mana Saja, dari Siapa Saja, untuk Semua", *Majalah 1000 Guru Edisi ke-113* (Vol. 8 No. 8).

merupakan lembaga pendidikan di Indonesia warisan penjajah Belanda yang mengajarkan ilmu-ilmu umum yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional dengan ciri khas di dalamnya terdapat di dalamnya masjid, kiai, dan santri. Pesantren, pada awalnya hanya mengajarkan 100% mata pelajaran agama[103] dengan menggunakan referensi kitab kuning. Tujuan pendidikan di pesantren adalah untuk menghasilkan para ahli ilmu agama.[104] Madrasah merupakan tindak lanjut dari pendidikan di pesantren, yang mengajarkan 30% mata pelajaran agama, selebihnya mata pelajaran umum.

Lebih dari 20 tahun terakhir, banyak pesantren telah mengadopsi sistem madrasah dan memasukkan mata pelajaran umum dalam sistem pendidikannya. Sistem pendidikan di madrasah diperkenalkan untuk menjembatani kesenjangan antara pesantren dan sekolah yang pada akhirnya melahirkan dualisme dalam sistem pendidikan nasional. Dengan memberikan penekanan pada mata pelajaran-mata pelajaran agama, pesantren sering kali dianggap tidak mampu merespons kemajuan dan tuntutan zaman.[105]

Pada dekade akhir tahun 1980-an, Sekolah Islam Terpadu (SIT) mulai bermunculan. Para pendiri Sekolah Islam Terpadu terinspirasi dan keagungan nilai-nilai dari para pendiri bangsa Indonesia, seperti Dr. Muhammad Natsir, Mr. Moehammad Roem, Syafrudin Prawiranegara, Prof. H.M. Rasyidi, A.H.

---

[103] Amr Abdalla et al., *Improving the Quality of Islamic Education in Developing Countries: Innovative Approaches* (Washington: Creative Associates International, Inc., 2006), hlm. 22.
[104] Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah* (Jakarta: LP3ES The Columbia Encyclopaedia (1963) NY & London: Colombia University Press, 1986), hlm. 167–171.
[105] Noorhaidi Hasan, "Islamizing Formal Education: Integrated Islamic School and New Trend in Formal Education Institution in Indonesia", artikel daring di S. Rajartanam School of International Studies Singapore, Februari 2011, hlm. 4–5.

Nasution. Karena waktu para pendiri SIT itu adalah juga menjadi para aktivis di masjid Universitas Indonesia (UI).[106]

Akhirnya, hal itu diawali oleh para aktivis dakwah kampus yang memiliki keprihatinan terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Mereka adalah para aktivis Islam kampus yang berperan penting dalam menyebarkan ideologi Islam kepada para mahasiswa. Kalangan pemuda menjadi target utama dari gerakan ini karena mereka percaya bahwa para pemuda akan menjadi agen perubahan sosial yang sangat penting dalam melakukan islamisasi seluruh masyarakat Indonesia.[107]

Tugas untuk menyiapkan generasi muda muslim yang punya komitmen dakwah diyakini akan lebih efisien jika melalui pendidikan. Mereka mengawali mendirikan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Nurul Fikri dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah menginspirasi berdirinya Sekolah-Sekolah Islam Terpadu di seluruh wilayah Indonesia.[108] Hingga saat ini, ada sekitar 1.000 Sekolah Islam Terpadu yang tergabung dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) yang kepengurusannya telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan ada sekitar 10.000 Sekolah Islam Terpadu yang secara struktural tidak bergabung di bawah JSIT.[109]

Data di atas menunjukkan bahwa perkembangan Sekolah Islam Terpadu secara umum mendapat sambutan yang demikian antusias dari masyarakat. Sambutan masyarakat

---

[106] Musholi, diakses melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=fr1RwisWNI4 pada 2023.

[107] Zuly Qodir, *Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 104–107.

[108] Noorhaidi Hasan, "Islamist Party, Electoral Politics and Da'wa Mobilization Among Youth: The Prosperous Justice (PKS) in Indonesia", artikel daring di S. Rajaratnam School of International Studies Singapore, 2008.

[109] Usamah Hisyam, *Sepanjang Jalan Dakwah Tifatul Sembiring* (Jakarta: Dharmapena Citra Media, 2012), hlm. 69.

yang demikian ini disebabkan karena ada ketidakpuasan pada masyarakat Indonesia terhadap lembaga pendidikan yang telah ada sebelumnya yang meliputi pesantren, madrasah, dan sekolah (umum). Mungkin masyarakat menghendaki adanya sebuah lembaga pendidikan alternatif yang dapat memberikan bekal yang memadai bagi anak didik untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman. Berbagai peristiwa tentang kenakalan remaja seperti tawuran pelajar, minuman keras, penggunaan obat-obatan berbahaya (narkoba), dan pergaulan bebas menyebabkan kekhawatiran yang demikian besar terhadap masa depan anak-anaknya.

Oleh karena itu dibutuhkan sebuah lembaga pendidikan yang memadukan antara pendidikan modern sehingga anak tetap mampu merespons perkembangan dunia modern, namun juga memiliki basis keagamaan yang kuat sebagai landasan pembentukan moral sehingga tidak terbawa arus akan dampak negatif dari perkembangan zaman tersebut. Sepertinya Sekolah Islam Terpadu lahir sebagai jawaban dari berbagai tuntutan dan permasalahan tersebut.

Tulisan ini menjelaskan fenomena lahir dan berkembangnya Sekolah Islam Terpadu di Indonesia, filsafat, dan ideologi pendidikan Sekolah Islam Terpadu yang membedakan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang telah ada. Data penelitian bersumber dari penelitian maupun wawancara. Penelitian dilakukan dengan penelusuran terhadap buku, jurnal, buletin, dan artikel-artikel di internet. Penelitian lapangan dilakukan di Sekolah Islam Terpadu dengan mengambil setting khusus di Sekolah Islam Terpadu yang berada di bawah JSIT Wilayah Lampung. Teknik pengambilan data lapangan dilakukan dengan wawancara kepada Ketua JSIT Wilayah Lampung.

C. Kurikulum Sekolah Islam Terpadu: Reintegrasi Keilmuan Pendidikan Islam

Spesialisasi atau pemisahan antara ilmu agama dan ilmu non-agama sebenarnya bukan hal yang baru. Islam telah mempunyai tradisi dikotomi ini lebih dari seribu tahun silam. Namun dikotomi tersebut tidak menimbulkan terlalu banyak problem dalam sistem pendidikan Islam, sehingga sistem pendidikan sekuler Barat diperkenalkan ke dunia Islam melalui imperialisme. Hal ini terjadi karena sekalipun dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu non-agama telah dikenal dalam karya-karya klasik seperti yang ditulis oleh al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, mereka tidak mengingkari tetapi mengakui validitas dan status ilmiah masing-masing kelompok keilmuan tersebut.[110]

Ketika itu, ilmu-ilmu umum positivistik tersebut diperkenalkan ke dunia Islam melalui imperialisme Barat, terjadilah dikotomi yang sangat ketat antara ilmu-ilmu agama, sebagaimana yang dipertahankan dan dikembangkan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional (pesantren), di satu pihak ada ilmu-ilmu umum sebagaimana diajarkan di sekolah-sekolah yang disponsori oleh pemerintah. Dikotomi ini menjadi sangat tajam karena telah terjadi pengingkaran terhadap validitas dan status ilmiah yang satu atas yang lain. Pihak praktisi pendidikan tradisional menganggap bahwa ilmu-ilmu umum itu bidah dan haram dipelajari karena berasal dari orang-orang kafir. Sementara pendukung ilmu-ilmu umum menganggap ilmu-ilmu agama sebagai pseudo ilmiah atau hanya sebagai mitologi yang tidak akan sampai pada tingkat ilmiah karena tidak berbicara tentang fakta, tetapi tentang makna yang tidak bersifat empiris. Pada saat ini

[110] Mulyadhi Kartanegara, *Integrasi Ilmu* (Jakarta: Mizan, 2005), hlm. 19.

justru dikotomi seperti inilah yang terjadi dan telah menimbulkan berbagai problem yang akut dalam sistem pendidikan Islam.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya dua model lembaga pendidikan formal di Indonesia. Model yang pertama adalah sekolah-sekolah yang dikenal dengan sekolah umum seperti SD, SMP, dan SMU. Model yang kedua yaitu sekolah-sekolah yang dikenal dengan sekolah agama seperti MI, MTs dan MA. Model yang kedua inilah yang dalam sistem pendidikan nasional merupakan wujud dari lembaga pendidikan Islam. Di sekolah agama memiliki komposisi kurikulum 30% mata pelajaran agama sedangkan selebihnya 70% mata pelajaran umum.[111]

Islam tidak mengenal adanya dikotomi antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama karena keduanya sama-sama sebagai ayat Tuhan. Syafi'i Ma'arif yang dikutip oleh Muslih Usa dan Aden Wijaya mengatakan:

> *Pendidikan Islam sekarang menganut sistem pendidikan warisan abad pertengahan bagian akhir. Ciri utama dari warisan tersebut adalah adanya pemisahan secara jelas antara ilmu pengetahuan yang terklasifikasikan (agama dan umum). Sedangkan kedudukan pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional merupakan sisi lain yang bersumber dari sistem penyelenggaraan negara yang sesungguhnya juga sebagai bentuk modifikasi yang tidak sempurna atas warisan sejarah masa lalu tentang pendidikan modern yang kita anut. Sebagai akibatnya gejala ini sedikit banyak telah*

[111] Muhammad Kholid Fathoni, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 64.

memengaruhi kemajuan pendidikan khususnya pendidikan Islam.[112]

Kondisi seperti ini tentunya menyebabkan pendidikan Islam mengalami kerugian karena yang dihasilkan oleh model sekolah-sekolah tersebut adalah manusia yang tertinggal oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di satu sisi dan di sisi lain juga tertinggal dalam pengetahuan agama. Tertinggal dalam bidang iptek dikarenakan tidak seluruh waktu dan potensinya digunakan untuk mempelajari iptek akibat kurikulum yang harus dijalani. Tertinggal dalam bidang agama dikarenakan kurikulum yang ada hanya terdapat sedikit pelajaran agama, itu pun materinya sudah terjauhkan dari nilai-nilai tauhid.

Hal itu perlunya usaha untuk mengubah atau membentuk sosok pribadi muslim sesuai yang diharapkan oleh pendidikan Islam. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga pendidikan Islam alternatif yang mampu menghapus dikotomi ilmu pengetahuan. Walaupun wacana integrasi sebenarnya sudah ada dan berkembang pada masa terdahulu, sebagaimana telah banyak dikemukakan oleh para ilmuwan muslim. Meskipun demikian, wacana tersebut sampai saat ini secara resmi masih jarang menjadi karakteristik dari sebuah lembaga pendidikan.

Kegelisahan terjadi pada pola pendidikan nasional pada waktu itu di era tahun 1980 ke bawah, yang terkesan menitikberatkan pada liberalisme dan sekularisme, yaitu memisahkan pendidikan umum dan agama, menjadi salah satu sebab berdirinya lembaga Islam Terpadu ini.[113] Sekolah Islam

[112] Muslih Usa dan Aden Wijaya, *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial* (Yogyakarta: Aditia Media, 1987), hlm. 64.
[113] Fahmi Alaydroes, diakses melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=fr1RwisWNI4 (Deklarator JSIT) pada 2023.

Terpadu bercita-cita untuk mencetak generasi *ulul albab* (cerdas) dalam sebuah lembaga alternatif yang diharapkan oleh para orang tua yang memiliki anak-anak di usia sekolah.[114] Diharapkan, siswa-siswi dari Sekolah Islam Terpadu ini terdidik secara islami dan memiliki wawasan pengetahuan yang luas di segala bidang.

Sekolah Islam Terpadu merupakan pendatang baru dalam kancah pendidikan di Indonesia, sehingga mereka memiliki pilihan yang fleksibel terhadap kurikulum yang diterapkan. Meskipun demikian, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dipakai ketika memilih kurikulum yang akan diterapkan. Pertimbangan tersebut sebagai contoh adalah pertimbangan pragmatis. Karena berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maka mereka harus memilih antara kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kurikulum Kementerian Agama. Pertimbangan ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan nilai plus kepada para pengguna lembaga pendidikan tersebut.

Kurikulum sebagaimana di atas, jika dilihat dari perspektif epistemologi pendidikan Islam, sebenarnya berasal dari pandangan adanya integrasi ilmu antara ilmu agama dan ilmu umum. Konsep pemahaman keilmuan dalam kurikulum Sekolah Islam Terpadu menunjukkan bahwa ingin menjadikan peserta didik dari Sekolah Islam Terpadu memiliki penguasaan keilmuan yang integratif yakni bersatunya penguasaan ilmu-ilmu yang bersumber dari ayat-ayat *tanziliyah* yang menghasilkan sains ketuhanan, ayat-ayat dalam diri manusia yang menghasilkan sains humaniora dan ayat-ayat kauniah yang menghasilkan sains kealaman.

---

[114] Sukro Muhab, diakses melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=fr1RwisWNI4 (Ketua Pembina JSIT) pada 2023.

Sekolah Islam Terpadu ingin mengimplementasikan konsep integrasi ilmu dalam kurikulumnya. Sekolah Islam Terpadu menekankan keterpaduan dalam metode pembelajaran sehingga dapat mengoptimalkan ranah kognitif, afektif, dan konatif (motorik/*skill*). Sekolah Selain itu, Islam Terpadu juga memadukan pendidikan akliah, ruhiah, dan jasadiah. Dalam penyelenggaraannya memadukan keterlibatan dan partisipasi aktif lingkungan belajar yaitu sekolah, rumah, dan masyarakat.

D. Perbedaan Antara Madrasah dengan Sekolah Islam Terpadu

Ada beberapa irisan yang terdapat pada kedua lembaga pendidikan berbasis umum dan agama ini, yaitu madrasah dan Sekolah Islam Terpadu, di antaranya adalah sebagai berikut.

Madrasah	**Sekolah Islam Terpadu**
1. ***Madrasah Berada di Bawah Wewenang Kementerian Agama (Kemenag):*** Perbedaan antara SIT dan madrasah adalah keterlibatan Departemen Agama ikut mengatur kurikulum di madrasah. Kurikulum agama lebih ditekankan untuk mencetak insan cendekia Islam masa depan.	1. ***SIT Terdaftar di Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas):*** SIT baik sekolah dasar atau sekolah menengah pertama dan lanjutan berlabel Islam ini memang berada di bawah Dinas Pendidikan (Diknas). Tentu kurikulum yang digunakan harus sesuai dengan kurikulum dari Diknas. Meski begitu, pihak sekolah mengembangkan kurikulum tersebut sesuai nilai atau dasar agama Islam.

2. ***Memiliki Sistem Pembelajaran yang Memprioritaskan Agama:*** Agama Islam menjadi landasan kurikulum di madrasah baik MI, MTs, dan MA. Ilmu keagamaan seperti fikih, Qur'an hadis, dan lain-lain masuk dalam nama mata pelajaran bukan jenis muatan lokal seperti di SIT.	2. ***Ilmu Pengetahuan Umum dan Agama yang Seimbang:*** Kelebihan SIT adalah mampu mengimplementasikan kurikulum baik umum dan agama secara seimbang. Pendidikan Agama Islam masuk dalam mata pelajaran biasa sedangkan ilmu keagamaan seperti akidah akhlak, Qur'an hadis, fikih, tareh, dan lain-lain masuk dalam muatan lokal.
3. ***Waktu Pembelajaran Lebih Normal:*** Jika SIT memberlakukan aturan belajar *full day school* bagi siswa-siswi, kita bisa memilih madrasah untuk mendapatkan jam pelajaran yang normal. Madrasah sangat cocok untuk kita yang ingin memiliki jam pelajaran standar agar bisa mengelola stres dari rutinitas harian yang berlebihan.	3. ***Konsep Full Day School:*** Untuk para orang tua yang bekerja, memilih SIT memang bisa mengatur waktu lebih baik. Anak akan mengikuti metode pembelajaran dengan konsep *full day school* atau kita akan berada di sekolah lebih lama mulai pagi hingga sore hari.
4. ***Prestasi yang Tak Kalah Prestasi:*** Kelebihan memilih madrasah adalah mampu memiliki peluang integrasi ilmu dan ilmu agama secara bersamaan. Kalau banyak orang bilang bahwa sekolah di madrasah memiliki risiko pengetahuan umum yang sedikit, kita salah besar. Pasalnya, ada banyak siswa atau siswi dari madrasah yang berprestasi baik nasional atau internasional.	4. ***Praktik Belajar yang Berkualitas:*** Sekolah Islam Terpadu menerapkan praktik belajar agama yang bagus sehingga kita bisa mengembangkan potensi diri lebih baik. Praktik hafalan merupakan metode pembelajaran paling favorit di SIT.

5. Biaya Lebih Murah: Kelebihan yang wajib dipertimbangkan saat memilih madrasah adalah biaya pendidikan. MI negeri tentu memiliki jaminan pendidikan dari pemerintah sedangkan MI swasta mematok tarif tak begitu mahal dibandingkan SIT. Menuntut ilmu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan diri.	***5. Fasilitas yang Memadai:*** Biaya sekolah di SIT memang lebih mahal tetapi sebanding dengan fasilitas yang ditawarkan. Sarana dan prasarana memadai akan mendukung prestasi kita lebih baik lagi.

E. Kesimpulan

Kehadiran Sekolah Islam Terpadu (SIT) telah memberi warna baru terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Bermula dari pendirian Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Jakarta yang menjadi cikal bakal berdirinya SIT di Indonesia. Berbeda dengan tiga lembaga pendidikan lain, yakni pesantren, madrasah, dan sekolah umum, Sekolah Islam Terpadu ingin memadukan antara pendidikan agama yang menjadi ciri khas pesantren dan pendidikan modern yang menjadi ciri khas sekolah umum. Perbedaannya dengan madrasah yaitu, meskipun sama-sama memadukan antara pelajaran umum dan pelajaran agama adalah Sekolah Islam Terpadu tidak hanya memadukan kedua jenis mata pelajaran tersebut dalam kurikulum formalnya saja, tetapi keduanya menyatu dalam satu kepribadian anak didik.

Fasilitas memadai mengakibatkan makin mahalnya biaya, mayoritas sekolah ini hanya dapat dijangkau oleh kalangan menengah muslim. Sekolah ini juga mampu menampilkan corak baru mengenai reislamisasi masyarakat muslim Indonesia. Reislamisasi pada masa sebelumnya dilakukan di masjid-masjid dan melalui pengajian akbar, saat ini proses

tersebut dilakukan melalui pembelajaran agama Islam di sekolah-sekolah.

F. Daftar Pustaka

Abdalla, Amr et al. 2006. *Improving the Quality of Islamic Education in Developing Countries: Innovative Approaches* (Washington: Creative Associates International, Inc.)

Fathoni, Muhammad Kholid. 2005. *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional.* Jakarta: Departemen Agama RI.

Hisyam, Karel A.1986. *Pesantren, Madrasah, Sekolah* (Jakarta: LP3ES The Columbia Encyclopedia, 1963, NY & London: Colombia University Press).

Kartanegara, Mulyadhi. 2005. *Integrasi Ilmu.* Jakarta: Mizan.

Qodir, Zuly. 2009. *Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Steenbrink, Usa, Muslih dan Aden Wijaya.1987. *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial*. Yogyakarta: Aditia Media.Usamah. 2012. *Sepanjang Jalan Dakwah Tifatul Sembiring.* Jakarta: Dharmapena Citra Media.

Sumber Lain:

1000 Guru. Tanpa Tahun. "Berbagi Pengetahuan, dari Mana Saja, dari Siapa Saja, untuk Semua". *Majalah 1000 Guru* Edisi Ke-113 (Vol. 8 No. 8).

Dawam, Ainur Rofiq. Tanpa Tahun. "Quo Vadis IAIN Sunan Kalijaga-Upaya Membangun Landasan Awal". *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* Volume 41, State of Islamic Studies Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hasan, Noorhaidi. 2011. "Islamizing Formal Education: Integrated Islamic School and New Trend in Formal Education Institution in Indonesia". Artikel daring di S. Rajartanam School of International Studies Singapore.

_____. 2008. “Islamist Party, Electoral Politics and Da’wa Mobilization Among Youth: The Prosperous Justice (PKS) in Indonesia”. Artikel daring di S. Rajaratnam School of International Studies Singapore.

Sumber Internet:

https://wordpress.com

https://www.kompasiana.com/alamsemesta2448/5ce3a9c3733c4358bb3e1c12/kebangkitan-pendidikan-indonesia

https://www.neliti.com/publications/446837/pengembangan-kurikulum-jaringan-sekolah-islam-terpadu-jsit-di-sekolah-dasar-isla

https://www.researchgate.net/publication/340800030_PELAKSANAAN_KURIKULUM_JSIT_Jaringan_Sekolah_Islam_Terpadu_DI_SEKOLAH_DASAR_ISLAM_TERPADU_AL-FURQON_PALEMBANG/link/5e9e5360a6fdcca7892bd45e/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19

https://www.youtube.com/watch?v=fr1RwisWNI4

https://www.youtube.com/watch?v=fr1RwisWNI4

https://www.youtube.com/watch?v=fr1RwisWNI4

https://www.youtube.com/watch?v=fr1RwisWNI4

Bab 6
Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum

Seka Andrean

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya, adat istiadat, dan agama. Toleransi dan gotong royong adalah nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia. Namun, masalah seperti intoleransi, *bullying*, dan kekerasan menunjukkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya ilmu keagamaan. Pendidikan agama menjadi penting untuk membentuk moral dan etika masyarakat. Pendidikan agama diajarkan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, menekankan betapa seriusnya ilmu ini dipelajari untuk memenuhi kebutuhan rohani masyarakat.

Oleh karena itu, pendidikan agama merupakan salah satu hal yang wajib dipelajari bahkan sejak kecil. Orang tua menjadi peran atau guru pertama bagi anaknya untuk mengajarkan pendidikan agama. Pendidikan agama sudah kita dapatkan dari sejak sekolah dasar, hingga perguruan tinggi, hal tersebut menunjukkan betapa seriusnya ilmu ini untuk dipelajari agar kebutuhan rohani kita terpenuhi.

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*, nilai-nilai ajarannya selalu dapat diterima pada setiap zaman. Ajaran Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menandinginya, sehingga merupakan suatu hal yang bijak jika pemerintah menjadikan pendidikan agama Islam menjadi salah satu

komponen yang dipelajari secara berkesinambungan dalam dunia pendidikan formal di Indonesia. Bahkan menjadi mata pelajaran wajib di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan mata kuliah wajib pada perguruan tinggi, sekalipun pada perguruan tinggi umum.

Pada dasarnya pendidikan agama di perguruan tinggi merupakan kelanjutan dari pendidikan agama yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan sebelumnya. Perguruan tinggi umum telah terukir dalam sejarah pendidikan di tanah air sejak awal hadirnya perguruan tinggi di negeri ini. Bermula dari mata kuliah yang dianggap kehadirannya tidak diperlukan hingga dijadikan sebagai mata kuliah wajib.

Tulisan ini akan membahas tentang Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi umum. Bagaimana kedudukan, problem, dan prospek Pendidikan Agama di perguruan tinggi umum.

B. Pembahasan

1. Kedudukan Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum

Sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia telah mencatat bahwa pada tahun 1910, pendapat umum masih menyatakan bahwa Indonesia belum layak memiliki perguruan tinggi. Namun ada pula suara-suara yang menyatakan bahwa pada suatu saat nanti Indonesia harus mempunyai perguruan tinggi untuk melatih para ahli dan pekerja pada kedudukan yang lebih tinggi. Sebaliknya ada pula pendapat bahwa pendidikan tinggi bagi orang Indonesia akan merusak pribadinya karena tidak sesuai lagi dengan lingkungan dan akan mengalami konflik untuk mengasimilasikan diri dengan masyarakat Belanda.

Pada tahun 1919 dimulai pembangunan gedung perguruan tinggi teknik di Bandung yang secara resmi dibuka pada tahun 1920.[115] Dengan ini lengkaplah sistem pendidikan di Indonesia yang memungkinkan seorang anak bangsa menempuh pendidikan dari sekolah rendah sampai pendidikan tertinggi melalui suatu rangkaian sekolah yang saling berkaitan. Bagi anak-anak Indonesia jalan ini masih sempit, tetapi jalan itu telah ada.[116]

Kemudian dalam perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia, pada tanggal 2 April 1950 tepatnya di Yogyakarta muncullah UU No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia. Jika kita tinjau dari segi politik pada saat itu bentuk negara Indonesia adalah Republik Indonesia Serikat (RIS) dan ibu kota negara berada di Yogyakarta. Kedudukan pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum dalam UU No. 4 Tahun 1950 belum dibicarakan secara spesifik. Baik itu dalam tujuan umum pendidikan maupun dalam tujuan pendidikan tinggi. Berikut kutipan bunyi pasal 3, pasal 7 ayat 4, dan pasal 20 yang menunjukkan hal tersebut.

a. Pasal 3

   Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

b. Pasal 7

   Ayat 4, pendidikan dan pengajaran tinggi bermaksud memberi kesempatan kepada pelajar untuk menjadi

[115] Tim Dosen Pendidikan Agama Islam UGM, *Pendidikan Agama Islam* (Yogyakarta: Badan Penerbitan Filsafat UGM, 2006), hlm. 23.

[116] S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 34.

orang yang dapat memberi pimpinan di dalam masyarakat dan yang dapat memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup kemasyarakatan.

c. Pasal 20.

Ayat 1, dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.

Ayat 2, Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.[117]

Dari rumusan pasal-pasal di atas, dapat dinyatakan bahwa tidak tercermin adanya perhatian terhadap usaha pembinaan mental spiritual dan keagamaan secara terus menerus melalui proses pendidikan. Dengan kata lain kedudukan pendidikan agama Islam dalam Undang-Undang ini masih sangat lemah. Kondisi tersebut bisa dipahami jika kita meninjau perjalanan hadirnya Undang-Undang ini, bahwa Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tidak lahir dengan begitu saja, tetapi melalui proses panjang seperti halnya pembentukan UU Sisdiknas Tahun 2003 yang sulit untuk disahkan karena banyak kepentingan, baik secara politik, sosial, budaya, ekonomi, dan emosi keagamaan turut ikut serta di dalamnya.

Selanjutnya Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi baru dimulai sejak tahun 1960 dengan adanya ketetapan MPRS No. II/ MPRS/1960 yang berarti pendidikan agama sebelum itu secara formalnya baru diberikan di Sekolah

[117] Salinan UU No. 4 Tahun 1950, "Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran", 1950.

Rakyat sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas saja. Adapun dasar operasionalnya, pelaksanaan Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi tersebut ditetapkan dalam UU No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. Dalam Bab III Pasal 9 ayat 2 sub b, terdapat ketentuan sebagai berikut: "Pada Perguruan Tinggi Negeri diberikan Pendidikan Agama sebagai mata pelajaran dengan pengertian bahwa mahasiswa berhak tidak ikut serta apabila menyatakan keberatan".[118]

Jika merujuk pada sejarah, dapat dipahami bahwa sebelum tahun 1965 salah satu organisasi politik yang berpengaruh di parlemen adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Maka tidak heran jika dalam mengambil kebijakan tentang pendidikan di parlemen, mereka tentu berusaha memasukkan misi-misinya. Agar segala sesuatunya tetap terlihat "bijak", unsur pendidikan agama tetap dimasukkan dalam mata kuliah, tetapi diberi kebebasan jika tidak berkenan untuk mengikutinya.[119]

Kemudian setelah meletusnya G30S PKI pada tahun 1965, diadakan sidang umum MPRS pada tahun 1966, maka mulai saat itu status pendidikan agama di sekolah-sekolah berubah dan bertambah kuat. Dengan adanya ketetapan MPRS XXVII/MPRS/1966 Bab I pasal 1 berbunyi: "Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari SD sampai dengan Universitas-Universitas Negeri."[120]

---

[118] Salinan UU No. 22 Tahun 1961, "Tentang Perguruan Tinggi", 1961.

[119] Zainuddin Zainuddin, "Analisis Terhadap Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum di Indonesia", *Al-Kaffah: Jurnal Kajian Nilai-Nilai Keislaman* 11, No. 2 (21 Desember 2023), hlm. 287–305.

[120] Kristoforus Bagas Romualdi dan Zulkarnain, "Analisis Sejarah dan Realisasi Kurikulum 1966", *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah* 9, No. 1 (1 Mei 2023).

Berikutnya pada tanggal 27 Maret 1989 hadirlah UU No. 2 Tahun 1989. Kedudukan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi dalam Undang-Undang ini secara umum tertuang dalam tujuan Pendidikan Nasional tercantum dalam Bab II pasal 4 yang berbunyi: "Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan."[121] Kemudian dari segi kurikulum, telah dinyatakan dalam pasal 39 ayat 2, yaitu:

Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat:

a. Pendidikan Pancasila,
b. Pendidikan Agama, dan
c. Pendidikan Kewarganegaraan.

Mata kuliah Pendidikan Agama pada perguruan tinggi dalam proses belajarnya menggunakan sistem kredit semester (SKS) yang masing-masing perguruan tinggi menggunakan jumlah dan besar SKS yang bervariasi. Rata-rata pendidikan agama Islam di perguruan tinggi hanya mendapat 2 SKS dalam satu semester awal yang dimasukkan dalam komponen mata kuliah Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU).[122]

[121] Salinan UU No. 2 Tahun 1989, "Tentang Sistem Pendidikan Nasional", 1989.

[122] Zainuddin Zainuddin, "Analisis Terhadap Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum di Indonesia", *Al-Kaffah: Jurnal Kajian Nilai-Nilai Keislaman* 11, No. 2 (21 Desember 2023).

Kemudian muncul SK Mendiknas No. 232/U/2000 pada tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, pada Bab I Ketentuan Umum, yaitu pada pasal 1 ayat 7 dinyatakan bahwa kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Selanjutnya Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi umum, menurut Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi menjelaskan Visi dan Misi Mata kuliah Pengembangan Kepribadian serta Kompetensi MPK sebagai berikut:[123]

Pasal 1. Visi Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)

> Visi kelompok MPK di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

[123] Mufarrihul Hazin dan Alfi Laila, "Problematika Manajemen Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Kampus Umum", *Aksi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, No. 1 (22 November 2022), hlm. 71–82, diakses melalui tautan https://Doi.Org/10.37348/Aksi.V1i1.205.

Pasal 2. Misi Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)

> Misi kelompok MPK di perguruan tinggi membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.

Pasal 3. Kompetensi Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK).

2. Problem Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum

Dinamika pendidikan agama Islam dalam arti secara luas di perguruan tinggi umum tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung adalah adanya sarana ibadah (masjid/musala), tenaga kependidikan Islam, lembaga-lembaga kerohanian Islam, tersedianya sumber pendanaan, situasi dan lingkungan yang kondusif, pernik-pernik simbol Islam, serta dukungan pimpinan, baik moril maupun materil. Sementara faktor penghambatnya adalah manakala komponen-komponen tersebut tidak ada di kampus.[124]

Berdasarkan uraian-uraian di atas, ditemukan juga beberapa problem lain yang masih menjadi batu sandungan. Bagaimana mewujudkan tujuan-tujuan

[124] Jaenal Arifin dkk., "Landasan Pendidikan Perguruan Tinggi Islam", *Seroja : Jurnal Pendidikan* 3, No. 1 (9 Januari 2024), hlm. 24–34, diakses melalui tautan https://Doi.Org/10.572349/Seroja.V3i1.1640.

tersebut seefektif mungkin. Beberapa problem tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Beban SKS yang Minimalis (hanya 2 SKS)
   Frekuensi perkuliahan agama yang hanya 2 SKS dirasa kurang memadai mengingat harapan yang demikian besar kepada pendidikan agama. Oleh karena itu bobotnya dipandang perlu untuk ditingkatkan menjadi 4 SKS. Kecuali tenaga pendidik di perguruan tinggi umum mampu mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam mata kuliah lain. Begitu juga dosen untuk mata kuliah pendidikan agama Islam, tetapi *skill* ini masih sulit didapat.
b. Pola Pembelajaran yang Berkelanjutan
   Perlunya menjabarkan pendidikan agama di perguruan tinggi, sebagai kelanjutan dari materi pendidikan agama dari TK sampai dengan SLTA. Apabila pada tingkat TK materi pendidikan agama tekanannya kepada akhlak, tingkat SD kepada ibadah, tingkat SLTP kepada muamalat, tingkat SLTA kepada munakahat, maka pada perguruan tinggi materi pendidikan agama diarahkan kepada pengenalan terhadap perkembangan pemikiran dalam Islam. Penyusunan program seperti ini secara berkelanjutan dapat pula disusun pada mata kuliah agama lain.
   Akan tetapi, pola inilah yang belum muncul, bahkan terkadang kita jumpai ada tenaga pendidik yang menganggap pembelajaran pendidikan agama Islam itu itu-itu saja dari SD sampai perguruan tinggi. Paradigma tenaga pendidik yang seperti ini menunjukkan betapa Pendidikan Agama Islam cenderung dinilai dari segi simbolis-kuantitatif, dan

bukan substansial-kualitatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa tenaga pendidiknya pun belum mampu menumbuhkan kesinambungan pendidikan itu.

c. Pola Pengembangan Pendidikan Agama Islam

Fenomena pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah atau perguruan tinggi umum tampaknya sangat bervariasi. Dalam arti ada yang cukup puas dengan pola horizontal lateral (independen), yakni bidang studi (non-agama) kadang-kadang berdiri sendiri tanpa dikonsultasikan dan berinteraksi dengan nilai-nilai agama. Ada pula yang mengembangkan pola relasi lateral-sekuensial, yakni bidang studi (non-agama) dikonsultasikan dengan nilai-nilai agama. Ada juga yang mengembangkan pola vertikal linier, mendudukkan agama sebagai sumber nilai atau sumber konsultasi dari berbagai bidang studi. Namun demikian, pada umumnya dikembangkan ke pola horizontal-lateral (independen), kecuali bagi lembaga pendidikan tertentu yang memiliki komitmen, kemampuan, atau *political will* dalam mewujudkan relasi atau hubungan lateral-sekuensial dan vertikal linier.

Dari kutipan di atas dapat dinyatakan bahwa masih banyak perguruan tinggi umum yang menjadikan Pendidikan Agama Islam sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Tidak terintegrasi dengan mata kuliah yang lain.

d. Tenaga Pendidik/Dosen Agama Islam

Faktor inilah yang memegang *central core* (intinya) pelaksanaan pelajaran agama Islam di perguruan

tinggi. Bagaimanapun dosen yang mengajar di perguruan tinggi harus sarjana dari suatu perguruan tinggi. Selain dari itu, kesediaan dari para pengasuh pendidik agama di perguruan tinggi untuk mengembangkan kemampuan penalaran akademisnya. Misalnya, untuk mengikuti program S-2 dan S-3 merupakan hal yang sangat dianjurkan. Karena dengan demikianlah diharapkan munculnya kemampuan untuk mengembangkan memahami ajaran-ajaran agama secara komprehensif, dan atas dasar itu tumbuhlah rasa kebanggaan terhadap ajaran agama yang dianutnya. Karena mengikuti kuliah agama diharapkan tidak hanya bagi mahasiswa sekadar mengejar target 2 SKS, tetapi yang lebih penting lagi semakin meyakini akan kebenaran ajaran agama yang dianutnya.

Akan tetapi, kebijakan ini terkadang ditanggapi sebagai suatu pemaksaan. Sehingga tidak jarang, banyak dosen yang melanjutkan jenjang pendidikannya, tetapi tidak mengikuti proses pembelajaran yang semestinya. Dosen-dosen seperti ini cenderung beranggapan ijazah lebih penting daripada proses tersebut. Inilah yang menyebabkan banyak sarjana-sarjana "mandul" di Indonesia. Sarjana-sarjana yang motivasi belajarnya telah mati, tetapi masih tergiur dengan iming-iming tahta. Mereka tak ubahnya sebagai penyembah berhala di era digital ini. Maka jika kita sekarang meributkan tentang pendidikan karakter, muncullah suatu pertanyaan: dari manakah pendidikan karakter itu

harus dimulai? Fenomena ini tak ubahnya bagaikan lingkaran setan.

e. Perilaku Mahasiswa yang Menyimpang dari Nilai-Nilai Akademik

Melalui media cetak ataupun media elektronik kita selalu mendapati berita yang menunjukkan berbagai perilaku mahasiswa yang jauh dari nilai-nilai akademik. Misalnya saja banyak mahasiswa yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa amoral, seks bebas, aksi tawuran, perkelahian, tindak kriminalitas, geng motor, dan lain-lain.

3. Prospek Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum

Beranjak dari beberapa problem yang telah dipaparkan di atas maka kenyataan tersebut telah mendorong pihak-pihak yang peduli akan pendidikan untuk melakukan terobosan baru yang dapat mencerahkan prospek pendidikan agama di perguruan tinggi umum. Beberapa terobosan tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Paradigma Baru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama

Pada perguruan tinggi umum terdapat perbedaan pengembangan pendidikan Agama Islam. Perbedaan model ini muncul karena adanya perbedaan pemikiran dalam memahami aspek-aspek kehidupan. Apakah agama merupakan bagian dari aspek kehidupan, sehingga hidup beragama berarti menjalankan salah satu aspek dari berbagai aspek kehidupan, ataukah agama merupakan sumber nilai-

nilai dan operasional kehidupan, sehingga agama akan mewarnai segala aspek kehidupan itu sendiri?[125] Maka dalam konteks ini muncullah model dikotomis, model mekanisme, dan model organism/sistemik.[126]

Model dikotomis memandang segala sesuatu hanya dilihat dari dua sisi yang berlawanan, seperti laki-laki dan perempuan, ada dan tidak ada, bulat dan tidak bulat, pendidikan agama dan pendidikan non-agama, demikian seterusnya. Pandangan dikotomis tersebut pada gilirannya dikembangkan dalam memandang aspek kehidupan dunia dan akhirat, kehidupan jasmani dan rohani, sehingga pendidikan agama Islam hanya diletakkan pada aspek kehidupan akhirat saja atau kehidupan rohani saja. Sedangkan model mekanisme memandang kehidupan terdiri atas berbagai aspek, dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan, yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya, bagaikan sebuah mesin yang terdiri dari beberapa komponen atau elemen-elemen, yang masing-masing menjalankan fungsinya sendiri-sendiri, dan antara satu dengan lainnya bisa saling berkonsultasi atau tidak.

Model organism/sistemik dalam konteks pendidikan Islam bertolak dari pandangan bahwa aktivitas kependidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang hidup

---

[125] Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 76.

[126] Erwin Muslimin dan Uus Ruswandi, "Tantangan, Problematika dan Peluang Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi", *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 2, No. 1 (8 Februari 2022), hlm. 57–71, diakses melalui tautan https://doi.org/10.47467/tarbiatuna.v2i1.652.

bersama dan bekerja sama secara terpadu menuju tujuan tertentu, yaitu terwujudnya hidup yang religius atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama. Pandangan semacam itu menggarisbawahi pentingnya kerangka pemikiran yang dibangun dari *fundamental doctrines* dan *fundamental value* yang tertuang dan terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber pokok. Ajaran dan nilai-nilai Ilahi didudukkan sebagai sumber konsultasi yang bijak, sementara aspek-aspek kehidupan lainnya didudukkan sebagai nilai-nilai insan yang mempunyai hubungan vertikal-linier dengan nilai keagamaan.

Dari ketiga model tersebut maka model organism/sistemik yang paling ideal jika disandingkan dengan vsi dan misi Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi umum. Hal ini sudah tergambar dalam Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 43/DIKTI/Kep/2006. Jika hal ini dapat terealisasi, maka pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum akan cerah prospeknya di masa yang akan datang.

b. Integrasi Inklusivitas Islam dalam Pendidikan Agama Islam

Dadan Muttaqien dalam *Prospek Pendidikan Agama Islam di Tengah Perubahan Zaman* menawarkan paradigma yang hampir senada dengan yang telah diuraikan di bagian a. Paradigma tersebut dalam bentuk integrasi inklusivitas Islam dalam Pendidikan Agama Islam. Pemaparannya dalam hal ini yaitu jika masih ingin eksis dan *survive*, semangat

inklusivitas ajaran Islam harus benar-benar integral dalam materi ajar dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam.[127]

Akan tetapi yang perlu menjadi catatan jangan sampai terjebak oleh inklusivitas menurut retorika Barat dalam hal-hal teori tentang pluralisme, hak asasi manusia (HAM), dan lain-lainnya, karena semua itu harus dikembalikan kepada sumbernya yang asli yaitu al-Qur'an dan sunnah meskipun tetap dengan semangat yang mengkritisi setiap interpretasi terhadap kedua sumber tersebut. Sikap Islam terhadap pluralitas misalnya, merupakan sikap pertengahan di antara dua kutub ekstrem pandangan manusia terhadap pluralitas yang menolak pluralitas mentah-mentah dan yang menerima pluralitas mentah-mentah.

Pandangan manusia yang menolak pluralitas mentah-mentah adalah pandangan yang menganggap pluralitas sebagai sebuah bencana yang membawa pada perpecahan sehingga pluralitas harus dihilangkan dan keseragaman mutlak harus dimunculkan.[128] Hal tersebut dapat dilihat pada "totaliterisme Barat" yang diwakili oleh Uni Soviet saat itu. Pandangan manusia yang menerima pluralitas mentah-mentah adalah pandangan yang menganggap pluralitas sebagai sebuah bentuk kebebasan individu yang tidak ada keseragaman sedikit pun. Hal ini terlihat pada model "liberalisme

[127] R Ghazali, "Tradisi Keilmuan Islam di Perguruan Tinggi Umum Suatu Tinjauan di Bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial", *Ijtimaiyya* 6, No. 1 (2013), hlm. 97–114.

[128] Ahmad Ali Riyadi, *Politik Pendidikan; Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), hlm. 179–180.

Barat" di banyak negara. Sikap Islam yang moderat, yang menerima pluralitas sekaligus menerima keseragaman, dapat dilihat dari penerimaan Islam terhadap beragam mazhab fikih, tetapi tetap dalam kerangka kesatuan atau keseragaman syariat Islam.

C. Kesimpulan

Perjalanan panjang kebijakan yang menunjukkan eksistensi Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi umum bukanlah hal yang mudah. Mulai dari kehadiran UU Pendidikan No. 4 Tahun 1950 hingga kehadiran SK Mendiknas No.23/U/2000 pada tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Kemudian Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, telah menempatkan Pendidikan Agama sebagai Mata Kuliah Pengembangan. Ini berarti Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi umum telah mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Ada nuansa integrasi antara mata kuliah pendidikan agama dengan mata kuliah lainnya. Dinamika ini telah melalui pergolakan berbagai kepentingan, baik kepentingan secara politik, sosial, budaya, ekonomi, dan emosi (sentimen) keagamaan turut ikut serta di dalamnya.

D. Daftar Pustaka

Muhaimin. 2012. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nasution, S. 2001. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Riyadi, Ahmad Ali. 2006. *Politik Pendidikan; Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Salinan UU No. 2 Tahun 1989. "Tentang Sistem Pendidikan Nasional".

Salinan UU No. 4 Tahun 1950. "Tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran".

Salinan UU No. 22 Tahun 1961. "Tentang Perguruan Tinggi".

Tim Dosen Pendidikan Agama Islam UGM. 2006. *Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Badan Penerbitan Filsafat UGM.

Sumber Lain:

Arifin, Jaenal dkk. 2024. "Landasan Pendidikan Perguruan Tinggi Islam". *Seroja: Jurnal Pendidikan* 3, No. 1 diakses melalui tautan https://doi.org/10.572349/seroja.v3i1.1640.

Ghazali, R. 2013. "Tradisi Keilmuan Islam di Perguruan Tinggi Umum Suatu Tinjauan di Bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial". *Ijtimaiyya* 6, No. 1.

Hazin, Mufarrihul dan Alfi Laila. 2022. "Problematika Manajemen Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Kampus Umum". *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, No. 1 diakses melalui tautan https://doi.org/10.37348/aksi.v1i1.205.

Muslimin, Erwin dan Uus Ruswandi. 2022. "Tantangan, Problematika, dan Peluang Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi". *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 2, No. 1 diakses melalui tautan https://doi.org/10.47467/tarbiatuna.v2i1.652.

Zainuddin, Zainuddin. "Analisis terhadap Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum di Indonesia". *Al-Kaffah: Jurnal Kajian Nilai-Nilai Keislaman* 11, No. 2.

Bab 7
Etika Akademis Guru dan Dosen: Idealisme di Tengah Pragmatisme

Nur Indah Sari

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan alat dan sarana bagi setiap orang untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahamannya. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan, baik dalam pengembangan konsep teoretis maupun dalam pelaksanaannya, harus mempunyai landasan yang kuat dan berpedoman pada etika akademik. Pemaksimalan nilai pendidikan memerlukan aturan-aturan yang mengatur proses pendidikan, khususnya etika akademik. Istilah-istilah yang digunakan untuk membahas masalah etika meliputi etika, etiket, tata krama, moral, dan tata krama. Etika mengacu pada nilai-nilai budaya dan sosial yang diterima masyarakat sebagai norma saling menghormati, yang tidak selalu sama di setiap masyarakat.

Pendidikan harus menumbuhkan karakter idealis melalui pengembangan nilai-nilai akademik, tidak hanya mengandalkan pragmatisme sosial dan material. Nilai-nilai etika akademik idealnya diterapkan ketika menghadapi tantangan utilitarianisme. Fungsi etika akademik memang sangat urgen, oleh karena itu artikel ini akan membahas topik-topik yang berkaitan dengan etika akademik: idealisme di tengah pragmatisme.

B. Etika Akademik dan Implementasinya

Etika mempunyai arti antara lain budi pekerti, akhlak, budi pekerti, dan tata krama. Pengertian etika secara etimologis, kata etika berasal dari kata Arab *jama' khuluq* yang berarti tata krama, perangai, tingkah laku, atau budi pekerti. Frasa ini mengandung aspek yang bersesuaian dengan *khalkun* yang berarti peristiwa, serta eratnya hubungan antara Khalik yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti menciptakan.[129]

Kata etika juga sering berarti moralitas. Kata ini berasal dari bahasa Inggris yang diambil dari bahasa Belanda. Etika: moralitas, sopan santun. Sederhananya, artinya keadaan pikiran yang dapat menentukan apakah seseorang akan selamat dari bujukan iblis, atau apakah ia mempunyai keberanian atau tidak; selalu ikuti aturan atau tidak.[130]

Secara umum moralitas diidentikkan dengan kesusilaan (*morality*). Namun moralitas dan etika memiliki arti yang berbeda walaupun keduanya berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk manusia. Etika lebih pada pemahaman tentang nilai benar dan salah dalam setiap perbuatan manusia, sedangkan etika lebih pada pemahaman ilmu mempelajari benar dan salah. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa etika adalah bagian dari teori baik dan buruk, sedangkan etika adalah bagian dari praktik.[131]

Sedangkan etika berasal dari kata Latin (*etics*) yang berarti seperangkat prinsip atau nilai yang berkaitan dengan moralitas. Etika mengacu pada ilmu tentang baik dan jahat

---

[129] A.R. Zahruddin, *Pengantar Ilmu Akhlak* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 1.

[130] J.S. Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2005), hlm. 231.

[131] Abdul Hakim, "Filsafat Etika Ibn Miskawaih", *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 13, No. 2 (2016), hlm.135.

serta hak dan kewajiban moral.[132] Secara terminologi, etika adalah suatu filsafat moral atau ilmu moral, yang tidak lebih dari ilmu atau seni hidup (*the art of living*) yang mengajarkan bagaimana hidup bahagia atau bagaimana mencapai kebahagiaan.[133]

Etika akademik merupakan upaya untuk menunjang, mengarahkan, dan membimbing kebebasan akademik agar terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan akademik adalah kebebasan untuk digunakan sebagai sarana untuk menemukan kebenaran dan mempublikasikannya serta untuk mendiskusikan secara serius hasil kesimpulan atau pendapat dalam kelompok keilmuan yang bersangkutan. Kebebasan juga merupakan kebebasan seorang peneliti dalam bidang keahliannya untuk mengajar dan mendidik murid-muridnya tentang bagaimana kebenaran ilmiah dapat diperoleh atau diketahui melalui proses-proses yang berlangsung dalam metode.

Prestasi dan capaian pendidikan juga dipengaruhi oleh penerapan etika akademik yang terbentang sepanjang poros antara pendidik dan peserta didik. Etika akademik yang berkaitan dengan peserta didik dan pendidik adalah sebagai berikut.

1. Etika Siswa

Siswa dalam pendidikan Islam merupakan pribadi yang sedang pada masa proses perkembangan serta kematangan baik secara fisik maupun psikis untuk mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga pendidikan. Siswa merupakan makhluk yang tumbuh dan

[132] J.S. Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2005), hlm. 100.
[133] Mulyadhi Kartanehara, *Menembus Batas Waktu: Panorama Filsafat Islam* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 67.

berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Siswa juga dapat digambarkan sebagai orang yang membutuhkan pengetahuan (knowledge), pengajaran dan bimbingan.134

Etika siswa terbagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut. [135]

a. Mengenai diri sendiri, meliputi: penyucian jiwa, niat ikhlas, zuhud, kesederhanaan, dan lain-lain.
b. Bagi pendidik, antara lain: ketaatan dan ketundukan seutuhnya, rasa hormat, hormat, memenuhi kebutuhan pendidik, dan menerima segala hinaan atau hukuman dari pendidik.
c. Mengenai pengajaran, antara lain: mengikuti pendapat pendidik, selalu belajar tanpa mengenal lelah, menerapkan apa yang telah dipelajari ke dalam praktik, dan secara bertahap atau terus menerus dalam memperoleh suatu ilmu.

Imam al-Ghazali merumuskan setidaknya 11 poin dalam kode etik (etika akademik) bagi siswa yang harus diikuti atau dilaksanakan oleh siswa. Kode etik profesi atau etika akademik adalah sebagai berikut. [136]

a. Belajar dalam rangka ibadah takarub kepada Allah Swt., sehingga setiap harinya siswa diharapkan agar menyucikan jiwanya dari akhlak tercela dan pikiran yang kotor.

---

[134] Syafaruddin, *Ilmu Pendidikan Islam: Melejitkan Potensi Budaya Umat* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2014), hlm. 46.
[135] Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 115.
[136] *Ibid*., hlm. 113–114.

b. Mendahulukan urusan akhirat dan mengurangi kecondongan terhadap dunia.
c. Bersikap tawadu (rendah hati) mendahulukan kepentingan guru daripada kepentingan sendiri.
d. Jagal pemikiran dan konflik yang muncul di segala aliran agar dapat fokus pada pelajaran.
e. Mendalami pengetahuan yang mulia, baik untuk ukhrawi maupun duniawi, dan meninggalkan pengetahuan yang buruk.
f. Belajar berjenjang dari kajian yang ringan (konkret) ke kajian yang sulit (abstrak) atau dari ilmu fardu ain ke ilmu fardu kifayah.
g. Mempelajari ilmu sampai tuntas, kemudian lanjutkan ke ilmu lain agar peserta didik mempunyai ilmu yang mendalam.
h. Mempelajari nilai-nilai keilmuan dari ilmu-ilmu yang dipelajari untuk menghadirkan objektivitas dalam pertimbangan permasalahan yang dihadapi.
i. Mengutamakan ilmu suci sebelum masuk pada ilmu duniawi.
j. Mengenali nilai-nilai pragmatis ilmu pengetahuan, khususnya ilmu yang dapat bermanfaat, yang dapat membahagiakan, sejahtera, dan mendatangkan keamanan di dunia dan akhirat.
k. Siswa harus mengikuti nasihat pendidik sebagaimana pasien mengikuti dokternya, mengikuti prosedur dan metode aliran pemikiran lain yang diajarkan oleh pendidik pada umumnya, dan siswa diperbolehkan menekuni seni rupa.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa banyak sekali aturan etika akademik (kode etik) yang harus dipatuhi dan harus dipatuhi oleh siswa agar terjalin hubungan yang harmonis antara siswa dan guru pendidikan dalam proses pembelajaran. Selain itu agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.

2. Etika Guru

Guru dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan berusaha mengembangkan potensi seluruh peserta didik, baik emosi (rasa), kognitif (kreatif), dan psikomotorik (karsa). Guru memegang peranan penting dalam mengembangkan potensi bawaan peserta didik. Menurut al-Ghazali, tugas utama pendidik adalah menyempurnakan, menyucikan, dan mendekatkan hati manusia (takarub) kepada Allah Swt. Jika para pendidik tidak membiasakan beribadah kepada siswanya, maka mereka akan gagal, meskipun siswanya mempunyai prestasi akademis yang sangat baik. Ini menyiratkan hubungan antara pengetahuan dan tindakan yang baik.137

Guru harus memiliki ciri-ciri yang mampu membedakan dirinya dengan orang lain dalam perannya di dunia pendidikan. Dengan sifat-sifat yang dimiliki pendidik, maka akan menjadi ciri dan ciri kepribadian yang terpadu dalam keseluruhan kepribadiannya. Keutuhan tersebut kemudian akan terwujud melalui

[137] *Ibid*., hlm. 90.

segala perkataan dan perbuatan yang dilakukannya dalam pengajarannya maupun dalam kehidupan sehari-hari.138

Masyarakat meyakini bahwa pendidik adalah orang-orang yang memiliki standar kualitas, sehingga mendorong mereka memandang guru atau pendidik sebagai aktor masyarakat. Pendapat masyarakat meragukan bahwa pendidik adalah orang-orang yang memiliki standar keterampilan pendidikan, artinya selain bakat, kecerdasan, dan keterampilan, guru juga mempunyai niat yang baik.139

Guru harus mempunyai sikap profesional dan tidak mengorbankan hak orang lain demi keinginannya sendiri. Contohnya seperti yang dilakukan al-Ghazali, ia mengatakan mempelajari filsafat di waktu luang antara menulis dan mengajar ilmu agama.140

Etika akademik guru tidak dapat dilepaskan dari jati dirinya sebagai pendidik. An-Nahlawi membagi ciri-ciri pendidik muslim dalam kerangka praktis menjadi beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut.

a. Memiliki kepribadian dan karakter *rubbaniyah* yang tercermin dari tujuan, perilaku, dan pemikirannya.
b. Bersifat ikhlas, melaksanakan tugasnya sebagai pendidik semata-mata untuk mencari keridaan Allah dan menegakkan kebenaran.
c. Bersabar dalam mengajarkan berbagai ilmu kepada siswa.
d. Tegas dalam mengomunikasikan apa yang dia ketahui.
e. Bekali diri dengan ilmu, siap untuk terus

138 Syafaruddin dkk., *Sosiologi Pendidikan* (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm. 21.
139 Mahmud, *Sosiologi Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 140.
140 Hasan Asari, *Menyingkap Zaman Keemasan Islam: Kajian atas Lembaga-lembaga Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), hlm. 118.

mengeksplorasi dan meneliti lebih jauh.

f. Pandai memanfaatkan berbagai metode pengajaran. Sesuai kaidah pemanfaatan metode pengajaran.
g. Mampu mengelola kelas dan siswa, tetap menjadi yang terdepan dan bersikap profesional.
h. Mengetahui kehidupan psikologis siswa.
i. Menyikapi berbagai kondisi dan perkembangan dunia dapat memengaruhi spiritualitas, keyakinan, atau pemikiran siswa.
j. Memperlakukan siswa secara adil, tanpa membeda-bedakan mereka meskipun mereka mempunyai hubungan keluarga.[141]

Etika akademik tersebut di atas hendaknya diterapkan dan diikuti dengan baik oleh siswa maupun guru agar tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dalam pendidikan Islam dapat tercapai sesuai harapan. Peraturan yang telah diberikan kepada siswa dan guru harus ditaati dengan baik agar langkah pembelajaran memberikan efek yang baik bagi peserta didik dan pendidik selama proses pembelajaran berlangsung.

C. Pelanggaran Etika Akademis

Banyak tindak kecurangan akademik yang terjadi di berbagai bidang akademik di Indonesia. Situasi ini menyatakan bahwa pendidikan Indonesia telah gagal dalam melatih sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya pembinaan karakter pribadi bagi siswa.[142] Pada hakikatnya

[141] Al-Rasyidin, *Falsafah Pendidikan Islami: Membangun Kerangka Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Praktik Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 146–147.

[142] Endra Murti Sagoro, "Pensinergian Mahasiswa, Dosen, dan Lembaga dalam Pencegahan Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi", dalam *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* Vol. XI, No. 2 (2013), hlm. 55.

kecurangan akademik yang telah terjadi, baik disengaja maupun tidak, dengan berbagai tujuan dan alasan merupakan tindakan yang tidak etis dan kecurangan akademik dapat terjadi ketika siswa menggunakan banyak cara yang buruk untuk mencapai tujuan dan kesuksesannya.

Perbuatan yang melanggar etika akademik merupakan tindakan yang salah dan tidak boleh dilakukan. Kegiatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran non-akademik antara lain plagiat, pemalsuan ijazah, penipuan, kecurangan, korupsi, diskriminasi, dan sebagainya.

1. **Kasus Plagiat**

   Salah satu nilai tertinggi sebuah artikel adalah orisinalitas. Sebuah artikel harus mempunyai nilai kualitas keaslian, objektivitas dan integritas. Yang dimaksud orisinalitas bukan berarti seluruh ide, konsep, dan pengetahuan yang disampaikan seseorang dalam artikel yang diciptakannya berasal dari dirinya sendiri, melainkan integritas dalam merujuk referensi artikelnya.

   Dalam dunia akademis khususnya perguruan tinggi, seluruh sivitas akademika (khususnya dosen dan mahasiswa) harus menjunjung tinggi etika akademik yang berlaku. Integritas atau orisinalitas artikel dimasukkan ke dalam kerangka pembentukan karakter. Plagiarisme secara resmi merupakan tindakan ilegal. Gejala utamanya adalah adanya tindak pidana pencurian hak milik orang lain. Apabila pemilik hak mengetahui bahwa karya kreatifnya telah dicuri dan ia tidak dapat menerima tindakan tersebut, maka secara hukum hal tersebut dapat dipidana. Orang yang mencuri atau menjiplak karya orang lain dapat dihukum sesuai dengan keputusan pengadilan yang adil; misalnya sanksi administratif, denda,

pencabutan pekerjaan, pembatalan ijazah, atau penjara. Perkembangan plagiarisme perlu segera diantisipasi karena bertentangan dengan semangat pengembangan kepribadian sivitas akademika dalam dunia pendidikan.143

Plagiarisme dalam bentuk penyalinan menunjukkan rendahnya kesadaran pemangku kepentingan pendidikan dalam menjaga nilai orisinalitas. Semangat dan motivasi pelaku dalam hal ini masih rendah, karena ingin segala sesuatunya lebih mudah, cepat dan tidak ingin penyelesaian tugas menjadi terlalu sulit. Selain itu, menyalin tidak dianggap sebagai tindakan negatif yang harus dihindari masyarakat, meskipun melanggar etika akademik.

2. Kasus Ijazah Palsu

Penyalahgunaan kualifikasi pada umumnya tidak hanya terjadi pada warga negara biasa, namun kemungkinan terjadi pada kalangan pejabat juga tidak bisa dikesampingkan. Pembelian gelar (palsu) merupakan pelanggaran etika akademik karena biasanya pembelian ini dilakukan hanya untuk mendapatkan rasa hormat atau mendapatkan pujian dan status. Terdapat beberapa faktor penyalahgunaan ijazah palsu yaitu sebagai berikut.

a. Faktor Strata Sosial

   Kelas sosial akan mendorong seseorang untuk memalsukan ijazah karena pengakuan dari lingkungan sekitar/perusahaan mempunyai

143 Mulyana, "Pencegahan Tindak Plagiarisme dalam Penulisan Skripsi: Upaya Memperkuat Pembentukan Karakter di Dunia Akademik", *Jurnal Cakrawala Pendidikan UNY* (2010), hlm. 61.

gelar/status yang ditempatinya disebabkan oleh adanya kelas sosial di lingkungannya.

b. Untuk Mencapai Prestasi Ekonomi dan Kedudukan
   Kebanyakan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas menggunakan ijazah palsu. Dengan memalsukannya, mereka menganggap akan semakin meningkatkan perekonomiannya dan menjadikan kehidupannya lebih sejahtera di masa yang akan datang. Sebab dengan menempa sebuah ijazah, itu akan dengan cepat memengaruhi promosi mereka ke suatu posisi dan memengaruhi perekonomian mereka.
c. Kurangnya Pengetahuan tentang Agama
   Kurangnya rasa percaya diri pada seseorang atau rendahnya akhlak menyebabkan terpengaruh oleh hal-hal buruk yang dapat merugikan akhlaknya dan kurangnya kesadaran diri untuk belajar dan berhasil di sekolah.
d. Manajemen Pendidikan yang Buruk
   Manajemen pendidikan yang buruk dapat memudahkan oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pemalsuan ijazah. Melalui pengelolaan pendidikan yang baik dengan pencatatan data dan informasi yang lengkap dalam pengelolaan pendidikan, maka ijazah palsu dapat dihindari.[144]

Penyalahgunaan ijazah berupa ijazah palsu merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai dunia pendidikan.

[144] Aspriah Arsyad, "Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu oleh Pegawai Negeri Sipil", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar* (2015), hlm. 72–74.

3. Menyontek

Fenomena menyontek sering terjadi dalam kegiatan belajar mengajar khususnya dalam ujian. Menyontek dianggap sebagai perilaku buruk, memalukan, dan berdosa yang harus dihindari, termasuk pelanggaran akademik. Menyontek juga dianggap sebagai tindakan berkubang dalam negativitas dan penipuan diri sendiri karena si penipu tidak bisa mengukur tingkat kemampuannya. Menyontek merupakan suatu perilaku menipu yang menyebabkan seseorang menjadi ketagihan untuk menipu atau kecanduan terhadap orang lain. Namun, sebagian siswa menganggap menyontek merupakan perilaku yang sering terjadi pada situasi perlu dan mendesak.145

Perilaku menyontek antara lain meniru pekerjaan teman, bertanya langsung kepada teman saat ulangan/ujian, membawa catatan di kertas atau di badan sendiri, menerima jawaban terjatuh dari pihak ketiga, mencari bocoran soal, mengumpulkan (menukar) saat mengerjakan pekerjaan rumah bersama teman, bertanya atau meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas kelas atau menulis, dan mengerjakan tes di rumah.

D. Analisis Kritis Sebab dan Solusi

Pragmatisme mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan mempertimbangkan akibat atau hasil yang berguna dalam praktik. Mahasiswa yang idealis sebagai agen perubahan memerlukan karakter baik yang dibentuk oleh pendidikan

145 Kris Pujiatni dan Sri Lestari, "Studi Kualitatif Pengalaman Menyontek Pada Mahasiswa", *Jurnal Penelitian Humaniora* Vol. 11, No. 2 (2010), hlm. 106.

tinggi dengan berpegang pada etika akademik tertentu. Jangan menjadi mahasiswa yang hanya pragmatis terhadap tujuan dan kebutuhan diri sendiri.

Berdasarkan kasus-kasus di atas, maka akan dijelaskan analisis penyebab terjadinya kasus negatif berupa pelanggaran etika akademik, secara spesifik sebagai berikut.

1. **Kasus Plagiat**

   Kejahatan intelektual berupa plagiarisme telah menjadi fenomena yang meluas di dunia pendidikan dan sosial. Ada banyak alasan di balik tindakan memalukan ini. Penyebab kejahatan intelektual juga sangat kompleks, seperti ingin cepat mendapatkan gelar, tidak memiliki kemampuan dan kualitas menulis, dan lain-lain. Oleh karena itu, solusi pencegahan perilaku tidak etis harus dilaksanakan secara sistematis, terpadu, komprehensif, berkelanjutan dan memerlukan komitmen bersama dari semua pihak.

   Beberapa pimpinan perguruan tinggi yang sangat menjunjung tinggi etika akademik telah mengambil tindakan tegas terhadap mahasiswa, alumni, dan dosen yang terbukti melakukan tindak pidana plagiarisme. Misalnya, tindakan yang bisa dilakukan antara lain dengan memaksa pencabutan gelar sarjana bagi mantan mahasiswa yang terbukti menjiplak karya orang lain dengan menulis tesis, disertasi, dan memorabilia. Beberapa profesor yang kedapatan melanggar etika keilmuan akademik juga dikenakan sanksi berat berdasarkan skala dan beratnya pelanggaran yang dilakukannya.

Faktor penyebab plagiarisme adalah faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut dapat dibedakan menjadi banyak faktor, yaitu:

a. motivasi rendah,
b. tidak memahami dokumen yang ditulisnya sendiri,
c. kemampuan menulis yang buruk,
d. kurangnya komunikasi dengan supervisor,
e. ingin menyelesaikannya dengan cepat dan mencari jalan pintas, dan
f. masalah pribadi siswa.146

2. Ijazah Palsu

Penyebab munculnya ijazah palsu adalah karena rendahnya motivasi belajar yang memakan waktu lama dibandingkan membeli ijazah atau membuat ijazah palsu. Ijazah palsu, selain menipu diri sendiri dan instansi yang digunakan, juga merusak semangat perjuangan adil yang perlu diusung bangsa.[147]

Solusi terhadap situasi ijazah palsu adalah dengan melakukan upaya preventif. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut.

a. Pemerintah harus tegas menegakkan KUHP terkait pemalsuan ijazah. Ketangguhan pemerintah dapat ditunjukkan dengan mempelajari peraturan melalui media massa, memberikan sanksi kepada penyedia layanan.
b. Harus ada kerja sama, kesetaraan kognitif atau dengan kata lain kesetaraan pemahaman hukum

[146] Mulyana, "Pencegahan Tindak Plagiarisme dalam Penulisan Skripsi: Upaya Memperkuat Pembentukan Karakter di Dunia Akademik", *Jurnal Cakrawala Pendidikan UNY* (2010), hlm. 68.

[147] Syahrin Harahap, *Penegakan Moral Akademik: Di dalam dan di Luar Kampus* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 80–81.

antara aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan pihak terkait) dengan pihak lain.

c. Meningkatkan pengawasan terhadap penyedia layanan palsu melalui edukasi, agar masyarakat lebih memahami situasi yang terjadi.
d. Memberikan sanksi dengan meningkatkan kerja sama antara polisi dan aparatur sipil negara dalam mengusut ijazah palsu, serta memaksakan penerapan sanksi atau hukuman.
e. Melakukan kegiatan penyadaran bersama masyarakat dan penegak hukum. Sosialisasi ini diperlukan pertama-tama untuk meningkatkan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat.[148]

3. Menyotek

Ibnu Jamaah secara khusus menekankan pentingnya etika bagi para ilmuwan. Berkat ilmu dan kedudukannya, dialah yang berhak menjaga etika tertinggi.[149] Solusi untuk menghentikan kebiasaan berbuat curang adalah dengan melakukan hal berikut.

a. Jujur. Menyadari bahwa kehidupan yang bermartabat, terhormat, dan kebahagiaan abadi adalah kehidupan yang penuh dengan kejujuran.
b. Memiliki visi. Anda harus sadar bahwa akibat dari kecurangan itu hanyalah kepalsuan dan kedok. Karena sebanyak apa pun prestasi yang diraih tanpa hasil, itu adalah penipuan diri sendiri.

---

[148] Aspriah Arsyad, "Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu oleh Pegawai Negeri Sipil", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar* (2015), hlm. 78–79

[149] Hasan Asari, *Menguak Sejarah Mencari 'Ibrah: Risalah Sejarah Sosial-Intelektual Muslim Klasik* (Bandung: Citapustaka Media, 2006), hlm. 85.

c. Bekerja keras. Menyadari bahwa kebahagiaan sejati terletak pada bekerja keras, walaupun hasilnya tidak sesuai harapan.
d. Selektif dalam memilih lingkungan dan teman. Berteman dengan orang-orang yang jujur dan pekerja keras akan menimbulkan motivasi positif untuk menjadi lebih baik dan menjauhi teman-teman yang suka berbuat curang adalah langkah yang tepat untuk tidak bergabung dengan mereka.

E. Kesimpulan

Akademi diharapkan dapat memberikan solusi cerdas terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat global dengan berpedoman pada etika akademik. Etika akademik adalah hakikat kegiatan ilmiah yang berlangsung dalam dunia akademik, termasuk di perguruan tinggi, dan lazim diterapkan pada kejujuran, keseriusan, keterbukaan, objektivitas, kerendahan hati, kemauan untuk belajar dan berkembang, menerima kritik, saling menghormati, dan tanpa diskriminasi.

Pelanggaran etika akademik merupakan noda yang mencoreng dunia pendidikan. Pelanggaran ini harus dianalisis untuk mengetahui penyebab dan solusinya. Analisis yang komprehensif akan membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong pelanggaran etika akademik, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah preventif yang efektif. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan komprehensif, pelanggaran etika akademik dapat diminimalkan. Hal ini akan memastikan bahwa akademi dapat menjalankan perannya dengan baik dalam memberikan solusi cerdas bagi permasalahan global, berlandaskan pada prinsip-prinsip etika yang kokoh.

Akademi diharapkan dapat memberikan solusi cerdas terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat global dengan berpedoman pada etika akademik. Etika akademik adalah hakikat kegiatan ilmiah yang berlangsung dalam dunia akademik, termasuk di perguruan tinggi, dan lazim diterapkan pada kejujuran, keseriusan, keterbukaan, objektivitas, kerendahan hati, kemauan untuk mau belajar dan berkembang, mau menerima kritik, saling menghormati, dan tanpa diskriminasi. Pelanggaran etika akademik adalah yang mencoreng dunia pendidikan. Pelanggaran etika akademik harus dianalisis untuk mengetahui penyebab dan solusinya, serta harus ditindak serius dengan solusi dan upaya pencegahannya.

F. Daftar Pustaka

A.R., Zahruddin. 2004. *Pengatar Ilmu Akhlak.* Jakarta: Grafindo Persada.

Al-Rasyidin. 2012. *Falsafah Pendidikan Islami: Membangun Kerangka Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi Praktik Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Amir, Miftah. 1999. *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Logos.

Asari, Hasan. 2006. *Menguak Sejarah Mencari 'Ibrah: Risalah Sejarah Sosial-Intelektual Muslim Klasik*. Bandung: Citapustaka Media.

_____. 2013. *Menyingkap Zaman Keemasan Islam: Kajian Atas Lembaga-Lembaga Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Badudu, J.S. 2005. *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia.* Jakarta: Kompas.

Daradjat, Zakiah. 2012. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Depdiknas. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Hadiwijono, Harun. 1980. *Sari Sejarah Filsafat Barat.* Yogyakarta: Kanisius.

Harahap, Syahrin. 2005. *Penegakan Moral Akademik: Di dalam dan di Luar Kampus.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kartanehara, Mulyadhi. 2005. *Menembus Batas Waktu: Panorama Filsafat Islam.* Bandung: Mizan.

Mahmud. 2012. *Sosiologi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakkir. 2014. *Ilmu Pendidikan Islam.* Jakarta: Kencana. Syafaruddin dkk. 2016. *Sosiologi Pendidikan.* Medan: Perdana Publishing.

Syafaruddin. 2014. *Ilmu Pendidikan Islam: Melejitkan Potensi Budaya Umat.* Jakarta: Hijri Pustaka Utama.

Sumber Lain:

Arsyad, Aspriah. 2015. "Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu oleh Pegawai Negeri Sipil". *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*.

Hakim, Abdul. 2016. "Filsafat Etika Ibn Miskawaih". *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 13, No. 2.

Mulyana. 2010. "Pencegahan Tindak Plagiarisme dalam Penulisan Skripsi: Upaya Memperkuat Pembentukan Karakter di Dunia Akademik". *Jurnal Cakrawala Pendidikan UNY*.

Pujiatni, Kris dan Sri Lestari. 2010. "Studi Kualitatif Pengalaman Menyontek Pada Mahasiswa". *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 11, No. 2.

Sagoro, Endra Murti. 2013. "Pensinergian Mahasiswa, Dosen, dan Lembaga dalam Pencegahan Kecurangan Akademik Mahasiswa Akutansi". *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* Vol. XI, No. 2.

Bab 8
Pengembangan PAI dalam Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah Islam Unggulan

Rafida

A. Pendahuluan

Indonesia termasuk salah satu negara multikultural terbesar di dunia dengan memunculkan keragaman kebudayaan (*culture*) yang berbeda-beda.[150] Hal ini terlihat dari banyaknya pulau di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang berjumlah sekitar 16.771 pulau, baik besar maupun kecil. Populasi Indonesia yang terus bertambah mencapai sekitar 275,77 juta jiwa, terdiri dari 300 etnis yang menggunakan 200 bahasa berbeda.[151] Sehingga keragaman budaya sering kali memicu konflik antarbudaya dan kultur yang berbeda. Selain itu, pendidikan agama di sekolah sering mendapatkan sorotan negatif dan kritik.

Kritik utama adalah bahwa pendidikan agama dianggap kurang memberikan dampak positif terhadap kehidupan para siswa setelah menjalani proses pendidikan tersebut.[152] Kritik dan kekecewaan dari masyarakat terhadap layanan

[150] Triyo Supriyatno, "Keberagaman Elemen Budaya dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Islam di Malang", *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 17, No. 2 (31 Januari 2017), hlm. 218, diakses melalui tautan https://doi.org/10.18860/ua.v17i2.3830.

[151] Nuraini Gultom dan Sakban Lubis, "Implementasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural pada Siswa Kelas XI SMA Abdi Negara Binjai", *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan* 12 No. 1 (2 Februari 2024), hlm. 409–21, diakses melalui tautan https://doi.org/10.47668/pkwu.v12i1.1160.

[152] Lusia Mumtahanah, "Integrasi Nilai Multikultural dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar", *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 3, No. 1 (24 Februari 2020), hlm. 55–74, diakses melalui tautan https://doi.org/10.31538/nzh.v3i1.461.

pendidikan perlu direspons oleh penyelenggara pendidikan, seperti kepala sekolah dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI), dengan melakukan reaktualisasi PAI melalui pengembangan tertentu yang dapat memperkuat dan memperluas peran PAI di sekolah. Praktik pendidikan harus memperhatikan tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga pembinaan aspek afektif dan konatif-volitif, sehingga siswa dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.[153]

Kegagalan pendidikan agama Islam di sekolah dan masyarakat umumnya disebabkan oleh masih adanya kesenjangan yang besar antara pemahaman agama masyarakat dan perilaku religius yang diharapkan. Dari kesenjangan tersebut, terlihat bahwa masalah yang muncul adalah karena kurang optimalnya pelaksanaan kurikulum mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang seharusnya menjadi inti dari tujuan pendidikan.[154] Padahal pengembangan Pendidikan Agama Islam sebagai budaya sekolah merupakan sebuah alternatif untuk mengimplementasikan eksistensi dari nilai-nilai ajaran Islam.[155] Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 1, pendidikan didefinisikan sebagai usaha yang disadari dan direncanakan untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi diri secara aktif, sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

---

[153] Muhammad Munif, "Pengembangan Pendidikan Agama Islam sebagai Budaya Sekolah", *Jurnal Pendidikan* 03, No. 2 (Januari–Juni 2016).

[154] Afni Ma'rufah, "Implementasi Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (Upaya Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah)", *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 1, No. 1 (10 Maret 2020), hlm. 125–36, diakses melalui tautan https://doi.org/10.62775/edukasia.v1i1.6.

[155] Nasution, "Urgensi Pengembangan Pendidikan Agama Islam sebagai Budaya Sekolah", *Institut Agama Islam Al-Azhaar Lubuklinggau* (Tanpa Tahun).

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.[156]

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan penanaman nilai-nilai religius pada lembaga pendidikan Islam dalam segala aspek aktivitas belajar. Mulai dari aspek tujuan, sarana, pembelajaran, manajerial, dan aspek lain yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Terutama, dalam penerapan pendidikan agama Islam agar mempersiapkan pendidikan yang mampu menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki moralitas yang tinggi.

B. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam sangat erat kaitannya dengan sikap keberagamaan seseorang, yang mencakup tidak hanya pengetahuan tetapi juga ketundukan dan ketaatan pada ajaran agama. Dalam konteks psikologi, keyakinan individu memengaruhi sikap yang mereka pilih untuk diterapkan. Proses pembelajaran yang efektif melibatkan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran.

Penelitian ini fokus pada pengajaran Pendidikan Agama Islam di lingkungan sekolah. Tujuannya adalah untuk mengenalkan, memahami, dan menghayati serta akhirnya mengamalkan ajaran Islam, sambil mengajarkan nilai menghormati penganut agama lain untuk mempromosikan kerukunan antarumat beragama demi kesatuan bangsa. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Zakiyah Daradjat

[156] *UUSPN No. 20 Tahun 2003* (Bandung: Citra Umbara, 2003).

yang menggambarkan Pendidikan Agama Islam sebagai usaha untuk membimbing peserta didik agar memahami secara komprehensif ajaran Islam, menginternalisasikan tujuannya, dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari serta dalam konteks bermasyarakat dan bernegara.[157]

C. Sekolah Unggulan

Sekolah unggulan pertama kali diperkenalkan oleh Wardiman Djojonegoro, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 1994. Wardiman mengungkapkan bahwa tujuan utama sekolah unggulan adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan mendistribusikan ilmu pengetahuan di setiap provinsi. Konsep ini bertujuan untuk mempersiapkan individu yang berkualitas dan memiliki wawasan keunggulan, bukan untuk melakukan diskriminasi.[158]

Karakteristik sekolah unggulan mencakup prestasi akademik dan non-akademik di atas rata-rata, fasilitas yang lengkap, sistem pembelajaran yang optimal, seleksi ketat terhadap pendaftar, tingginya minat dari masyarakat, dan biaya sekolah yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah lain. Departemen Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa dimensi ciri-ciri sekolah unggulan meliputi seleksi ketat terhadap siswa, sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan minat dan bakat siswa, lingkungan belajar yang kondusif, serta guru yang unggul baik dalam penguasaan materi, metode mengajar, maupun komitmen.

---

[157] Juju Saepudin, "Pengembangan Kurikulum PAI di Sekolah Unggulan (Studi pada SMPN 2 Kota Bandar Lampung)", *Nur El-Islam* 01, No. 02 (Oktober 2014), hlm. 33.
[158] *Ibid*., hlm. 35.

Kurikulumnya juga diperkaya dengan pengembangan sesuai kebutuhan peserta didik, sementara proses pembelajaran harus berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekolah unggulan juga diharapkan memberikan dampak positif tidak hanya kepada siswa tetapi juga kepada masyarakat sekitar.

D. Pengembangan Kurikulum PAI di Sekolah Islam Unggulan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, sekolah unggulan melakukan pengembangan kurikulum. Konstruksi kurikulum selalu mempertimbangkan keseimbangan antara mata pelajaran umum dan agama, serta antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Salah satu faktor keunggulan adalah integrasi nuansa keagamaan dalam kurikulum pendidikannya. Mereka membentuk tim khusus untuk merancang kurikulum ini didasarkan pada standar tertentu untuk siswa dalam bidang pendidikan agama, yang mencakup beberapa hal berikut.[159]

1. Ketaatan dalam ibadah, kemampuan berzikir, berdoa, dan menjadi imam shalat.
2. Kemampuan dalam berinteraksi sosial dan bermuamalah di masyarakat.
3. Pengembangan akhlak yang baik terhadap Allah dan makhluk-Nya.
4. Keyakinan yang kuat terhadap kebenaran Islam.
5. Pemahaman yang menyeluruh dan terpadu tentang Islam.
6. Kecakapan dalam menghadapi tantangan terhadap keyakinan.

[159] Dahlan, "Sekolah Islam Unggulan: Antara Harapan dan Tantangan", *Jurnal Raudhah* diakses 5 Juli 2024 melalui tautan https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/raudhah/article/view/135.

7. Kemampuan dalam melakukan perintah kebaikan dan mencegah kemungkaran.
8. Kesediaan untuk mendalami dan menyebarkan ajaran Islam.
9. Kemampuan membaca al-Qur'an dengan baik dan benar, menghayati, dan mengamalkan isinya.
10. Sikap toleransi sosial yang baik.

Di bidang umum, sekolah ini menerapkan kurikulum Departemen Pendidikan Nasional secara penuh, dengan fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan kurikulum di bidang sains dilakukan dengan penambahan jam pelajaran. Disebutkan juga bahwa sekolah Islam unggulan ini menjadikan pendidikan karakter sebagai pilar utama dalam proses penyelenggaraannya dengan mengembangkan prinsip pendidikan yaitu sebagai berikut.

1. Mengubah sekolah menjadi sarana untuk meningkatkan keberagaman.
2. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum sekolah.
3. Menerapkan dan mengembangkan metode pembelajaran untuk meningkatkan proses belajar-mengajar.
4. Mengutamakan contoh yang baik dalam membentuk karakter siswa.
5. Menciptakan lingkungan sekolah yang Islami, mendorong kebaikan, dan menolak keburukan.
6. Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung tujuan pendidikan.
7. Memprioritaskan persaudaraan dalam semua hubungan di sekolah.

8. Membangun budaya kebersihan, keteraturan, keamanan, kenyamanan, dan keindahan.
9. Memastikan bahwa segala kegiatan sekolah berfokus pada peningkatan kualitas.
10. Membangun budaya profesionalisme di kalangan staf dan guru.

E. Pendidikan Agama Islam dalam Budaya Religius

Pendidikan agama merupakan salah satu dari nilai-nilai dalam pengembangan budaya dan karakter bangsa yang menjadi pola pendidikan bagi anak di semua jenjang formal. Nilai-nilai agama ini memberikan dasar yang kuat bagi anak dalam kehidupan sehari-hari mereka, berfungsi sebagai penyaring alami terhadap perilaku yang mungkin bersifat negatif. Terdapat alasan terkait perlunya pendidikan agama Islam dikembangkan dalam budaya sekolah yaitu sebagai berikut.[160]

1. Orang tua memiliki hak progresif dalam memilih sekolah untuk anak-anak mereka, di mana sekolah berkualitas semakin dicari dan yang mutunya rendah akan ditinggalkan. Fenomena ini umum terjadi di hampir setiap kota di Indonesia pada era globalisasi saat ini. Sekolah yang memiliki kualitas baik dan menekankan pada pendidikan agama sering menjadi pilihan utama orang tua. Pendidikan keagamaan ini bertujuan untuk melawan pengaruh negatif yang muncul di era globalisasi.
2. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik negeri maupun swasta, selalu melibatkan nilai-nilai, norma perilaku, keyakinan, dan budaya, terutama pada sekolah yang dikelola oleh yayasan Islam.

[160] Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2006).

3. Selama ini, banyak orang menilai prestasi sebuah sekolah hanya berdasarkan dimensi yang terlihat, seperti nilai Ujian Nasional dan kondisi fisik sekolah. Namun, ada aspek lain yang tidak kalah penting, yaitu aspek *soft* yang mencakup nilai-nilai, keyakinan, budaya, dan norma perilaku yang merupakan sisi manusiawi dari organisasi. Aspek ini justru memiliki pengaruh besar terhadap kinerja individu dan organisasi (sekolah), sehingga dapat menjadikannya unggul.
4. Budaya sekolah memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja sekolah. Jika budaya sekolah dibangun berdasarkan ajaran dan nilai-nilai agama Islam, hal ini tidak hanya meningkatkan prestasi sekolah tetapi juga memastikan keunggulan kompetitif dan komparatif.

F. Penerapan Budaya Religius di Sekolah Islam Unggulan

Perencanaan yang laksanakan oleh pihak sekolah untuk menginternalisasi budaya religius dengan menerapkan kegiatan yang bertujuan mengajarkan nilai-nilai karakter kepada warga sekolah, diatur dalam berbagai ketetapan yaitu sebagai berikut.[161]

1. Pembiasaan salam, salim, dan senyum. Salam dianggap sebagai ungkapan paling indah yang sering digunakan untuk menunjukkan kasih sayang dan doa kepada sesama. Menyebarkan salam juga dianggap sebagai kewajiban Muslim, lebih baik daripada sapaan-sapaan kasual atau salam gaya Barat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta sesama muslim dan menciptakan suasana Islami

[161] Ilun Lailatul Habibah dan Aan Fardani Ubaidillah, "Optimalisasi Implementasi Budaya Religius di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Rahbini Gondanglegi", *Ebtida': Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 1, No. 2 (19 Maret 2022), hlm. 71–85, diakses melalui tautan https://doi.org/10.33379/ebtida.v1i2.1052.

di lingkungan sekolah. Dengan adanya program ini di sekolah Islam unggulan, diharapkan dapat meningkatkan rasa kedamaian antar sesama. Siswa diharapkan dapat saling menghormati, baik antara yang lebih muda dan yang lebih tua, maupun antara siswa dengan guru. Hal ini diharapkan akan membentuk sikap sopan dan santun siswa terhadap guru mereka serta menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan penuh dengan nilai-nilai islami.

2. Program salat duha bersama menjadi salah satu kegiatan unggulan yang dilaksanakan setiap hari pada jam pertama sebelum pelajaran dimulai.
3. Salat Duhur berjamaah. Kegiatan ini membiasakan siswa untuk melaksanakan salat berjamaah dengan disiplin, yang tercermin dari ketertiban siswa saat mereka menuju musala ketika waktu salat tiba. Dengan demikian, pembiasaan ini merupakan upaya positif sekolah untuk mengoptimalkan *output* mental siswa yang berbudaya karakter.
4. Tadarus al-Qur'an di sekolah bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai keislaman, seperti keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Kegiatan ini membantu siswa memahami dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
5. Istigasah merupakan kegiatan yang menginternalisasikan nilai ukhuwah atau persaudaraan. Hal ini penting untuk mengajarkan ajaran Islam secara praktis kepada siswa dan memperkuat hubungan antara kepala sekolah, guru, siswa, serta seluruh karyawan. Selain itu, kegiatan ini juga dapat memperkuat ikatan emosional di seluruh komunitas sekolah.

6. Ziarah Wali menginternalisasikan nilai historis, di mana siswa diharapkan memahami sejarah penyebaran Islam melalui wali sanga. Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi sekolah untuk mengajarkan praktik ibadah dalam kondisi bepergian, memperdalam pemahaman siswa tentang sejarah dan keagamaan.

G. Kesimpulan

Secara keseluruhan, pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah Islam unggulan merupakan upaya penting dalam mewujudkan budaya religius yang kuat dan berkelanjutan. Hal ini terbukti dengan integrasi nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan sekolah, mulai dari kurikulum hingga praktik sehari-hari. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di kalangan siswa, tetapi juga untuk mempromosikan toleransi antarumat beragama dan memperkuat identitas keislaman dalam budaya sekolah.

Melalui pembiasaan seperti salam-salaman, salat berjamaah, dan tadarus al-Qur'an, sekolah ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan spiritual dan karakter siswa. Lebih dari itu, kegiatan seperti istigasah dan ziarah wali tidak hanya mengajarkan sejarah Islam tetapi juga mempererat kebersamaan dalam komunitas pendidikan. Dengan demikian, sekolah unggulan ini tidak hanya mempersiapkan siswa secara akademis, tetapi juga moral dan spiritual, sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang menjadi bagian integral dari pendidikan mereka.

Secara lebih luas, pengembangan PAI dalam konteks budaya sekolah unggulan memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan karakter siswa yang berlandaskan

nilai-nilai agama, sehingga mereka menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan moralitas yang tinggi. Dengan demikian, penerapan budaya religius di sekolah Islam unggulan bukan hanya menjadi model dalam konteks pendidikan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia yang multikultural.

H. Daftar Pustaka

Muhaimin. 2006. *Nuansa Baru Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

Uuspn No. 20 Tahun 2003. 2003. Bandung: Citra Umbara.

Sumber Lain:

Dahlan. 2024. "Sekolah Islam Unggulan: Antara Harapan dan Tantangan". *Jurnal Raudhah*, diakses melalui tautan https://Jurnaltarbiyah.Uinsu.Ac.Id/Index.Php/Raudhah/Article/View/135.

Gultom, Nuraini dan Sakban Lubis. 2024. "Implementasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural pada Siswa Kelas XI SMA Abdi Negara Binjai". *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan* 12, No. 1, diakses melalui tautan https://Doi.Org/10.47668/Pkwu.V12i1.1160.

Habibah, Ilun Lailatul dan Aan Fardani Ubaidillah. 2022. "Optimalisasi Implementasi Budaya Religius di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Rahbini Gondanglegi". *Ebtida': Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 1, No. 2, diakses melalui tautan https://Doi.Org/10.33379/Ebtida.V1i2.1052.

Juju Saepudin. 2024. "Pengembangan Kurikulum PAI di Sekolah Unggulan (Studi pada SMPN 2 Kota Bandar Lampung)". *Nur El-Islam* 01, No. 02.

Ma'rufah, Afni. 2020. "Implementasi Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (Upaya Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah)", Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 1, No. 1, diakses melalui tautan https://Doi.Org/10.62775/Edukasia.V1i1.6.

Mumtahanah, Lusia. 2020. "Integrasi Nilai Multikultural dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar". *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 3, No. 1, diakses melalui tautan https://Doi.Org/10.31538/Nzh.V3i1.461.

Munif, Muhammad. 2016. "Pengembangan Pendidikan Agama Islam sebagai Budaya Sekolah". *Jurnal Pendidikan* 03, No. 2.

Nasution. Tanpa Tahun. "Urgensi Pengembangan Pendidikan Agama Islam sebagai Budaya Sekolah", *Institut Agama Islam Al-Azhaar Lubuklinggau*.

Supriyatno, Triyo. 2017. "Keberagaman Elemen Budaya dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Islam di Malang". *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 17, No. 2, diakses melalui tautan https://Doi.Org/10.18860/Ua.V17i2.3830.

Bab 9
Penguatan Nilai Islam Moderat dalam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi

Aulia Diana Devi

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki masyarakat yang sangat majemuk sehingga menjadi salah satu bangsa multikultural dengan tingkat religiusitas yang sangat mapan. Kelebihan yang dimiliki masyarakat Indonesia ini selalu dijaga dan disikapi dengan sikap moderat (*tawassuth*) yang penuh kearifan, karena masyarakat multikultural sebagai modal utama untuk membangun masa depan bangsa yang lebih maju. Sikap moderasi Islam dapat dijadikan solusi di tengah kehidupan masyarakat yang multikultural dengan menekankan pada kearifan lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Keanekaragaman tersebut menjadi sebuah rahmat tersendiri baginya jika dapat dikelola dengan baik, bahkan menjadi keunikan dan kekuatan tersendiri. Realitas sosial keanekaragaman plural ini dapat menjadi tantangan bagi kemajuan bangsa jika disikapi dengan bijak dan arif. Karena itu, sikap moderat menjadi hal yang sangat penting untuk dikembangkan dalam setiap pembelajaran mulai dari pendidikan dasar maupun menengah hingga perkuliahan di perguruan tinggi.

Pengembangan diskursus sikap moderat yang belakangan menjadi satu wacana yang ramai dibicarakan dalam konteks moderasi beragama. Ada satu problem mendasar yang tampaknya belum ada jawaban memuaskan, yakni bagaimana mengembangkan sikap moderat pada setiap mahasiswa dalam mengapresiasi moderasi beragama dengan menekankan pada implementasi atau penerapan sikap moderat berbasis kearifan lokal.[162]

Sikap moderat sering dikaitkan dengan upaya untuk merajut kembali hubungan antarmanusia yang belakangan selalu hidup dalam suasana keragaman dengan penuh kemajemukan sosial. Ada sebuah kesadaran umum yang muncul di kalangan generasi milenial, bahwa diperlukan sikap moderat dengan kepekaan terhadap kenyataan kemajemukan, pluralitas bangsa, baik dalam etnis, agama, budaya, hingga orientasi politik. Sikap moderat seorang muslim akan mengakui adanya kesamaan pandangan yang menekankan harga diri semua manusia di hadapan Allah Swt., serta hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Sikap moderat mengandaikan bahwa tidak ada warga kelas satu (*the first class*) dan warga kelas dua (*the second class*), semua adalah sama (*equal*).[163]

Jika diamati dalam perspektif moderasi beragama, tampak jelas bahwa sikap moderat dikaitkan dengan tradisi lokal dipandang sangat penting dalam memperkaya khazanah keislaman di Indonesia. Setiap tradisi lokal itu memiliki sikap moderat berada pada posisi yang absah untuk diakui keberadaannya sebagai bagian dari Islam, yang posisinya

[162] Arip Febrianto, *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum*, (Tanpa Kota: Tanpa Penerbit, 2021).
[163] Itah Miftahul Ulum, "Desain Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum Berbasis Evolusi Budaya", *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 13, No. 1 (23 April 2017), hlm. 53–64.

setara, sederajat. Oleh karena itu, gagasan moderasi beragama dalam konteks Indonesia sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama RI dalam rangka merespons berbagai persoalan sosial yang ditimbulkan karena adanya persinggungan antara dis-moderasi Islam dalam ranah kearifan lokal dapat diatasi, apabila Islam yang moderat diasumsikan sebagai Islam populer bisa mengakomodasi tradisi lokal. Hal ini telah dipraktikkan dengan cukup baik sepanjang sejarah Islam di Indonesia. Maka dari itu, pemahaman yang sama bahwa nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil alamin* dengan sikap moderat dapat dikembangkan melalui dunia pendidikan[164].

Pendidikan merupakan pilar yang penting dalam menuntut setiap perubahan. Sebagai pilar atau dasar bagi perubahan maka pendidikan mempunyai beban berat untuk mengupayakan perubahan tersebut dan telah terbukti dalam sejarah Indonesia maupun dunia, bahwa pendidikan adalah *agent of change* menuju perbaikan taraf berpikir dan perubahan status dalam hidup masyarakat.[165]

Pendidikan juga merupakan proses transformasi budaya dan nilai-nilai luhur kepribadian yang dilaksanakan secara sistematis dan terprogram. Masalah pendidikan merupakan masalah dinamis seiring dengan perkembangan zaman dan budaya manusia. Usaha-usaha perbaikan dalam pendidikan mulai dari faktor pendidik, sarana pendidikan, lingkungan pendidikan, sistem pendidikan yang senantiasa dilakukan oleh praktisi pendidikan.

---

[164] Yusuf Hanafi, "Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Perkuliahan Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum", (2022).

[165] Suparlan Suparlan dan Syukri Fathudin Aw, "Manajemen Pendidikan Karakter Berbasis Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum", *Humanika* 17, No. 2 (1 September 2017), hlm. 112–32.

Kampus merupakan lingkungan akademik maka kebenaran ilmiah dari waktu ke waktu selalu berubah, yang mendorong insan akademik untuk selalu mengadakan penelitian dan pengembangan. Pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada dasarnya merupakan sosialisasi nilai yang dapat mengantarkan dan mengembangkan potensi peserta didik, agar dapat mempersiapkan diri untuk menyongsong masa depan mereka. Pendidikan agama mempunyai fokus untuk nilai-nilai dan norma-norma yang memberi arah, arti, dan tujuan hidup manusia. Pendidikan agama membangun solidaritas sosial yang mengantarkan peserta didik untuk tidak mempunyai sifat egois. Dengan demikian pendidikan agama diharapkan mampu mengubah dan memengaruhi tingkah laku masyarakat dan bangsa.[166]

Derasnya arus informasi sekarang ini mengakibatkan dunia seakan-akan semakin sempit dan mengglobal, sehingga menjadikan persaingan hidup antara individu dan kelompok semakin menjadi cepat sehingga mengakibatkan lenturnya nilai-nilai keagamaan, kepribadian individu, serta moral masyarakat dan bangsa. Dalam masa seperti ini dibutuhkan suatu kualitas individu dan masyarakat yang kokoh dalam arti individu dan masyarakat yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa, cinta tanah air, menguasai ilmu dan teknologi serta mempunyai kecakapan dalam hidup, untuk itu menjadi tugas dari Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk mewujudkannya.[167]

Mata kuliah Pendidikan Agama Islam dipandang sebagai elemen vital dalam sistem pendidikan di perguruan tinggi.

---

[166] Arif Rahman Hakim, "Metode Pengajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi", (2015).

[167] Ahmad Sodikin dan Muhammad Anas Ma'Arif, "Penerapan Nilai Islam Moderat dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi", *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 19, No. 2 (27 Agustus 2021), hlm. 188–203.

Karena itu dalam setiap upaya perbaikan mutu pendidikan tidak lepas dari penguatan mata kuliah. Penguatan mata kuliah PAI saat ini memang merupakan suatu hal yang mendesak untuk dilakukan mengingat berbagai perkembangan ilmu dan teknologi serta arus informasi yang sedemikian cepatnya. Dalam kerangka inilah penguatan mata kuliah PAI sebagai alternatif yang ditawarkan dalam rangka meningkatkan mutu kualitas untuk membentuk pribadi mahasiswa.

Kondisi seperti tersebut di depan tentunya akan memengaruhi pula laju penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terkait dengan penyiapan kualitas sumber daya manusia (SDM).[168] Tantangan dunia pendidikan tinggi di Indonesia dalam menghadapi situasi global menjadi semakin berat. Misi membentuk sumber daya manusia yang memiliki tataran kapasitas *national competitiveness* untuk bersaing di era global menghadapi batu sandungan yang besar. Pendidikan belum diposisikan pada slot investasi jangka panjang. Hal tersebut tercermin pada komitmen pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk pendidikan.

Dalam sektor perguruan tinggi misalnya, isu utama dalam sumber daya manusia adalah menangani kualitas dosen yang kurang memadai. Dalam pengertian kuantitas, problem yang paling penting adalah terlalu bergantung kepada pegawai/dosen paruh waktu, yang sebagian besar merupakan staf institusi publik yang lainnya. Sehingga komitmen untuk mengembangkan institusi tersebut juga tidak sepenuhnya dapat dilakukan.

Selain itu, sivitas akademika perguruan tinggi harus berani mengikrarkan dirinya bahwa kampus tidak hanya

[168] Anis Marfuah dan Febriza Febriza, "Penilaian Autentik pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah dan Perguruan Tinggi", *Fondatia* 3, No. 2 (30 September 2019), hlm. 35–58.

sebagai tempat transformasi ilmu dari pihak dosen kepada mahasiswa yang berlangsung secara formal dan mekanis sifatnya, begitu pula tidak hanya sekadar menyelenggarakan ujian-ujian untuk memperoleh sertifikat dan tanda lunas. Melainkan lebih dari itu, ingin menjadikan dirinya benar-benar sebagai "wahana ilmu". Yakni sebagai wahana ilmu penghuninya yang selalu memiliki ciri khas mengedepankan keberanian yang bertanggung jawab, kebebasan yang didasari kekuatan nalar yang kuat, serta keterbukaan dalam menerima segala informasi keilmuan yang diperlukan.[169]

Globalisasi menyebabkan arus yang begitu cepat dan tidak dapat dibendung serta begitu banyak dan beragam arus informasi. Dan arus informasi tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap pengetahuan tetapi juga terhadap nilai-nilai pendidikan agama Islam. Semakin berkembangnya kebiasaan yang mengglobal dalam gaya hidup seperti pola berpakaian, kebiasaan makan, dan kegiatan rekreasi yang semakin seragam khususnya di kalangan kaum muda, berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan agama. Sehingga terkadang nilai-nilai agama semakin ditinggalkan, karena dianggap kuno dan ketinggalan sementara mereka yang mengikuti tren dianggap maju dan modern padahal mulai meninggalkan nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupannya.[170]

Untuk menangkal pengaruh globalisasi tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui jalur pendidikan, terutama pendidikan agama Islam. Sebab maju mundurnya atau baik buruknya suatu bangsa akan ditentukan oleh

[169] Ratna Rahim, "Problematika Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (PTU)", 3 (2020).

[170] Muhammad Hanif, "Strategi Pengembangan Program Studi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Islam", *Andragogi : Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 1, No. 2 (7 November 2019), hlm. 30.

keadaan pendidikan yang dijalani oleh bangsa itu.[171] Dengan adanya pendidikan agama, diharapkan peserta didik memiliki kepribadian yang utama. Pendidikan agama bertujuan untuk membentuk insan kamil (kesempurnaan insani) yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendidikan agama juga diharapkan mampu membentuk kesadaran diri peserta didik sebagai hamba Allah sekaligus fungsinya sebagai khalifah di bumi.

Memperhatikan kondisi di atas, pelaksanaan pendidikan agama Islam di madrasah dan sekolah-sekolah umum hendaknya diadakan pemikiran ulang (*rethinking*) dan rekayasa ulang (*reengineering*). Salah satunya adalah dengan analisis kebutuhan dalam manajemen pendidikan agama Islam. Analisis kebutuhan di sini adalah cara yang efektif untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam sebuah organisasi, termasuk juga organisasi pembelajaran.[172]

Pendidikan agama semakin mendapatkan posisinya dalam sistem pendidikan nasional dengan diterapkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dalam Bab V pasal 12 ayat 1 (a) dinyatakan bahwa: "Setiap peserta didik dalam satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama". Peserta didik di mana pun ia bersekolah, baik di sekolah yang agamanya termasuk mayoritas maupun sekolah yang agamanya termasuk minoritas, ia tetap berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan ajaran yang dianutnya.[173]

---

[171] Abdul Khobir, "Pendidikan Agama Islam Di Era Globalisasi" (2009).

[172] Abdul Hamid, "Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Penguatan Nasionalisme di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 15, No. 1 (30 Juni 2018), hlm. 19–41.

[173] Anita Pronika, "Peranan Pendidikan Islam di Era Millenial", *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* 1, No. 1 (30 April 2022), hlm. 73–79, diakses melalui tautan https://Doi.Org/10.57251/Multiverse.V1i1.630.

Dalam menghadapi krisis global, terutama krisis dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial, pendidikan agama Islam diharapkan mampu memberikan solusi dalam memperbaiki akhlak/moral masyarakat. Sebab di negara-negara maju pun tidak dapat memisahkan pendidikan agama, karena pendidikan agama merupakan bagian terpenting dan tidak dapat dipisahkan dengan sistem pendidikan nasional.[174] Sehingga wajar apabila bangsa Indonesia yang berbasis dan bersikap religiositas menempatkan pendidikan agama sebagai bagian yang sangat penting bagi pengembangan sistem pendidikan nasional.

Sementara itu, pendidikan agama yang diharapkan mampu memberikan solusi dan dijadikan sebagai basis penanaman nilai-nilai moral malah mengalami kondisi yang menyedihkan. Pendidikan agama sebagai satu sub sistem pendidikan nasional tidak lebih hanya sebagai pelengkap yang bersifat marginal dan terkesan terpisah dari keilmuan yang lain. Sepanjang sejarahnya, pendidikan agama tidak pernah mengalami sentuhan yang serius untuk dikembangkan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan yang selalu berkembang dan berjalan maju. Ia hanya diajarkan untuk memenuhi tuntutan kondisi sehingga nyaris tidak mengalami perubahan yang begitu signifikan. Sehingga wajar dalam pelaksanaan pendidikan agama syarat dengan kelemahan-kelemahan.

Secara umum kelemahan-kelemahan pendidikan agama berdasarkan pengamatan para ahli pendidikan antara lain disebabkan oleh rendahnya kualitas guru, rendahnya kualitas buku pegangan guru dan murid, penyebaran guru yang kurang

[174] Mukti Ali dan Firmansyah, "Konsep Implementasi Penguatan Moderasi Beragama Melalui Tripusat Pendidikan", *Al-I'tibar Jurnal Pendidikan Islam* 10, No. 1 (19 Februari 2023), hlm. 50–54.

merata, alokasi pengangkatan, gaji guru agama pada madrasah masih rendah, lemahnya wibawa guru agama dibandingkan dengan guru-guru mata pelajaran yang lain, masih lemahnya komunikasi antara Depag dengan Diknas, lemahnya pelajaran agama yang menekankan aspek kognitif dan kurangnya materi pendidikan budi pekerti (moral).[175]

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) moderasi beragama di Perguruan Tinggi Umum (PTU) memang menuntut perhatian lebih menimbang kompleksitas situasi dan kondisi yang lebih rumit. Faktor penyebabnya adalah rendahnya literasi keagamaan mahasiswa PTU pada umumnya, di mana wawasan dan pemahaman keagamaan lebih banyak diperoleh melalui mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI). Mahasiswa hanya "berinteraksi" secara formal dengan dosen dan *text book* PAI (sebagai sumber belajar utama) dalam waktu yang relatif pendek dan terbatas (3 SKS saja). Itu pun terjadi saat mahasiswa sudah berada dalam usia pascaremaja, di mana alam pikirannya telah terisi beragam informasi. Pada saat yang bersamaan, mahasiswa juga "berkenalan dengan" dan "diincar oleh" organisasi kemahasiswaan (ormawa) intra dan ekstra kampus (yang berkutat dalam gerakan dakwah Islam), dengan beragam tawaran ideologi keagamaannya.

B. Nilai Islam Moderat dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi

Al-Qur'an merupakan acuan konstitusi kehidupan manusia sekaligus sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, maka mau tidak mau manusia harus mengkaji dan menginternalisasikan pemahamannya dan mengaplikasikan

[175] M. Adlin, "Tantangan Manajemen Pendidikan Islam dalam Menghadapi Era Globalisasi", (2016).

dalam aktivitas sehari-hari demi terwujudnya cita-cita kodrati manusia untuk mencari kehidupan dunia akhirat. Mahasiswa muslim di Perguruan Tinggi Umum (PTU) tentu berkewajiban pula untuk memenuhi ketentuan di atas sebagai bukti atas statemen keislamannya. Lebih jauh lagi terbentuknya sumber daya manusia yang unggul. Sementara sebagian besar mahasiswa muslim di PTU kemampuan pemahaman al-Qur'annya baru pada tingkat membaca dalam bentuk tekstual. Berangkat dari kenyataan tersebut perlu ditanamkan kajian intensif al-Qur'an agar lebih mendekati dan mengakrabi kitab suci tersebut.

Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman, dengan berbagai isu keagamaan yang muncul. Oleh karena itu, pantas bahwa moderasi Islam diposisikan sebagai arus utama pendidikan Islam di Indonesia. Pengarusutamaan ini harus dikembangkan menjadi studi yang lebih komprehensif untuk mereformasi pendidikan Islam di semua komponennya. Sementara itu, berkenaan dengan kurikulum, moderasi Islam setidaknya dapat dikembangkan melalui perumusan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang berasal dari prinsip moderasi dan penggunaan pendekatan yang sesuai untuk mengintegrasikan konten kurikulum.

Hal ini terdiri atas empat pendekatan, yaitu pendekatan kontribusi, aditif, transformatif, dan aksi sosial. Beberapa prinsip pengembangan kurikulum yang telah dipelajari berdasarkan prinsip moderasi dan pendekatan yang digunakan akan mengarah pada pembangunan kurikulum untuk pendidikan Islam berdasarkan moderasi Islam. Terlebih ketika penguatan isu radikalisme telah masuk pada jenjang

pendidikan formal di tingkat dasar hingga menengah melalui buku ajar dan kurikulum.

Pendidikan agama Islam sebenarnya tidak hanya cukup dilakukan dengan pendekatan teknologi karena aspek yang dicapai tidak cukup kognitif tetapi justru lebih dominan yang afektif dan psikomotorik, maka perlu pendekatan yang bersifat nonteknologi. Pembelajaran tentang akidah dan akhlak lebih menonjolkan aspek nilai, baik ketuhanan maupun kemanusiaan yang hendak ditanamkan dan dikembangkan pada diri siswa sehingga dapat melekat menjadi kepribadian yang mulia. Sehingga diperlukan beberapa strategi dalam pembelajaran nilai.

Tradisional, maksudnya dengan memberikan nasihat dan indoktrinasi. Bebas, maksudnya siswa diberi kebebasan nilai yang disampaikan. Reflektif, maksudnya dengan pendekatan teoritik dan empirik. Transinternal, maksudnya guru dan siswa sama-sama terlibat dalam proses komunikasi aktif tidak hanya verbal dan fisik tetapi juga melibatkan komunikasi batin.

Pendidikan agama Islam merupakan komponen penting dalam menghadapi era globalisasi. Untuk menghadapi tantangan globalisasi tersebut diperlukan pembinaan moral dan kemanusiaan bangsa yang didasarkan kepada ajaran agama. Jika moralitas dan kemanusiaan dalam kehidupan bangsa merupakan komitmen bersama, maka rekontruksi dan reformasi pendidikan agama menjadi kemestian dan keharusan bagi segenap kalangan agamawan, tokoh intelektual, dan kaum pendidik.

Anita Pohan berpendapat bahwa integrasi ini terdiri atas setidaknya dua hal penting dari perspektif Islam. *Pertama*, sikap saling pengertian perlu dikembangkan secara akademis

untuk memperkuat pertukaran informasi yang substantif dan relevan antara sains dan agama. *Kedua*, pertukaran informasi dimaksudkan untuk menghasilkan bangunan atau konstruksi filosofis tentang konsepsi rasionalitas dan bagaimana membuat keputusan praktis. Kedua integrasi ini menjadi kesadaran kultural bersama. [176]

Di lembaga pendidikan Islam perguruan tinggi, perbedaan antara ilmu umum dan ilmu agama tidak lagi relevan untuk dipraktikkan. Tidak diragukan lagi, reformasi ini sangat sesuai dengan tuntutan zaman yang mendorong penajaman intelektual. Oleh karena itu, *output* yang dihasilkan perguruan tiunggo idealnya memiliki kualitas yang dapat diandalkan dan mampu bersaing di masyarakat. Selain sebagai wahana yang berorientasi pada peningkatan kualitas *output* yang menjadi kunci daya saing tinggi, perguruan tinggi Islam juga dibangun sebagai wahana transfer dan pengembangan teknologi serta sebagai lembaga mitra dalam perencanaan dan penyelesaian masalah pendidikan. *Output* yang dihasilkan oleh perguruan tinggi diharapkan memiliki keunggulan dalam pengembangan keilmuan dan berakhlak mulia atau berakhlak mulia.

Kehadiran lembaga pendidikan Islam dalam struktur pendidikan nasional memberikan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk memperluas pengaruhnya dalam mewujudkan tujuan besar pendidikan Islam. Oleh karena itu, manajemen pendidikan Islam yang efektif menjadi kunci untuk mendukung peran lembaga pendidikan Islam. Sasaran pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam ajaran Islam, yaitu untuk membentuk individu yang selalu taat kepada Allah dan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

[176] Anita Pronika, "Peranan Pendidikan Islam Di Era Millenial", (Tanpa Tahun).

Tujuan khusus yang lebih terperinci menjelaskan pencapaian yang diinginkan melalui pendidikan Islam. Tujuan ini bersifat praktis, sehingga pendidikan Islam tidak hanya berhenti pada idealisasi ajaran Islam dalam konteks pendidikan. Dengan kerangka tujuan yang jelas, diidentifikasi harapan-harapan yang ingin dicapai pada setiap tahapan proses pendidikan, serta hasil-hasil yang telah berhasil dicapai.

Islam moderat ini, pada gilirannya, telah menjadi ciri khas Islam Indonesia, yang berbeda dari Islam di belahan dunia lain. Namun, sifat Islam moderat ini mulai ditantang karena organisasi Islam transnasional memasuki Indonesia. Di sini terjadi pergulatan antara ideologi Indonesianisasi Islam dan ideologi islamisasi Indonesia. Lembaga pendidikan Islam adalah sarana paling strategis untuk memperkuat Islam moderat, yang merupakan karakter utama Islam Indonesia. Pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Islam yang Indonesia unik, tentu mengajarkan siswa tentang Islam Indonesia moderat. Pada saat yang sama, lembaga pendidikan Islam transnasional juga mencoba mengislamkan Indonesia kepada murid-muridnya. Perjuangan ini menuntut pentingnya memperkuat peran lembaga pendidikan Islam dalam menjalankan Islam Indonesia, sehingga Islam moderat dapat dipertahankan di nusantara.

Bangsa Indonesia saat ini butuh obat untuk merekatkan dan menyadarkan kembali untuk meneguhkan jati diri bangsa. Akhir-akhir ini, banyak kelompok yang sembarangan memanfaatkan keluhuran dalam beragama untuk meraih kepentingan politis-pragmatis. Problem itu dapat diatasi dengan moderasi beragama. Setidaknya ada dua kata kunci dalam memahami moderasi beragama. *Pertama*, moderasi

beragama meniscayakan untuk mendudukkan agama itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana fungsi agama yang semestinya. Fungsi agama itu di antaranya adalah untuk menjamin keluhuran harkat martabat manusia (*humanity*). Jati diri manusia agar dijaga, dihargai, dan dijadikan prioritas dalam sikap beragama. Sejatinya, agama itu sendiri diturunkan oleh Tuhan untuk manusia (*hudan linnas*). Sebab, yang membutuhkan agama adalah manusia, bukan Tuhan.

Kedua, dalam memahami moderasi beragama adalah menempatkan relasi agama dengan kebangsaan yang produktif. Agama merupakan sumber ajaran dan nilai yang menginspirasi atas praktik-praktik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian juga, negara-bangsa menjamin agar kepentingan semua agama-agama itu dapat dihargai, dirawat, dan diselenggarakan dengan baik. Relasi agama dan negara menjadi saling membutuhkan dan saling mengisi, bukan saling menegasikan antara satu dengan yang lain.

C. Kesimpulan

Mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) dipandang sebagai elemen vital dalam sistem pendidikan di Perguruan Tinggi Umum (PTU). Oleh karena itu dalam setiap upaya perbaikan mutu pendidikan tidak lepas dari penguatan mata kuliah. Penguatan mata kuliah PAI saat ini memang merupakan suatu hal yang mendesak untuk dilakukan mengingat berbagai perkembangan ilmu dan teknologi serta arus informasi yang sedemikian cepatnya. Dalam kerangka inilah penguatan mata kuliah PAI sebagai alternatif yang

ditawarkan dalam rangka meningkatkan mutu kualitas untuk membentuk pribadi peserta didik (mahasiswa).

Di era globalisasi seperti sekarang ini, perguruan tinggi menghadapi tantangan yang tidak mudah, baik mempertahankan institusi maupun menjaga kualitas pendidikannya dan yang tetap memegang teguh konsistensi untuk terus membangun dan melakukan konsolidasi ideal baik struktural maupun personal. Ideal yang dimaksud yaitu berupa pembentukan tekad, wawasan, dan kesepakatan secara terpadu akan makna perjuangan dalam lembaga pendidikan tinggi. Hal ini sangat menentukan terhadap sistem maupun cara pengelolaan dan pengembangan masa mendatang, yaitu profesionalisme.

Struktural yang dimaksud adalah pelaksanaan organisasi yang harus terus dilakukan improvisasi. Walaupun pelaksanaannya ada beberapa hal yang agak menyimpang dari kaidah penyelenggaraan perguruan tinggi, kebijakan ini ditempuh untuk memperoleh efisiensi dan efektivitas yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki oleh institusi serta disiplin keilmuan yang dikembangkan.

D. Daftar Pustaka

Adlin, M. 2016. "Tantangan Manajemen Pendidikan Islam dalam Menghadapi Era Globalisasi".

Ali, Mukti dan Firmansyah. 2023. "Konsep Implementasi Penguatan Moderasi Beragama Melalui Tripusat Pendidikan". *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 10, No. 1, diakses melalui tautan https://doi.org/10.30599/jpia.v10i1.2122.

Febrianto, Arip. 2021. “Buku Ajar Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum”.

Fuad, A Jauhar. 2019. “Pengembangan Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum Swasta Berbasis Agama”.

Hakim, Arif Rahman. 2015. “Metode Pengajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi”.

Hamid, Abdul. “Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Penguatan Nasionalisme di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 15, No. 1, diakses melalui tautan https://doi.org/10.14421/jpai.2018.151-02.

Hanif, Muhammad. “Strategi Pengembangan Program Studi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Islam”. *Andragogi : Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 1, No. 2, diakses melalui tautan https://doi.org/10.33474/ja.v1i2.4977.

Hanafi, Yusuf. 2022. “Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Perkuliahan Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum”.

Khobir, Abdul. 2009. “Pendidikan Agama Islam di Era Globalisasi”.

Marfuah, Anis dan Febriza Febriza. 2019. “Penilaian Autentik pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah dan Perguruan Tinggi”. *Fondatia* 3, No. 2, diakses melalui tautan https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i2.301.

Pronika, Anita. 2022. “Peranan Pendidikan Islam di Era Milenial”, *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* 1, No. 1, diakses melalui tautan https://doi.org/10.57251/multiverse.v1i1.630.

Rahim, Ratna. 2020, “Problematika Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (PTU)”.

Sodikin, Ahmad dan Muhammad Anas Ma'arif. 2021. "Penerapan Nilai Islam Moderat dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi". *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 19, No. 2, diakses melalui tautan https://doi.org/10.32729/edukasi.v19i2.702.

Suparlan dan Syukri Fathudin Aw. 2017. "Manajemen Pendidikan Karakter Berbasis Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum". *Humanika* 17, No. 2 diakses melalui tautan https://doi.org/10.21831/hum.v17i1.18566.

Ulum, Itah Miftahul. 2017. "Desain Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum Berbasis Evolusi Budaya". *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 13, No. 1, diakses melalui tautan https://doi.org/10.14421/jpai.2016.131-04.

Tentang Penulis



Afiful Ikhwan, lahir di Sriwangi OKU, 27 Oktober 1969 dari pasangan K.H. M. Sholhan dan Ibu Sofiatul Mu'inah. Latar belakang pendidikan MI Subulussalam Sriwangi tamat tahun 1984, MAN Gumawang OKU Timur tahun 1987, melanjutkan pendidikan S-1 di Universitas Islam Tribakti Kediri tahun 1992, dan melanjutkan S-2 di IAIN Raden Fatah tamat tahun 2013, saat ini penulis sedang menempuh jenjang S-3 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kegiatan sehari-hari penulis sebagai Khotibul Ma'had Subulussalam Syarif Hidayatullah Sriwangi Ulu Semendawai Suku III OKU Timur. *Email*: afifulihwan1@gmail.com



Damanhuri, lahir di Pulau Kijang pada 12 Agustus 1980. Ia adalah dosen tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) STAI Darussalam Lampung. Riwayat pendidikan sarjana (S-1) dan magister (S-2) dalam bidang Pendidikan Agama Islam ditempuh di Universitas Islam Malang (UNISMA). Selain itu, ia juga seorang santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang



Kunainah Afroyim, lahir di Lampung Timur 18 November 1994, beragama Islam dan beralamat di Dusun Bandar Agung, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung. Riwayat pendidikan diawali SDN 04 Bandar Agung, dilanjutkan ke MTs Maarif NU 14, lalu di MA Ma'arif NU 02 Lampung Timur.

Di perguruan tinggi penulis menempuh S-1 di Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASY) Tebu Ireng Jombang, lulus tahun 2016, menempuh pendidikan pascasarjana di UIN Maulana Malik Brahim Malang lulus tahun 2019, dan sedang menempuh S-3 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.



Muhib Ali Hasan Ristia, adalah nama yang disematkan sejak terlahir dari pasangan dua sejoli bernama Khudlori dan Mustatik Atul Khoiriyah Nurbah. Tempat lahir di Desa Muara Burnai, 4 Mei 1990. Dengan latar belakang pendidikan formal akademik:

1. MI Nurul Ulum Muara Burnai II OKI Sumatra Selatan
2. MTs Nurul Ulum Muara Burnai II OKI Sumatra Selatan
3. MAK Tri Bhakti Attaqwa Lampung Timur Lampung
4. S-1 Ma'arif Metro Lampung
5. S-2 STAIN Jurai Siwo Metro Lampung
6. S-3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2024 *on process*)

Adapun pendidikan nonformal yang ditempuh:

1. Pondok Pesantren Tri Bhakti Attaqwa Rama Puja Raman Utara Lampung Timur Lampung
2. LEMKA (Lembaga Kaligrafi al-Qur'an) Sukabumi Jawa Barat



Mohammad Wisnu Khumaidi, lahir di Surakarta, 1 Juni 1973, beragama Islam dan beralamat di Perumahan Ragom Gawi Blok I Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Hobi yang kami miliki menulis dan *traveling*. Riwayat pendidikan diawali di SD Angkasa- Surakarta, dilanjutkan ke SMP Negeri 1 Kartasura, dan kemudian melanjutkan ke SMKK Negeri Surakarta.

Di perguruan tinggi, penulis menempuh pendidikan di STIT Darul Fattah Bandar Lampung (lulus 2012). Pada tahun yang sama melanjutkan ke IAIN Raden Intan Lampung untuk menempuh pendidikan S-2 (lulus 2014). Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan S-3 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.



Nur Indah Sari lahir di Tulung Kibang, 30 Maret 1989, beragama Islam dan beralamat di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Riwayat Pendidikan diawali SDN 02 Bumi Tinggi, SLTP PGRI I Bumi Agung, MA Ma'arif NU 05 Sumber Gede Sekampung Lampung Timur. Di perguruan tinggi, penulis menempuh pendidikan S-1 di STAIN Metro Lulus tahun 2012 kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan S-2 di STAI Metro lulus tahun 2014, dan sedang menempuh

pendidikan S-3 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini penulis mengabdikan diri sebagai dosen tetap di STAI Darussalam Lampung. Dalam perannya sebagai pendidik, ia dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan berkomitmen dalam pengembangan pendidikan agama Islam. Selain itu, ia aktif dalam berbagai penelitian dan kegiatan akademik yang berfokus pada peningkatan kualitas pengajaran PAI.



Seka Andrean, M.Pd. Penulis lahir di Bangun Sari, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur pada 28 Juni 1997. Anak pertama dari dua bersaudara ini merupakan pasangan Bapak Saifan Karjiyo dan Ibu Ani Sartini. Pendidikan S-1 di tempuh pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) di UIN Raden Intan Lampung (lulus tahun 2019), pendidikan S-2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (lulus tahun 2021). Dan alhamdulillah sekarang sedang menempuh pendidikan jenjang doktoral di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengambil jurusan S-3 PAI-BSI pada tahun 2023 hingga sekarang. Suami dari Aulia Diana Devi, M.Pd. ini aktif menjadi dosen di tetap di salah satu universitas Islam swasta di Lampung. Di samping itu penulis juga aktif menjadi *reviewer* jurnal pada bidang pendidikan dasar Islam. Berikut kontak penulis yang dapat dihubungi via *email*: sekaandrean28@gmail.com



Rafida. Penulis lahir di OKU Timur 1 Agustus 1999. Anak pertama dari tiga bersaudara ini putri dari Bapak Imam Rodin dan Ibu Siti Nasikhah. Pendidikan S-1 ditempuh pada tahun 2016 sampai 2020 di Institut Agama Islam Tribakti Kediri Prodi PGMI (Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah). Pada tahun 2020 langsung melanjutkan pendidikan S-2 di tempat yang sama yang saat ini telah berubah nama menjadi Universitas Islam Tribakti Kediri dan selesai pada tahun 2022. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan S-3 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sejak tahun 2023 mengambil Prodi PAI Berbasis Studi Interdisipliner. *Email* penulis rafidasaputri@gmail.com



Aulia Diana Devi, M.Pd. Penulis lahir di Tegal Mukti pada tanggal 4 Juni 1997. Anak kedua dari dua bersaudara ini lahir dari pasangan Bapak H. Imam Kahfi, M.Pd.I. dan Ibu Hj. Nyamini, S.Pd.I. Pendidikan S-1 ditempuh pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) di UIN Raden Intan Lampung (lulus tahun 2019), pendidikan S-2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam MPI (lulus tahun 2021). Dan alhamdulillah sekarang sedang menempuh pendidikan jenjang doktoral di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengambil jurusan S-3 PAI-BSI pada tahun 2023 hingga sekarang. Istri dari Seka Andrean, M.Pd. ini aktif mengajar di salah satu universitas Islam di Lampung. Di samping itu penulis juga aktif dalam menulis beberapa artikel jurnal. Berikut kontak penulis yang dapat dihubungi via *email*: auliadianadevi15@gmail.com.

.